

330.917  
Mur  
s e1

STUDI KEBERHASILAN  
PROGRAM PENGEMBANGAN KECAMATAN (PPK)  
DI KECAMATAN GUBUG  
KABUPATEN GROBOGAN

TESIS

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan  
Guna Mencapai Derajat Sarjana S-2

Program Pascasarjana Universitas Diponegoro

Program Studi : Magister Ilmu Administrasi

Kosentrasi : Magister Administrasi Publik



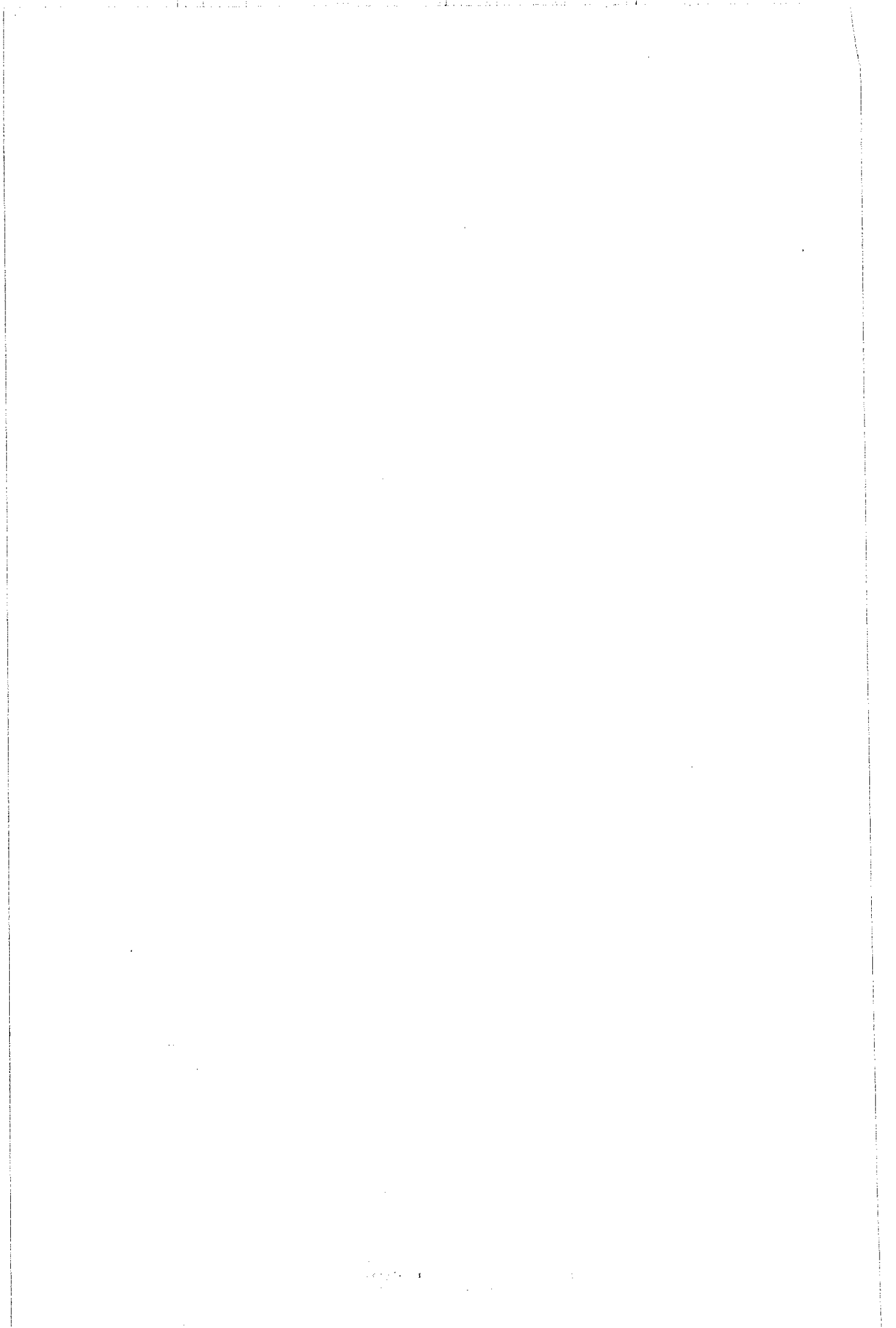
Diajukan Oleh :

NURKHOLES  
D4E000121

PROGRAM PASCA SARJANA  
UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG  
2002

i

UPT-PUSTAK-UNDIP



STUDI KEBERHASILAN  
PROGRAM PENGEMBANGAN KECAMATAN (PPK)  
DI KECAMATAN GUBUG  
KABUPATEN GROBOGAN

Dipersiapkan dan disusun oleh  
NURKHOLEES  
D4E000121

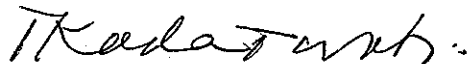
Telah dipertahankan di depan Tim Penguji

Pada tanggal :

Susunan Tim Penguji

UPT-PUSTAK-UNDIP	
No. Daft:	2080/T/MAPI
Tgl.	13 Sept 03

Ketua Penguji / Pembimbing I



( Dra. Tri Kadarwati, SU )

Anggota Dewan Penguji I



(Drs. H. Yusmilarso, MA)

Sekretaris Penguji/Pembimbing II



( Dra. Dyah Hariani, MM )

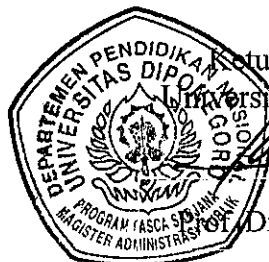
Anggota Dewan Penguji II



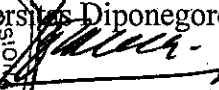
( Dra. Sri Suwifri, Msi )

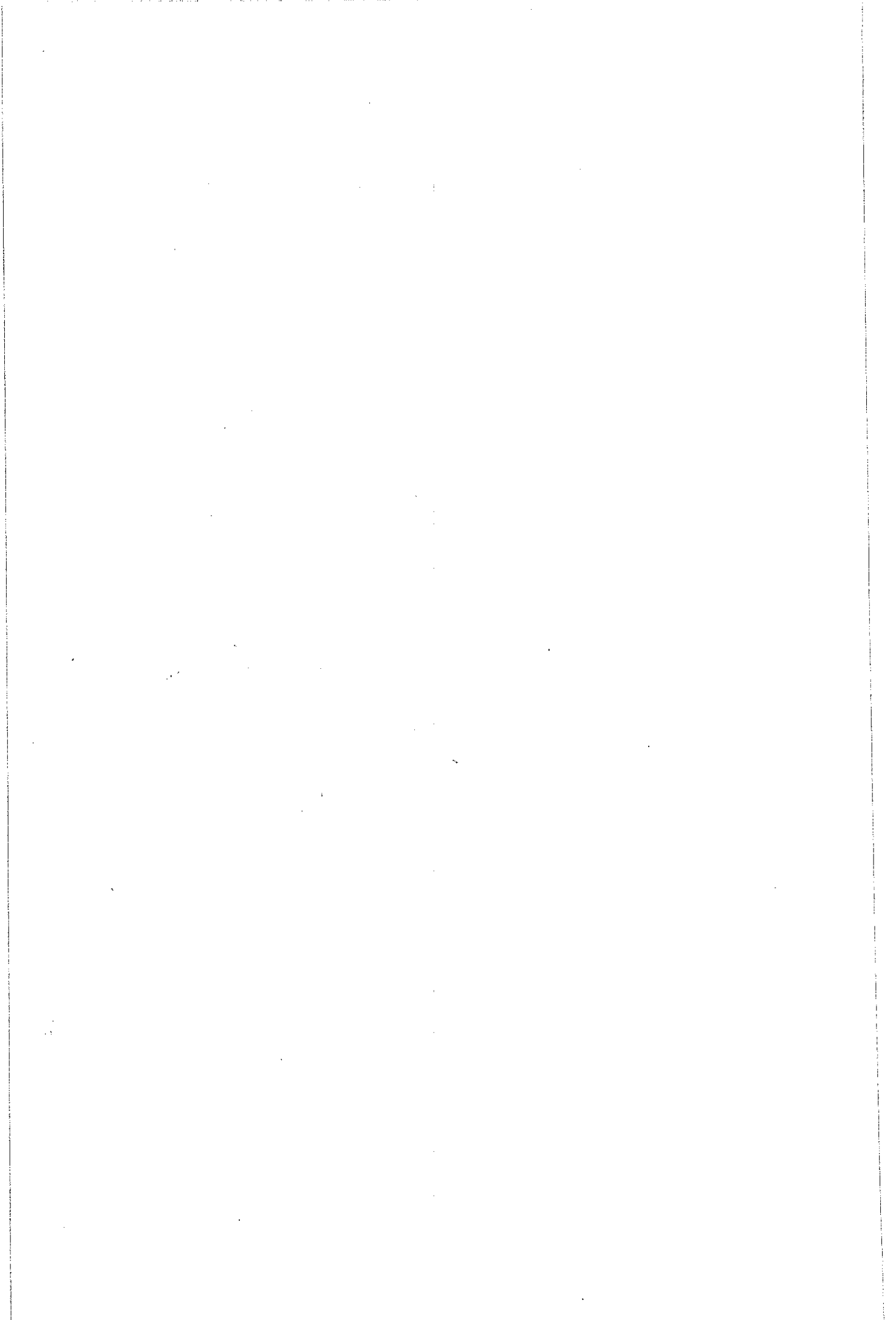
Tesis ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan  
Untuk memperoleh gelar Magister Sain

Tanggal



Ketua Program Studi MAP  
Universitas Diponegoro Semarang

  
Drs. Y. Warella, MPA, Ph.D



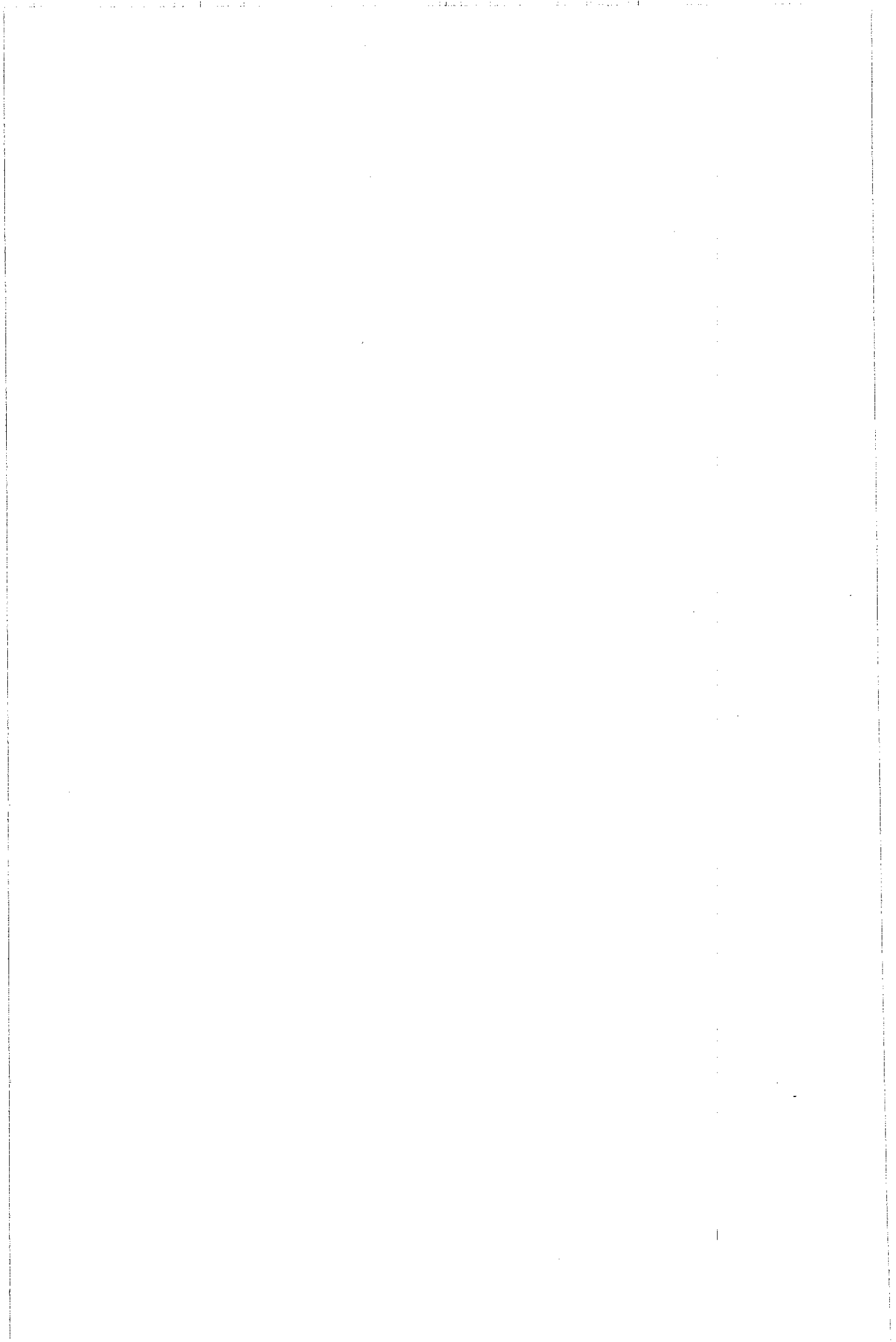
## RINGKASAN

Permasalahan pembangunan di di daerah yang sangat menonjol saat ini adalah masalah kemiskinan, berbagai upaya pengentasan kemiskinan telah dilaksanakan tetapi hasilnya belum menampakan hasil yang signifikan. Setelah adanya krisis ekonomi tahun 1997 yang berdampak pada peningkatan kemiskinan dan ketidakberdayaan kemudian muncul kebijakan pembangunan dalam mengatasi masalah kemiskinan dengan pemberdayaan masyarakat yang melahirkan program pengembangan kecamatan atau lebih dikenal PPK. Program ini mempunyai tujuan *pertama* meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan pembangunan *kedua* meningkatkan kegiatan ekonomi produktif untuk peningkatan pendapatan dan *ketiga* meningkatkan kemampuan kelembagaan dan institusi desa dalam pengelolaan pembangunan.

Pembangunan PPK di Kabupaten Grobogan telah dilaksanakan sejak tahun 1998 sampai dengan tahun 2001, tentunya kurun waktu selama perjalanan tersebut pelaksanaan PPK sudah melihatkan hasil dan dampak bagi masyarakat serta kelembagaan desa. Pertanyaannya adalah sudah sejauhmana tingkat keberhasilan pembangunan PPK sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ditetapkan, merujuk dari pandangan David Korten dengan teori kesesuaian bahwa untuk melihat tingkat keberhasilan program dapat dilihat dari tiga sudut pandang yaitu kesesuaian program, penerima program dan organisasi pelaksana. Dari teori ini penulis turunkan kedalam variabel penelitian berdasarkan pada permasalahan yang ada di wilayah penelitian yaitu di Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan. Partisipasi masyarakat sebagai turunan dari dimensi penerima program adalah untuk melihat gambaran tingkat hubungan dengan keberhasilan pembangunan PPK, Dimensi organisasi pelaksana adalah bagaimana hubungan kemampuan organisasi pelaksana dalam menjalankan peran dan fungsinya dalam mengelola program dengan keberhasilan PPK dan Dimensi program diturunkan kedalam variabel komunikasi program dimana maksud tujuan dan sasaran dapat tercapai dengan efektif apabila ada peningkatan pemahaman terhadap program yaitu untuk melihat bagaimana hubungan komunikasi program dengan keberhasilan program.

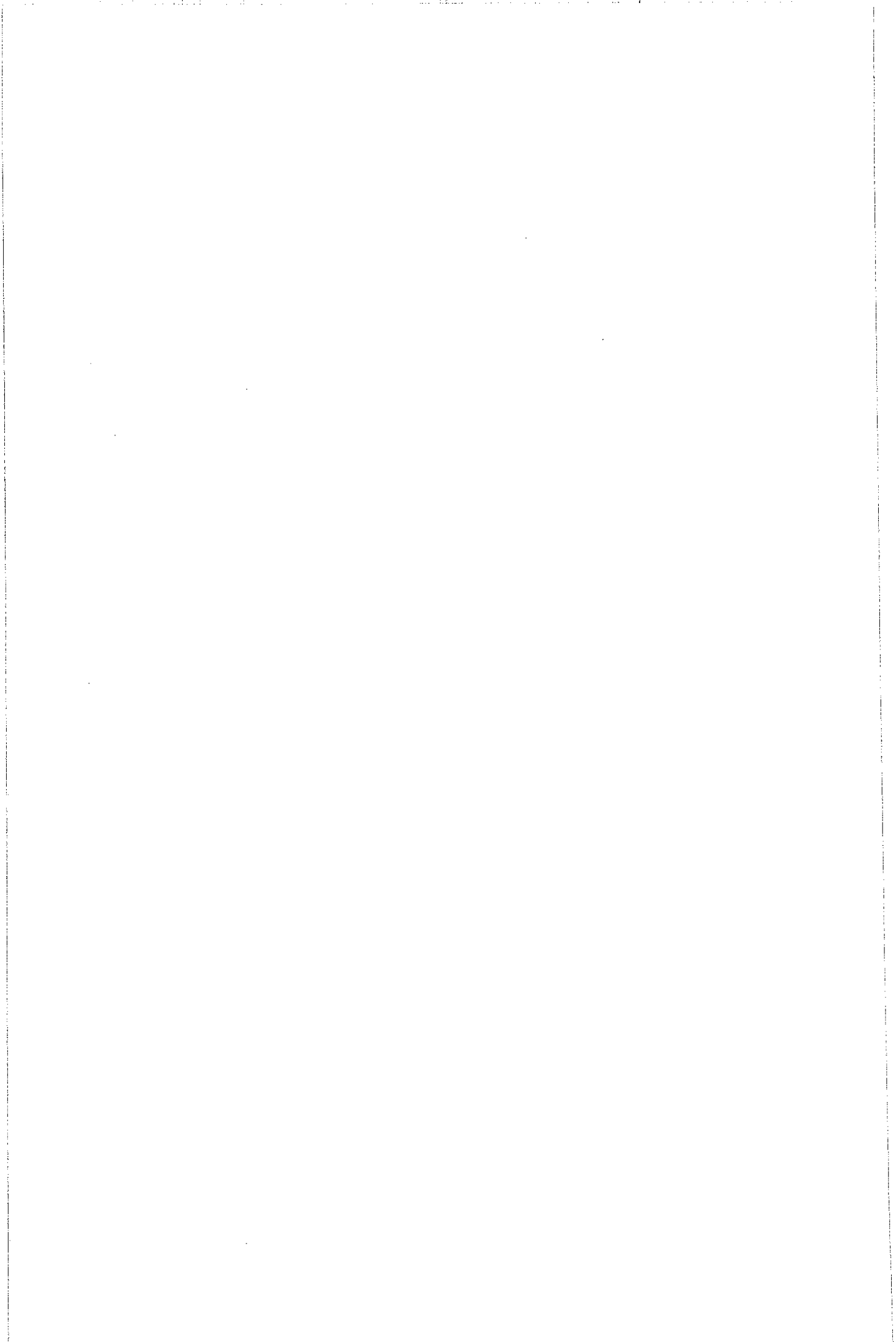
Setelah diadakan penelitian dan uji statistik maka didapatkan hasil penelitian bahwa secara teoritis dan empiris ternyata benar dan terbukti. Keberhasilan PPK yang ditunjukkan dengan peningkatan usaha ekonomi produktif kurang berpengaruh dari pernyataan responden sebesar 52,5 %, hal ini bisa dibuktikan dari :

1. Tingkat partisipasi masyarakat yang sedang-sedang saja dimana jawaban terbesar responden tingkat aktivitas kelompok 57,5% , kehadiran dalam forum perencanaan di musbangdes 57,5 %, tingkat keterlibatan dalam UDKP 57,5%.
2. Kemampuan organisasi pelaksana berpengaruh terhadap keberhasilan program dimana jawaban terbesar responden terhadap tingkat kemampuan ketrampilan fasilitator 35 % menyatakan cukup mampu. Dan Peran dan fungsi fasilitator kurang mendukung kelompok sasaran dari jawaban responden 32,5 %.
3. Komunikasi program juga berpengaruh terhadap kurang berhasilnya program dimana 50 % jawaban responden menyatakan bahwa informasi PPK yang



didapatkan oleh kelompok sasaran tidak lengkap, selanjutnya 45 % responden menyatakan bahwa informasi yang didapatkan tidak jelas. Disini nampak sekali bahwa tingkat pemahaman masyarakat terhadap program sangat rendah karena tidak lengkapnya informasi dan ketepatan serta kejelasan informasi.

Berdasarkan temuan hasil yang menonjol tersebut faktor yang paling berpengaruh adalah rendahnya tingkat pendidikan, sehingga penerimaan dan pemahaman terhadap tujuan program kurang bisa diterima. Hal ini berakibat pada rendahnya tingkat partisipasi pengelolaan PPK, kemampuan dari organisasi pelaksana dalam menjalankan peran fungsinya serta komunikasi program antara komunikator disini TPKD dan penerima pesan kelompok sasaran menjadi tidak efektif. Salah satu faktor yang berpengaruh lainnya adalah dukungan masyarakat luas terutama bagi mereka yang dianggap mampu dalam kuantitas dan kualitas SDM kurang peduli terhadap masalah pengentasan kemiskinan dengan keberdayaan masyarakat, disini nampak dari keterbatasan peran fungsi camat, kepala desa dalam mendukung keberhasilan program disebabkan oleh keterbatasan kewenangan. Bagi masyarakat kurang mendukung untuk bersama-sama mengentaskan kemiskinan yang berangkat dari permasalahan masyarakat itu sendiri.



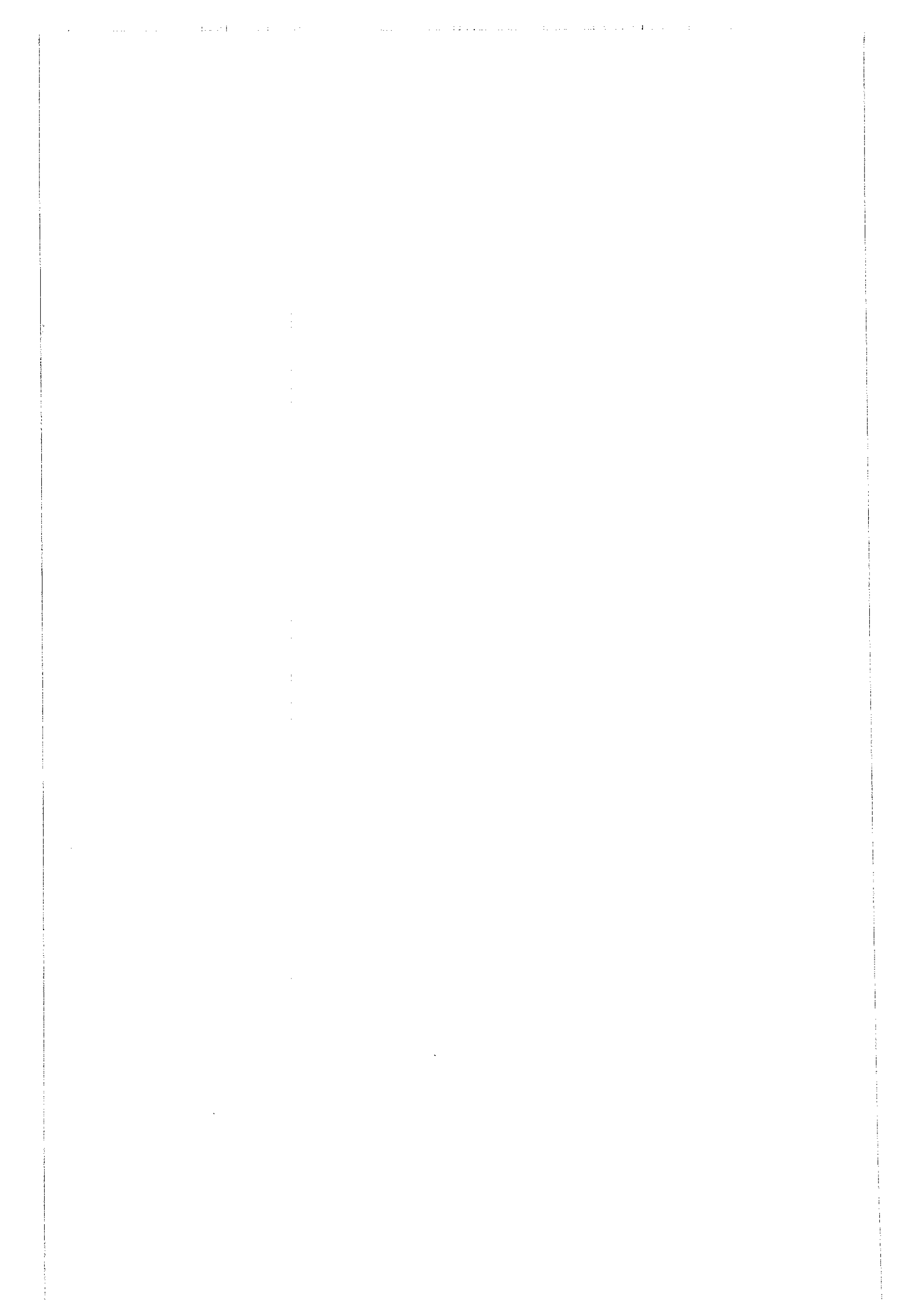
## ABSTRAKSI

Program Pengembangan Kecamatan (PPK) merupakan program pengentasan kemiskinan dengan pemberdayaan masyarakat yang menempatkan masyarakat sebagai subyek pembangunan yang bertujuan meningkatkan kegiatan ekonomi pedesaan industri kegiatan usaha dan meningkatkan kemampuan lembaga masyarakat dalam pengelolaan pembangunan. Dalam penelitian ini akan melihat gambaran tingkat hubungan partisipasi masyarakat, kemampuan organisasi pelaksana dan program komunikasi dengan keberhasilan PPK di Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan berdasarkan pendekatan teori kesesuaian dari David Korten.

Penelitian dilakukan dengan metode kuantitatif yang dipertajam metode kualitatif, dengan menggunakan uji hipotesa koefisien korelasi Rank Kendall dan Konkordansi Kendall. Berdasarkan hasil penelitian dengan metode tersebut didapatkan hasil penelitian sebagai berikut :

1. Ada hubungan yang signifikan antara partisipasi dengan keberhasilan PPK ditunjukkan angka Z hitung 2,33
2. Ada hubungan yang signifikan antara kemampuan organisasi pelaksana dengan keberhasilan PPK ditunjukkan angka Z hitung 2,65
3. Ada hubungan yang signifikan antara komunikasi program dengan keberhasilan PPK ditunjukkan angka Z hitung 2,65
4. Ada hubungan ketiga variabel secara bersama dengan keberhasilan program sebesar 44,3 % sedangkan sisanya 55,7 % di pengaruhi oleh faktor lainnya.

Berdasarkan hasil penelitian dari teori yang dibangun secara teoritis ternyata benar dan sesuai dengan keadaan nyata yang terjadi dalam pelaksanaan pembangunan PPK di Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan.



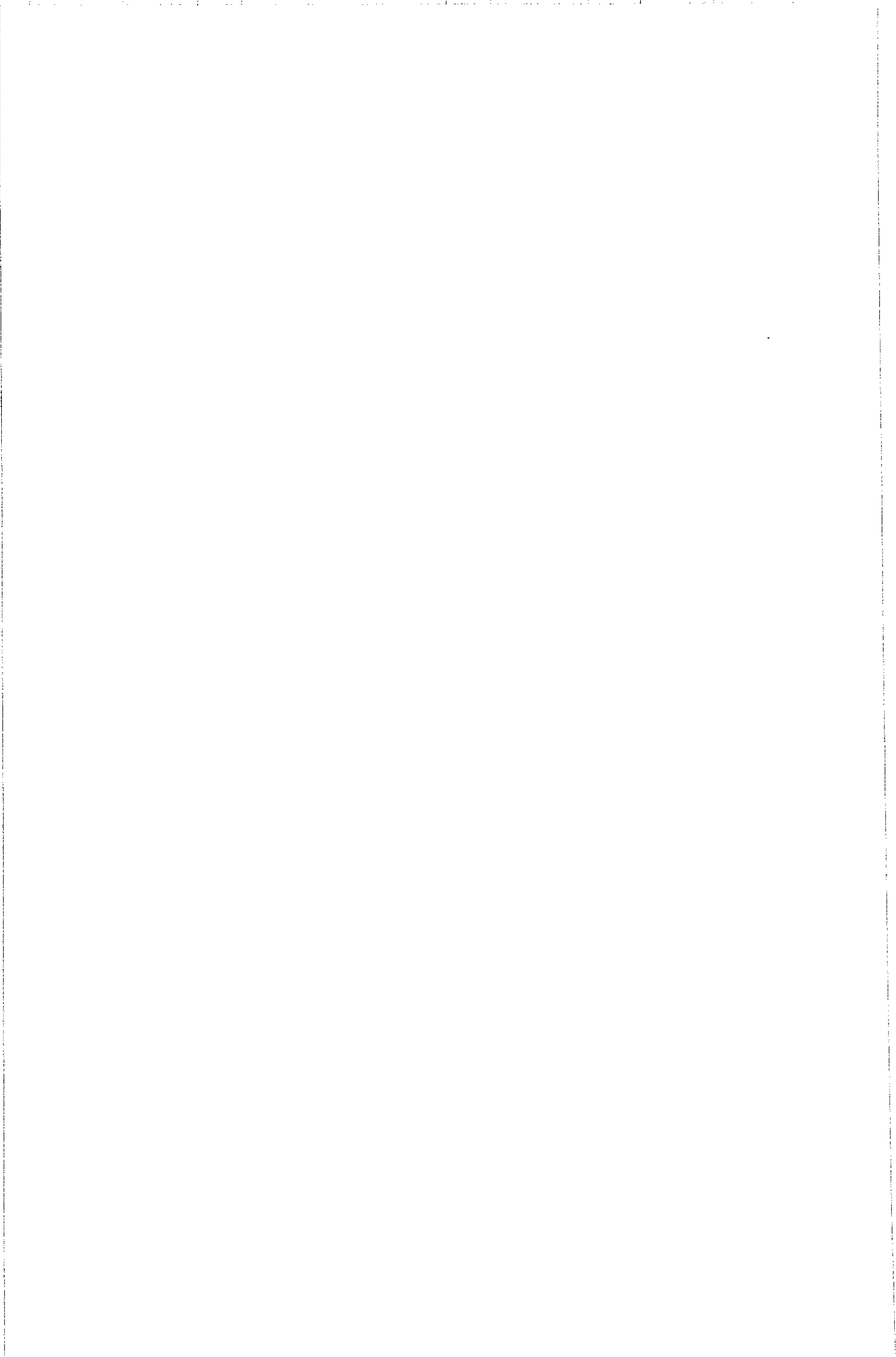
## ABSTRACT

The Sub district Development Program (PPK) is a programme to decrease poverty by citizen as a subject of development. The aim is to increase economic sector. The effort of this activity and to increase citizen in regulation of development. In this research, we can see the correlation from the citizen participation, the organizer ability, and the communication programme with success of PPK in Sub district of Gubug, District of Grobogan with the relativity theory from David Korten.

The research is done with quantitative and qualitative method, by using correlation coefficient hypothesis test of Rank Kendall and Konkordan Kendall. Based on the result of the research by using that method, we can get correlation between the research variable as follows:

1. There is significant correlation between the participation with PPK success as showed in  $Z = 2,33$ .
2. There is significant correlation between the organizer ability with PPK success as showed in  $Z = 2,65$ .
3. There is significant correlation between the Programme communication with PPK success as showed in  $Z = 2,61$ .

Based on the result of the research from theory, which is made theoretically, are correct and suitable with the reality in implementation of PPK development in Sub district of Gubug, District of Grobogan.



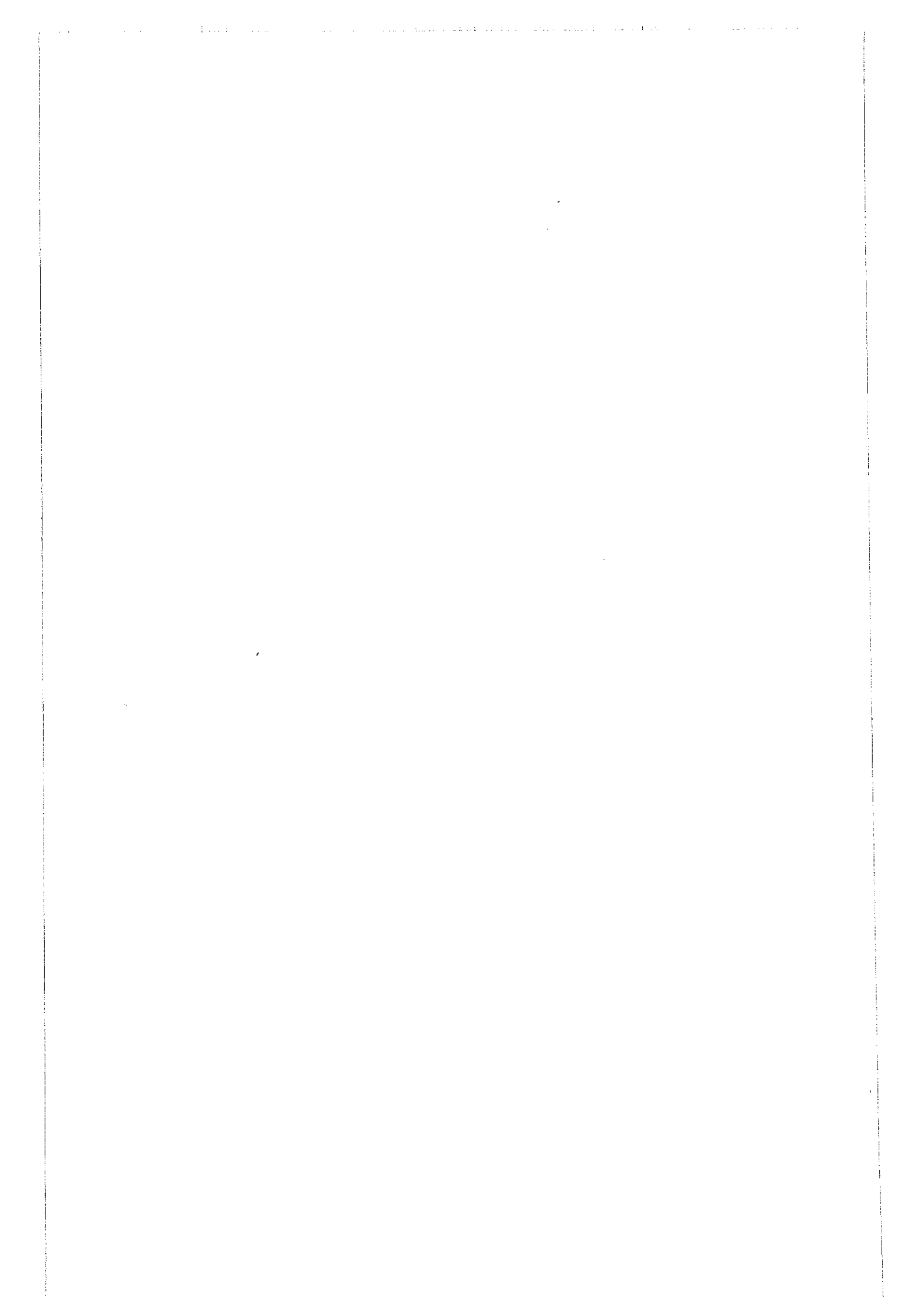
## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan disuatu Perguruan Tinggi, juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka

Semarang, Oktober 2002



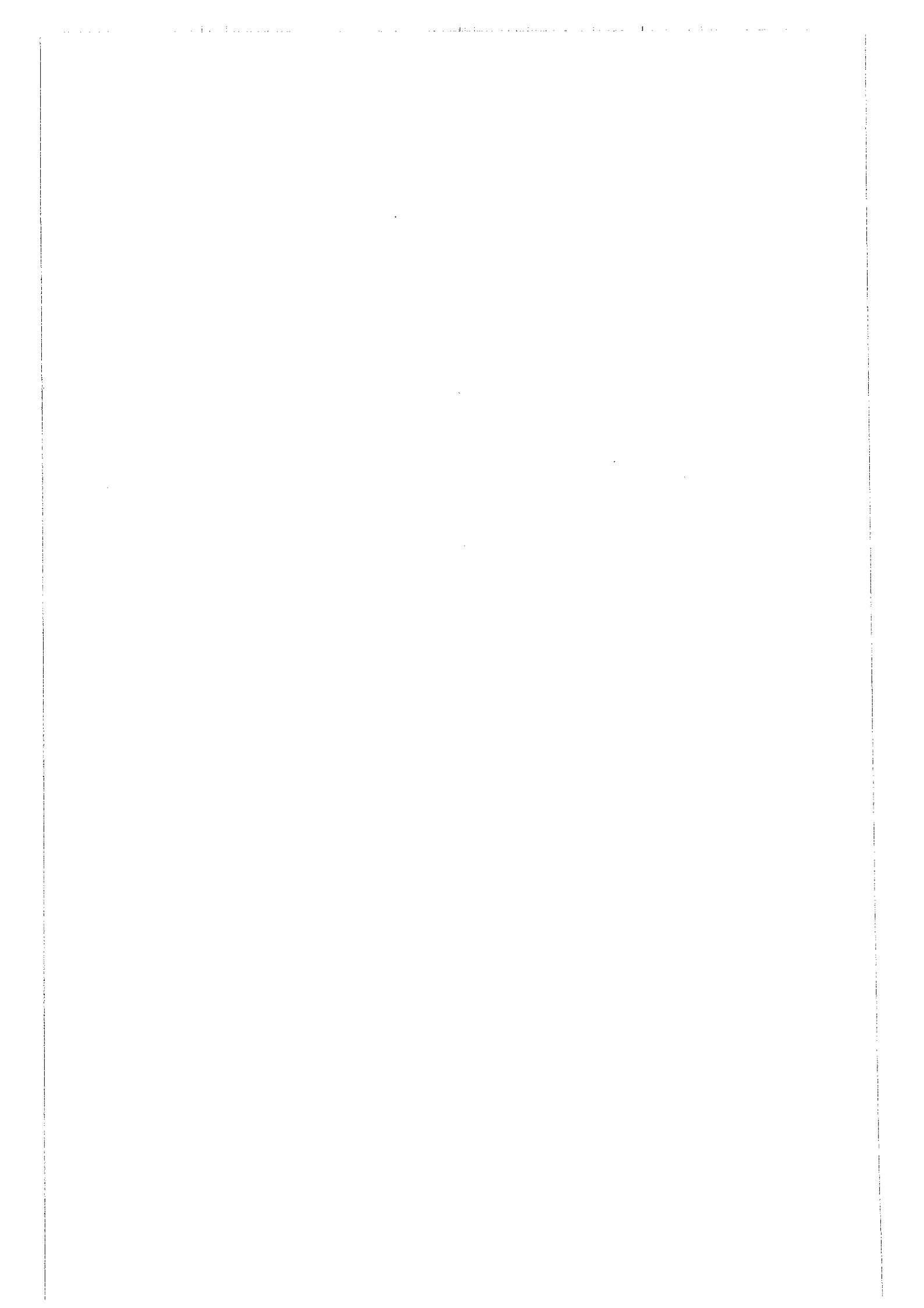
NURKHOLES



## KATA PENGANTAR

Tesis ini ditulis berawal dari keprihatinan atas permasalahan berbagai upaya program pengentasan kemiskinan belum menampakkan hasil yang signifikan, kemudian ada paradigma baru dalam upaya pengentasan kemiskinan dengan mengembangkan pemberdayaan masyarakat dan pemberdayaan kelembagaan institusi desa dengan pembangunan Program Pengembangan Kecamatan atau yang biasa dikenal dengan PPK. Kemudian sampai sejauhmana keberhasilan PPK terhadap tujuan dan sasaran program dapat tercapai dengan paradigma yang menempatkan masyarakat sebagai subyek pembangunan adalah hal yang menarika bagi penulis untuk melakukan penelitian.

Akhirnya puji syukur atas rahmat dan kurunia Allah SWT serta bantuan dorongan dan bimbingan beberapa pihak sehingga dapat terselesaikannya penulisan tesis ini sebagai syarat kelulusan untuk memenuhi sebagian persyaratan guna mencapai derajat sarjana S-2 di Magister Administrasi Publik Program Pasca Sarjana UNDIP Semarang. Untuk itu nampaknya tidak berlebihan jika penulis sampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang setulusnya kepada dosen pembimbing kami Dra. Tri Kadarwati, SU, Dña. Diah Hariani, MM, Drs.H.Yusmilarso,MA dan Dra.Sri Suwitri,MSi serta dosen penguji dan seluruh keluarga besar MAP Undip tidak lupa Camat Gubug beserta stafnya, yang telah membantu meluangkan waktu, buah pikiran, tenaga, biaya dan bahkan dorongan moril bagi penulis yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu.



Tesis ini barangkali tidak akan pernah terwujud tanpa pengertian yang tulus serta dukungan seluruh keluarga. Nanik Widyowati istri penulis, Vivi Nandya Rachmawati dan Eva Riska Isnandya mutiara yang amat berarti dalam hidup penulis, yang memberikan semangat dan inspirasi dalam menyelesaikan tugas-tugas selama penulis menempuh studi di Universitas Diponegoro Semarang khususnya dalam penyelesaian tesis ini.

Akhirnya penulis hanya bisa berharap mudah-mudahan tesis ini dapat dimanfaatkan oleh berbagai pihak yang berkepentingan guna pengembangan ilmu. Segala kritik dan saran akan penulis terima dengan lapang dada karena bagaimanapun juga tesis ini masih banyak segala kekurangannya

Semarang, Oktober 2002

Penulis

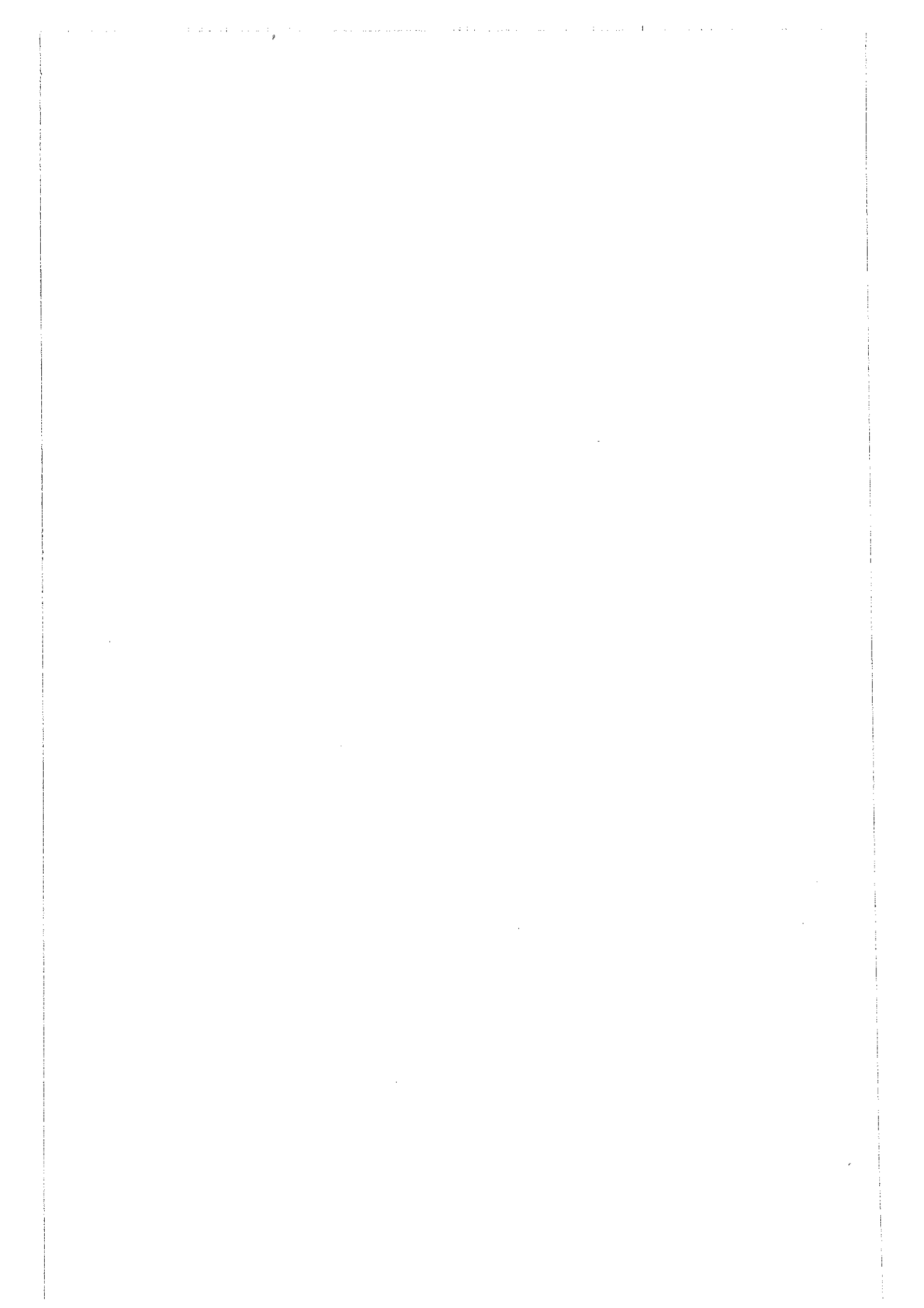
Nurkholes

Main body of the document containing the primary text.

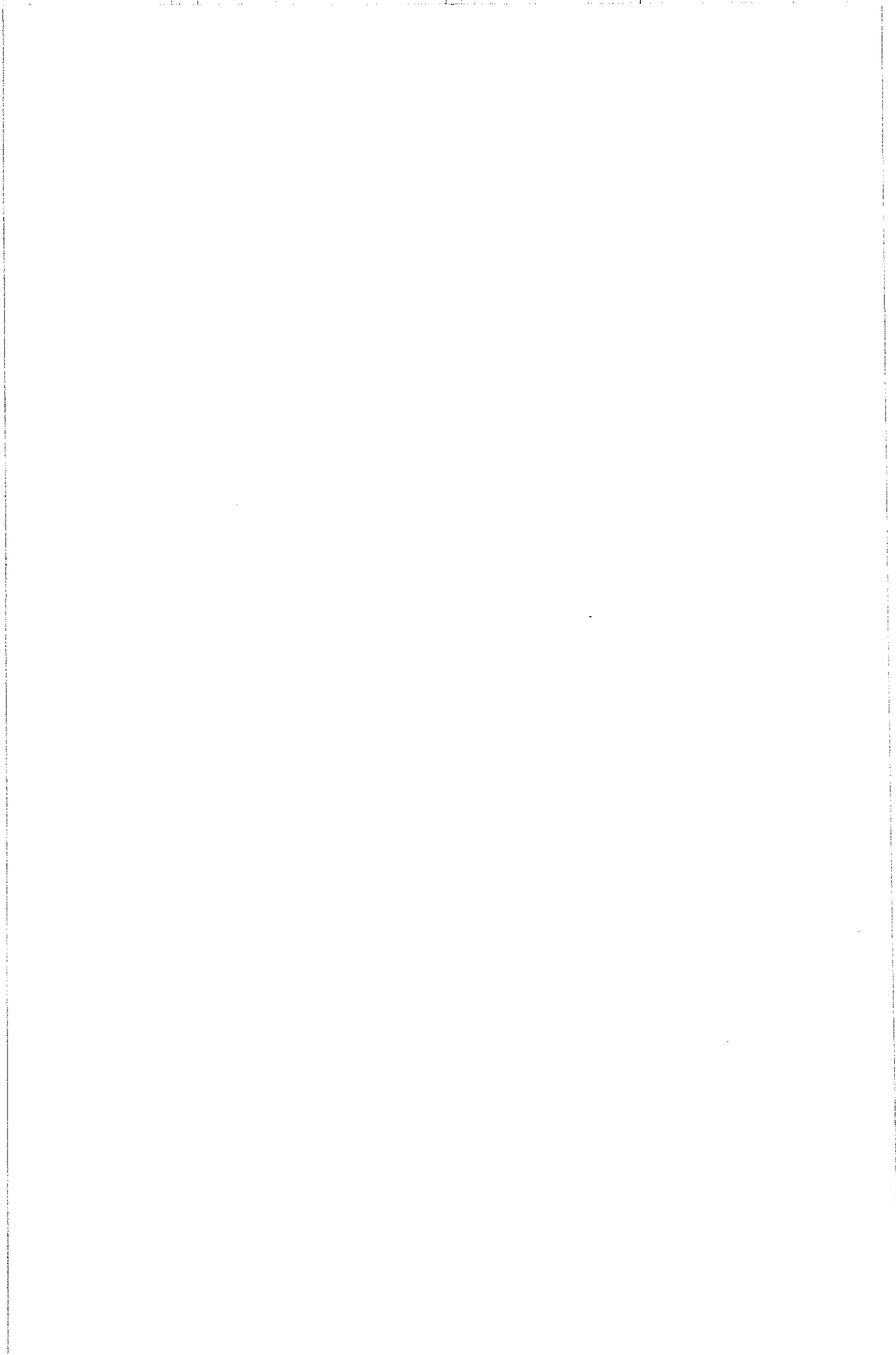
Right margin text or notes.

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
RINGKASAN	iii
ABSTRAKSI	iv
ABSTRACT	vi
HALAMAN PERNYATAAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR TABEL	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi dan Perumusan Masalah	
1. Identifikasi Masalah	13
2. Perumusan Masalah	14
C. Tujuan Penelitian	
1. Tujuan Teoritis	14
2. Tujuan Praktis	15
D. Kegunaan Penelitian	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Landasan Teori	17
1. Keberhasilan Program Pengembangan Kecamatan (PPK)	26
2. Partisipasi Masyarakat	30
3. Kemampuan Organisasi Pelaksana	33
4. Komunikasi Program	35
5. Hubungan Partisipasi Masyarakat dengan Keberhasilan Program Pengembangan Kecamatan (PPK)	38



6. Hubungan Kemampuan Organisasi Pelaksana dengan Keberhasilan Program Pengembangan Kecamatan (PPK)	40
7. Hubungan Komunikasi dengan Keberhasilan Program Pengembangan Kecamatan (PPK)	42
8. Hubungan Partisipasi Masyarakat, Kemampuan Organisasi Pelaksana dan Komunikasi dengan Keberhasilan Program Pengembangan Kecamatan (PPK).	45
<b>B. Hipotesis</b>	
1. Hipotesis Verbal	50
2. Hipotesis Geometri	51
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Rancangan Penelitian	52
B. Ruang Lingkup Penelitian	52
C. Lokasi Penelitian	53
D. Variabel Penelitian	54
1. Klasifikasi Variabel	54
2. Definisi Konseptual	54
3. Definisi Operasional	55
E. Jenis dan Sumber Data	57
F. Instrumen Penelitian	58
G. Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel	58
H. Teknik Pengumpulan Data	60
I. Teknik Analisa Data	61
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN</b>	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	65
B. Hasil dan Pembahasan Penelitian	70
C. Analisa Hasil Penelitian	
1. Uji Normalitas	105



2. Uji Validitas dan Reliabilitas	106
<b>D. Hubungan Antara Variabel Penelitian</b>	
1. Hubungan Antara Indikator Partisipasi Masyarakat dengan Keberhasilan Program Pengembangan Kecamatan (PPK)	107
2. Hubungan Antara Variabel Partisipasi Masyarakat dengan Keberhasilan Program Pengembangan Kecamatan (PPK)	107
3. Hubungan Antara Indikator Kemampuan Organisasi Pelaksana dengan Keberhasilan Program Pengembangan Kecamatan (PPK)	111
4. Hubungan Antara Variabel Kemampuan Organisasi Pelaksana dengan Keberhasilan Program Pengembangan Kecamatan (PPK)	112
5. Hubungan Antara Indikator Komunikasi dengan Keberhasilan Program Pengembangan Kecamatan (PPK)	115
6. Hubungan Antara Variabel Komunikasi dengan Keberhasilan Program Pengembangan Kecamatan (PPK)	116
7. Hubungan Partisipasi Masyarakat, Kemampuan Organisasi Pelaksana dan Komunikasi dengan Keberhasilan Program Pengembangan Kecamatan (PPK).	118
8. Diskusi	119
<b>BAB V. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI</b>	
A. Kesimpulan	122
B. Rekomendasi	126

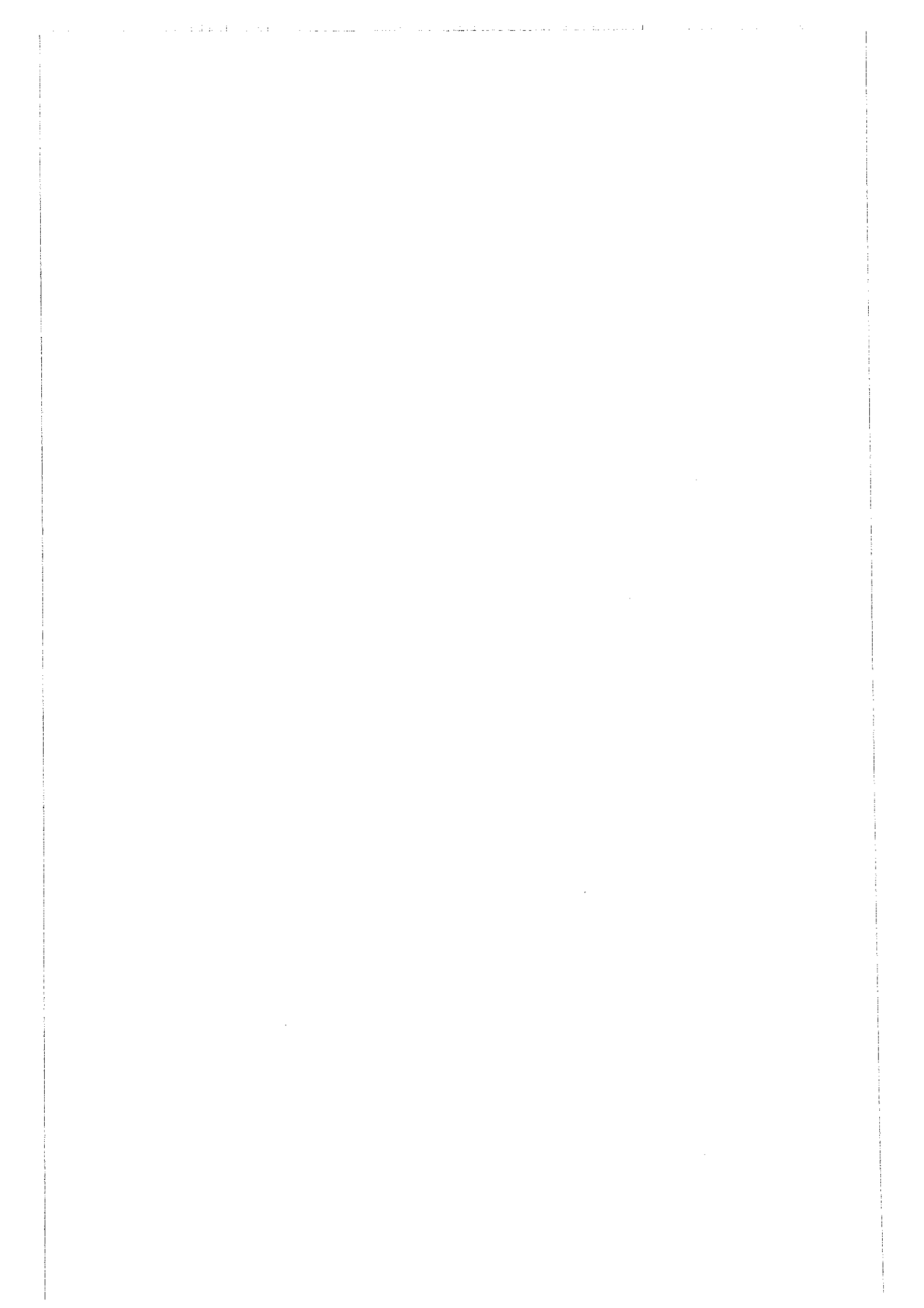
**DAFTAR PUSTAKA**  
**LAMPIRAN**

Kuisisioner Studi Keberhasilan Program Pengembangan Kecamatan (PPK) di Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan.



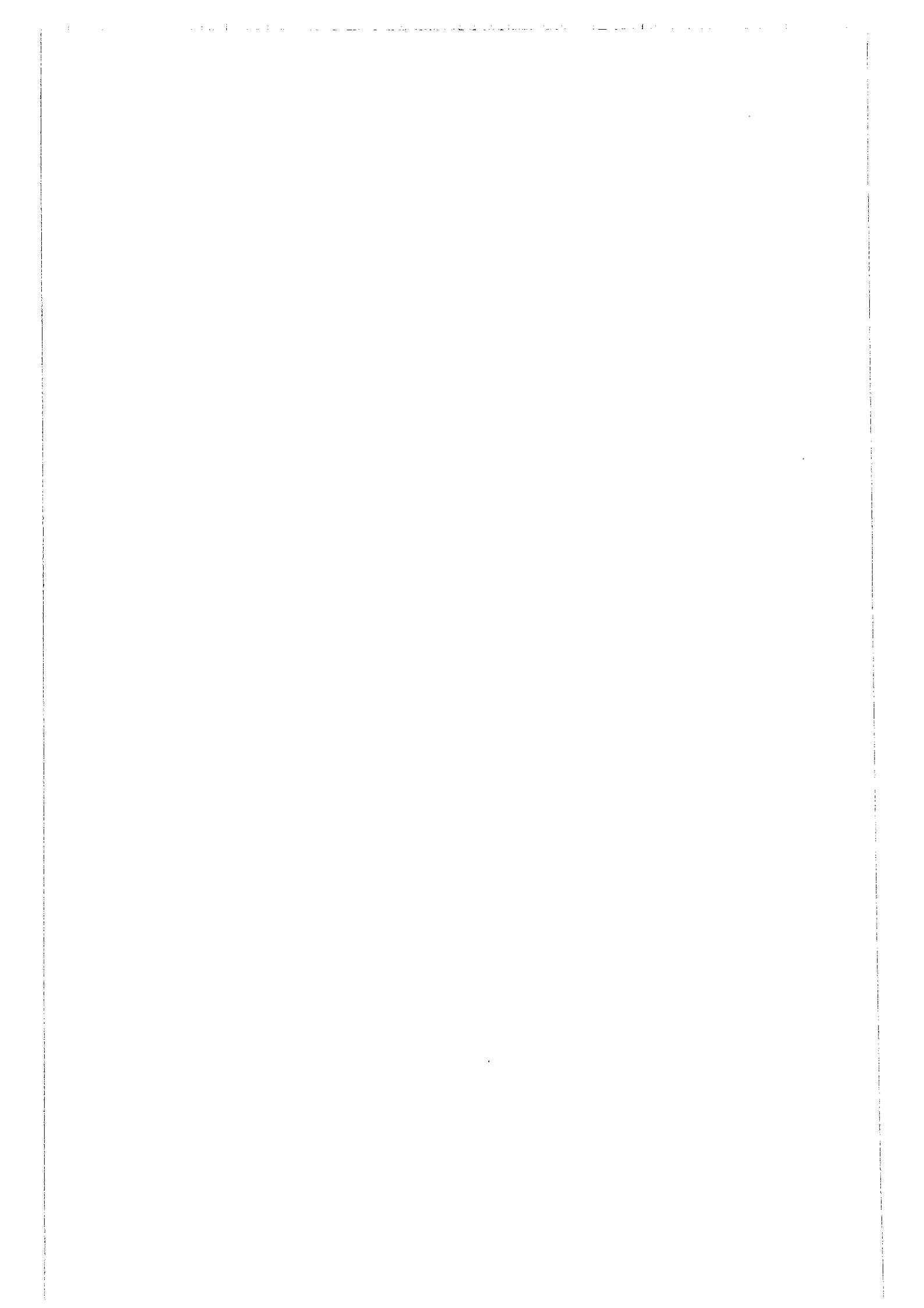
## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1 Model Kesesuaian Program (David Korten)	21
Gambar 2 Bangun Teori Studi Keberhasilan Program Pengembangan Kecamatan (PPK)	49
Gambar 3 Struktur Tim Koordinasi Pelaksana Desa	68

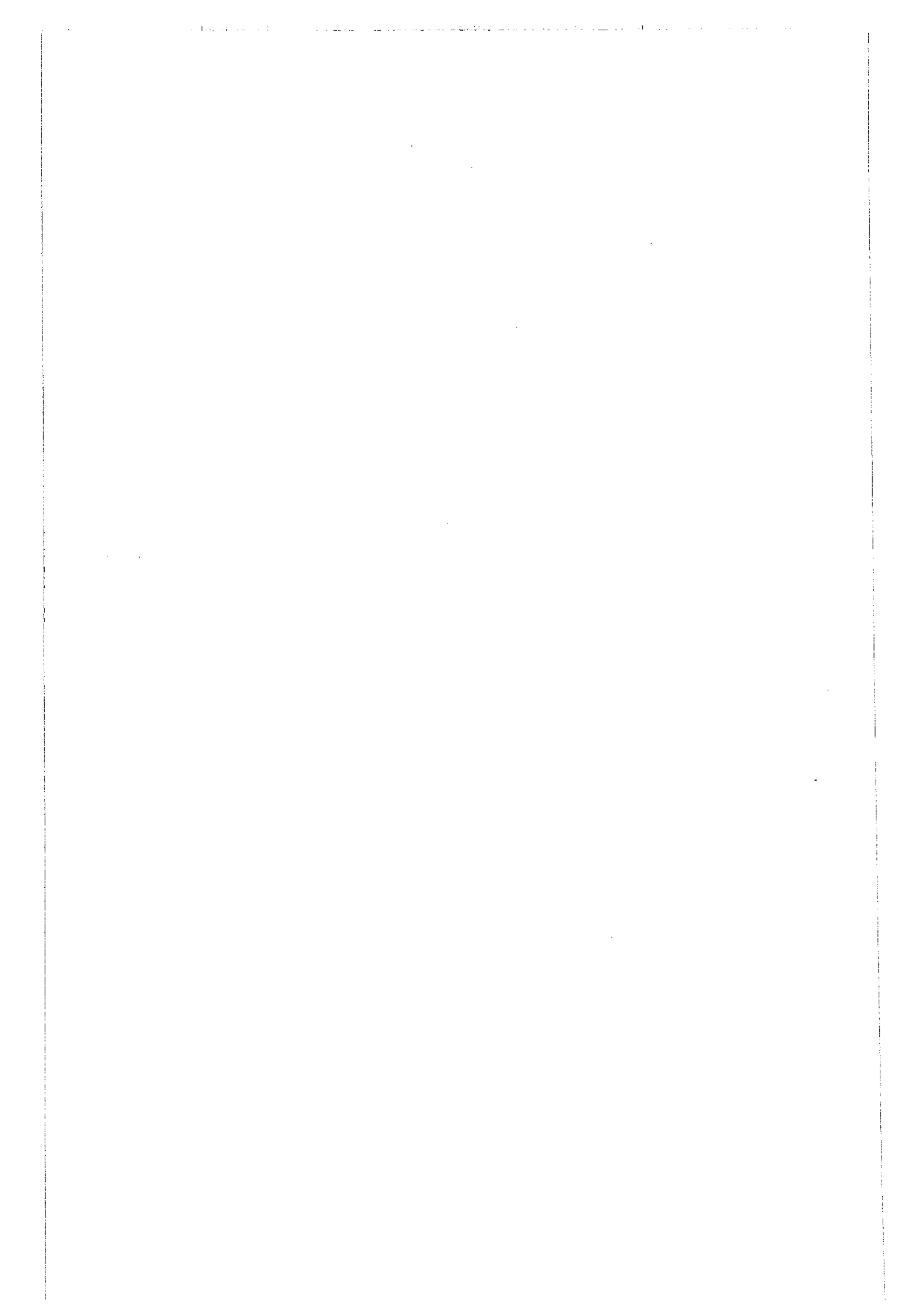


## DAFTAR TABEL

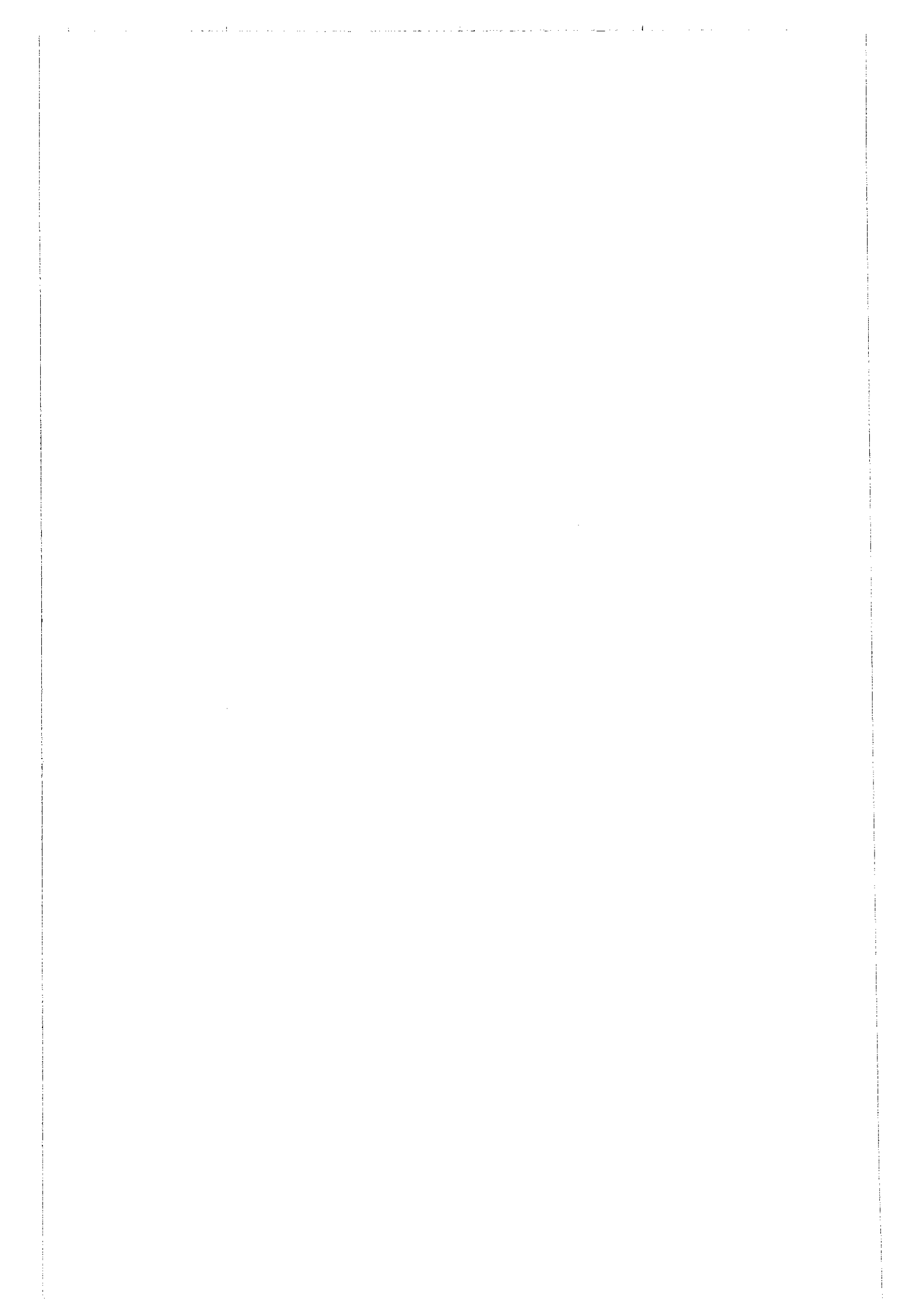
	Halaman
Tabel . III. 1 Penetapan Sampel Penelitian PPK di Kecamatan Gubug	7
Tabel IV. 1 Kondisi Penduduk Kecamatan Gubug Th 2001	66
Tabel IV.2 Tingkat Pendidikan Organisasi LKMDTim Pelaksana Kegiatan Desa (TPKD) di Kecamatan Gubug	67
Tabel IV.3 Pengaruh PPK terhadap Perkembangan jenis usaha	71
Tabel IV 4 Pengaruh PPK terhadap perkembangan ekonomi desa	72
Tabel IV 5 Pengaruh Pengetahuan Kelompok Sasran terhadap PPK	73
Tabel IV.6 Pengaruh PPK terhadap Kualitas Pembangunan Sarana Prasarana Ekonomi Desa	74
Tabel IV. 7 Pengaruh PPK dengan Kegiatan Perkembangan Ekonomi Desa	74
Tabel IV. 8. Pengaruh PPK terhadap Peningkatan Pendapatan Kelompok Sasaran.	75
Tabel IV. 9 Pengaruh PPK terhadap Peningkatan Pendapatan Masyarakat Diluar Kelompok Sasaran.	76
Tabel IV. 10 Tingkat Pengembalian Modal Usaha oleh Kelompok Sasaran	77
Tabel IV. 11 Tingkat Kedisiplinan Pengembalian Modal Usaha	78
Tabel IV. 12 Tingkat Laporan Pertanggungjawaban Kegiatan PPK oleh Kelompok Sasaran	79
Tabel IV. 13 Tingkat Kesesuaian Hasil Musyawarah Terhadap Kebutuhan	80
Tabel IV. 14 Pengaruh Manfaat Hasil Pembangunan Sarana Prasarana PPK Terhadap Peningkatan Pendapatan Masyarakat	81
Tabel IV. 15 Tingkat Pelestarian Kegiatan PPK	82
Tabel IV. 16 Tingkat Penerimaan Program PPK	83
Tabel IV 17 Tingkat Frekwensi Peserta Diskusi dalam PPK	84



Tabel IV.18	Aktivitas Kelompok Sasaran dalam Diskusi/Pertemuan Rutin	85
Tabel IV.19	Peranan Kelompok Sasaran dalam Diskusi UDKP	86
Tabel IV.20	Tingkat Kegotongroyongan dalam Pelaksanaan PPK	87
Tabel IV.21	Tingkat Kerelaan Sumbangan Masyarakat	88
Tabel IV.22	Tingkat Perguliran Dana Bantuan oleh Kelompok Sasaran	89
Tabel IV.23	Tingkat Pemeliharaan Hasil Kegiatan PPK	90
Tabel IV.24	Pemahaman Fasilitator Terhadap Tugas Pendampingan	91
Tabel IV.25	Kesesuaian Kebutuhan Fasilitator dalam Pendampingan terhadap Kelompok Sasaran	92
Tabel IV.26	Tingkat Kemampuan Fasilitator	93
Tabel IV.27	Peran Fasilitator Dalam Mendukung Kelompok Sasaran	94
Tabel IV.28	Peran Organisasi Pelaksana Dalam Menggali Dukungan Masyarakat	95
Tabel IV.29	Tingkat Kesesuaian Pembentukan Kelompok Sasaran	96
Tabel IV.30	Kemampuan Anggota Kelompok Sasaran dalam Aktivitas Kegiatan	97
Tabel IV.31	Kemampuan Pengembangan PPK oleh Kelompok Sasaran	98
Tabel IV.32	Keuletan Kelompok Sasaran dalam Melaksanakan PPK	99
Tabel IV.33	Kelengkapan Informasi PPK	100
Tabel IV.34	Kejelasan Informasi Melalui Media Elektronika	101
Tabel IV.35	Kejelasan Informasi Melalui Media Cetak	102
Tabel IV.36	Pemahaman Informasi Langsung Masyarakat dengan OrganisasiPelaksana	103
Tabel IV.37	Tingkat Pemahaman Informasi Langsung antara Fasilitator dan Kelompok Sasaran	104



Tabel IV.38.	Uji Normalitas data Penelitian	105
Tebel IV.39	Hubungan antara Indikator Perkembangan jenis usaha dengan Tingkat frekuensi kehadiran dalam rapat/diskusi	108
Tabel IV.40	Hubungan Antara Variabel Keberhasilan PPK dengan Partisipasi	109
Tabel IV 41	Uji Rank Kendall Correlations.	110
Tabel IV. 42	Hubungan antara Indikator Perkembangan Jenis Usaha dengan Tingkat Pemahaman Fasilitator	112
Tabel IV.43	Hubungan Antara Variabel Keberhasilan Program PPK dengan Kemampuan Organisasi	113
Tabel IV 44	Uji Rank Kendall Correlations	.114
Tabel IV. 45	Hubungan Antara Indikator Perkembangan jenis usaha dengan Kelengkapan informasi PPK	116
Tabel IV.46	Hubungan Antara Variabel Keberhasilan Program Dengan Komunikasi Program	117
Tabel IV 47	Uji Rank Kendall Correlations	118
Tabel IV. 48	Uji Konkordansi / Kendall's W Test	119



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Krisis ekonomi 1997 yang melanda Asia Tenggara dan khususnya di Indonesia telah memporak-porandakan segi ekonomi, politik dan sosial. Dampak nyata terlihat adalah masalah kemiskinan dimana sebelum adanya krisis selama kurun waktu tahun 1976 – 1996 angka kemiskinan telah berhasil diturunkan dari sekitar 40 % s.d sekitar 11 %. Akibat dari dampak krisis 1997 menurut BPS pada akhir 1999 jumlah penduduk miskin meningkat menjadi 47,9 juta jiwa (23,4 %) yang menganggur di perkotaan 15,6 juta di perkotaan dan 32,3 juta (67 %) di pedesaan.

Ironisnya hasil evaluasi Bank Dunia 1990 menegaskan bahwa kemiskinan absolut di Indonesia masih cukup banyak dan di Indonesia masih tertinggal dalam pemerataan ekonomi dengan negara tetangga di Asia Tenggara. Pertumbuhan ekonomi yang menakjubkan yang selama ini telah dicapai  $\pm 7\%$  lebih banyak dinikmati oleh lapisan atas. Hal ini dibuktikan dengan angka koefisien gini sebesar 0,4 lebih lanjut disebutkan kemiskinan dan ketidakberdayaan adalah dua hal yang saling kait mengkait yang satu dapat mengakibatkan yang lain atau sebaliknya sehingga cara menanggulangnya juga harus komprehensif dan multi dimensional. Kemiskinan yang merupakan persoalan multi dimensional tidak saja melibatkan faktor ekonomi, sosial, budaya dan politik (Heru Nugraha, 2001:186- 200).

Sependapat pandangan tersebut adalah seperti apa yang dikemukakan oleh Chambers dalam Lukman Sutrisno (1997:18) menyatakan bahwa kemiskinan yang terjadi di negara berkembang seperti di Indonesia menurutnya terdapat 5 (lima) ketidakberuntungan (disadvantages) yaitu (1) Kemiskinan (poverty), (2) Fisik yang lemah (physical weakness), (3) Kerentanan (vulnerability), (4) Keterisolasian (isolation) dan (5) Ketidakberdayaan.

Membicarakan masalah kemiskinan dalam dunia akademis ada dua istilah yang dikenal yaitu kemiskinan absolut yang menitikberatkan pada tingkat pendapatan terhadap pemahaman kecukupan kebutuhan pokok pangan, papan, sandang, kesehatan dan pendidikan. Dan kemiskinan relatif yang melihat pada perhitungan proporsi distribusi pendapatan dalam suatu daerah dikatakan relatif karena berkaitan dengan distribusi pendapatan antar lapisan. Kemudian bagaimana mengukur keberhasilan pembangunan pengentasan kemiskinan disini masih menjadi perdebatan panjang yang masing-masing mengemukakan pendapatnya masing-masing.

Pengukuran kemiskinan absolut juga masih dalam perdebatan Bank Dunia menetapkan bahwa garis kemiskinan adalah US \$ 50 dan US \$ 75 perkapita pertahun. Menurut *Prof Sayogyo* bahwa kemiskinan dapat diukur atas kebutuhan beras dan gizi golongan paling miskin yang mempunyai pendapatan perkapita pertahun beras sebanyak 240 kg atau kurang, golongan miskin sekali yang memiliki pendapatan perkapita pertahun beras sebanyak 240-360 kg dan lapisan miskin yang memiliki pendapatan beras perkapita pertahun lebih dari 360 kg tetapi kurang dari 1180 kg. Alternatif pengukuran lain adalah dari Biro Pusat

Statistik dengan cara penentuan berdasarkan kepada kalori minimum yang harus dipenuhi oleh setiap orang dalam sehari-hari dan kebutuhan non pangan seperti perumahan, sandang dan bahan-bakar, penerangan, jenis barang tahan lama serta jasa-jasa, kemudian kriteria itu diputuskan dalam rupiah.

Melihat permasalahan upaya pembangunan dalam mengatasi kemiskinan merupakan hal yang tidak mudah dalam menanggulangnya. Upaya pengentasan kemiskinan telah ditempuh dengan berbagai program pembangunan tetapi hasilnya belum menampakkan hasil yang nyata, masyarakat dijadikan sebagai obyek pembangunan yang hasilnya kemudian hanya dinikmati kelompok strategis saja sedang masyarakat miskin menjadi semakin tak berdaya. Secara nyata dapat dilihat bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi hanya disangga oleh kelompok strategis yang akhirnya tidak tahan atau tidak berdaya karena guncangan krisis ekonomi, karena pertumbuhan ini tidak berakar dari rakyat.

Kondisi kemiskinan di Kabupaten Grobogan berdasarkan data statistik tahun 1993 jumlah penduduk miskin di Kabupaten Grobogan hanya 40.531 kk. Kemudian kondisi pada Tahun 1998 survey yang dilakukan oleh LSM "Yayasan Masyarakat Peduli" dalam rangka kerjasama segitiga RI-UNDP-UNICEF di Kabupaten Grobogan, diperoleh data penduduk miskin di Kabupaten Grobogan sebesar 242.066 kk atau meningkat kurang lebih 497,24% dari tahun 1993.

Kemudian berdasarkan hasil pendataan oleh Bappeda Kabupaten Grobogan bekerja sama dengan BPS pada tahun 2001 dengan mengembangkan pengukuran dari indikator yang ditetapkan BPS dan BKKBN dengan indikator lain yang cukup signifikan, perhitungan tahun 2001 angka kemiskinan didapatkan

455.232 (34,05%) penduduk miskin angka ini lebih baik dari tahun 2000 yang berjumlah 536.355 orang (42,64%) terjadi penurunan sebesar 28,08 %.

Dengan melihat perkembangan penduduk miskin di Kabupaten Grobogan dalam 10 tahun terakhir (1993-2001) maka nampak jelas ada fluktuasi, terjadi terbesar pada tahun 1998 yang diakibatkan karena dampak krisis ekonomi, kemudian pada tahun 2001 mengalami penurunan angka kemiskinan. Apabila kita hubungkan kembali dengan upaya program pengentasan kemiskinan seperti program penyelamatan jaring pengaman sosial (JPS) dan program pengembangan kecamatan (PPK) sejak tahun 1998 sampai dengan sekarang, maka kondisi saat ini bisa dikatakan telah pulih dan berada pada tahap penguatan ekonomi masyarakat.

Kesenjangan dan ketidakberdayaan masyarakat perlu dilihat sebagai hal utama dengan menempatkan masyarakat sebagai subyek. Sehingga di sini kemandirian menjadi sangat penting dan ukuran kemandirian suatu bangsa tidak dapat hanya berupa pendapatan perkapita atau besar kecilnya utang tetapi lebih mendasar lagi menyangkut manusianya baik itu kualitas maupun kesejahteraan lahir batinnya. Untuk menterjemahkan strategi tersebut di atas diperlukan program-program penanggulangan kemiskinan dengan pendekatan yang benar-benar menggambarkan prinsip dari oleh dan untuk masyarakat dengan prinsip-prinsip Pemihakan kepada kelompok masyarakat miskin dan marjinal, Otonomi dan desentralisasi, Partisipatis, Kemandirian dan keterpaduan (**Ginjar Kartasamita, 196:63**).

Salah satu masalah utama daerah dalam pembangunan adalah masalah kemiskinan, dimana dalam mengatasi persoalan yang kompleks ini, daerah

dihadapkan pada persoalan ketidakberdayaan pembiayaan, SDM dan masyarakat itu sendiri. Sehingga dalam masalah ini sangat bergantung sekali pada kebijakan pemerintah pusat. Berbagai program pengentasan kemiskinan telah dilaksanakan, seperti inpres IDT, PPWKT dan PDMDKE. Kemudian apabila kita hubungkan dengan tingkat keberhasilan program hasilnya tidak mampu bertahan dan mampu mengatasi kemiskinan secara signifikan. Tetapi setelah era reformasi dan krisis kemudian pemerintah pada tahun 1998 melaksanakan program pengembangan kecamatan (PPK) termasuk yang dilaksanakan di Kabupaten Grobogan.

Pembangunan PPK adalah Program Pengembangan Kecamatan yang berupa kegiatan ekonomi produktif dan pengembangan kelembagaan institusi desa dalam pengelolaan pembangunan sebagai upaya pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan. Program bersifat *bottom up* dimana pemerintah hanya sebagai pemberi bantuan dan peran fasilitasi saja sedangkan pengelolaan diserahkan sepenuhnya pada masyarakat sehingga dalam program ini ada perubahan dari model *top down* menjadi *bottom up*.

Upaya pengentasan kemiskinan melalui pembangunan PPK merupakan jawaban atas pengembangan pembangunan dengan dimensi ekonomi sekaligus sosial budaya dan politik, sehingga diharapkan mampu mengatasi masalah kesenjangan dan ketidakberdayaan. Pendekatan pembangunan PPK ini memperlihatkan penggeseran cara pandang pemerintah terhadap kemiskinan. Pergeseran ini sejalan dengan arus pemikiran global yang meletakkan perluasan kesempatan, pemberdayaan masyarakat dan perlindungan sosial sebagai tiga pilar

yang harus dijalankan. Strategi penanggulangan kemiskinan harus mendorong partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan, serta memberi kepercayaan agar bisa terlepas dari jeratan kemiskinan. (Dedi M. Masybun Riyadi, Makalah Work Shop PPK di Jakarta Maret 2002).

Prinsip-prinsip pembangunan PPK bertumpu pada kelompok miskin yang berpotensi untuk mengubah status kelompok miskin dari beban menjadi potensi untuk menggerakkan pertumbuhan yang berbasis pada usaha kecil ekonomi produktif dan sarana prasarana pendukung sesuai dengan standar dan tujuan kebijakan program dengan prinsip demokratisasi, *capacity building*, mendorong inisiatif lokal penguatan kelembagaan formal & informal lokal dan penyediaan insentif ekonomi. Melalui program PPK sesuai tujuan dan sasaran diharapkan mampu menjadi penyangga ekonomi kerakyatan yang mampu bertahan terhadap gonjangan krisis ekonomi, keuntungan lain adalah mengurangi kecemburuan, kesenjangan dan ketidakberdayaan masyarakat miskin.

Pelaksanaan program PPK adalah bantuan yang bersifat *block grand* yang kewenangan pengelolaan diserahkan sepenuhnya pada kemampuan masyarakat dan dengan usaha peningkatan kemampuan kelembagaan dan masyarakat untuk pengembangan kegiatan usaha ekonomi produktif. Sedangkan tujuan khususnya dapat kami sampaikan seperti dalam Pedoman Pelaksanaan PPK Tahun 2001 Depdagri, yaitu :

1. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dari perencanaan, pelaksanaan dan pelestarian kegiatan ekonomi masyarakat di pedesaan.

2. Meningkatkan kegiatan ekonomi pedesaan melalui kegiatan usaha, memperluas kesempatan kerja dan sumber pendapatan bagi masyarakat pedesaan.
3. Menyediakan saran dan prasarana bagi pengembangan kegiatan ekonomi pedesaan.
4. Meningkatkan kemampuan lembaga masyarakat dan aparat pemerintah untuk memfasilitasi proses pemberdayaan dalam pelaksanaan program pembangunan.

Selanjutnya dalam pelaksanaan PPK di Kabupaten Grobogan dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel I. 1  
Kegiatan Yang di Danai PPK berdasarkan UDKP II  
Di Kabupaten Grobogan.

No	Kecamatan	Sarana Prasarana	(%)	Ekonomi Produktif	(%)	Total	Th ke
1	Kedungjati	450.000.000	90	50.000.000	10	500.000.000	I
2	Penawangan	601.090.000	80	148.910.000	20	750.000.000	I
3	Kradenan	615.000.000	82	135.000.000	16	750.000.000	I
4	Gabus	633.615.000	84	116.385.000	15	750.000.000	I
5	Gubug	624.000.000	83	126.000.000	17	750.000.000	I
1	Kedungjati	280.865.360	37	469.134.370	63	749.999.730	II
2	Penawangan	711.050.000	71	288.950.000	29	1.000.000.000	II
3	Kradenan	480.590.000	48	519.410.000	52	1.000.000.000	II
4	Gabus	355.132.500	35	644.367.500	65	1.000.000.000	II
5	Gubug	128.837.000	13	871.163.000	87	1.000.000.000	II
6	Pulokulon	397.422.000	40	602.578.000	60	1.000.000.000	II
7	Toroh	471.809.000	47	528.191.000	53	1.000.000.000	II
	Jumlah	5.748.410.360	56	4.501.589.370	44	10.249.999.730	

Sumber : Laporan PPK Kab. Grobogan, 2000.

Dari data tersebut didapatkan gambaran bahwa pengelolaan pembangunan PPK di Kabupaten Grobogan, yang telah diberikan kewenangan sepenuhnya kepada masyarakat, kegiatan yang ditetapkan dalam musbangdes dan UDKP antara kegiatan ekonomi produktif sangat bervariasi. Alasan yang

didapatkan apabila kegiatan pembangunan fisik lebih mudah pengelolaannya, sedangkan kegiatan ekonomi produktif sulit dalam pengelolaannya, hal ini sangat dipengaruhi tingkat kemampuan LKMD dan masyarakat dalam menentukan kebutuhannya dalam perencanaan. Apabila kita kita hubungkan dengan tujuan dan sasaran program maka yang lebih ideal dan bagus dalam menunjang keberhasilan program apabila bantuan itu diperuntukan sebagian besar bagi kegiatan ekonomi produktif seperti simpan pinjam atau usaha kecil keluarga sedangkan pembangunan fisik adalah penunjang kegiatan ekonomi didesa seperti jalan dan pasar desa.

Salah satu tujuan pembangunan PPK selain kemanfaatan peningkatan pendapatan juga pada aspek sosial bagaimana dampak program bisa memberikan perubahan cara pandang masyarakat terhadap program, dan bagaimana peningkatan kemampuan institusi desa seperti LKMD, TPKD atau fasilitator desa serta keterlibatan masyarakat dalam pembangunan sehingga mereka merasa memiliki dan memelihara program untuk keberlangsungan kegiatan, selanjutnya hal ini bisa dijadikan indikator dalam mengukur keberhasilan program.

Terkait erat dengan tujuan program pelaksanaan pembangunan PPK di Kabupaten Grobogan nampak ada permasalahan, dilihat dari kesenjangan yang terjadi dalam pelaksanaan PPK. Dengan melihat kesepakatan hasil UDKP seperti tersebut dalam tabel I.1 diatas terlihat secara umum bahwa penggunaan dana bantuan lebih besar dipergunakan untuk kegiatan pembangunan fisik (56%) hal ini lebih diutamakan kepada tingkat kemudahan dalam pelaksanaan sedangkan kegiatan ekonomi produktif (44 % ) sangat sulit dalam pelaksanaan dan sering

menimbulkan konflik. Disini nampak bahwa dalam perencanaan kegiatan mereka belum bisa memahami secara penuh dari tujuan program, penerimaan program didasarkan pada tanggapan masyarakat bahwa mereka memang layak mendapatkan bantuan belum kepada pemahaman bahwa penyerahan kewenangan adalah dalam rangka meningkat kemampuan masyarakat sendiri. Pertanyaan bagaimana tingkat kebutuhan dalam perencanaan terhadap kesesuaian kebutuhan masyarakat sulit sekali dikembangkan hal ini terbukti dari tingkat partisipasi masyarakat dalam musbangdes yang oleh program diberikan kebebasan kepada masyarakat di desa tanpa batas siapapun boleh mengikuti, tetapi pada kenyataannya dilihat dari daftar hadir peserta rata-rata yang hadir tidak lebih dari 30 orang. Dan pertemuan tersebutpun tingkat keaktifan mereka sangat rendah forum hanya didominasi pada orang-orang tertentu, dalam pengambilan keputusan dan pemahaman dari merekapun sangat rendah karena dipengaruhi oleh tingkat pendidikan mereka.

Lebih ironis lagi apabila dana bantuan itu dipergunakan untuk kegiatan ekonomi produktif seperti simpan pinjam, pemahaman masyarakat sangat rendah terhadap tujuan program. Terlihat dalam pemanfaatan dan pengembangan dana bantuan yang salah sasaran, dimana seharusnya dipergunakan untuk jenis usaha ekonomi produktif seperti usaha keluarga yang bisa menambah penghasilan diluar pekerjaan rutin sehari-hari sebagai petani atau buruh tani, atau mereka yang sudah mempunyai usaha ekonomi keluarga tetapi mereka tidak tahu bagaimana mengembangkannya. Sehingga ditingkat pelaksanaan banyak sekali mengalami hambatan apalagi terhadap pengembangan kegiatan, kondisi ini juga didukung

terhadap kelemahan dalam perencanaan dimana dana bantuan lebih diupayakan pada pemerataan tanpa melihat kepada kebutuhan terbukti dari jumlah kelompok dan anggota yang sangat besar sekali sehingga tiap orang hanya mendapat dana bantuan yang sangat terbatas rata-rata Rp. 300.000,00 dengan dana yang relatif kecil tersebut sulit sekali untuk dimanfaatkan sebagai modal usaha secara efektif. Hambatan lain muncul dalam pengembalian dana bantuan dengan alasan dana tersebut belum bisa dikembalikan sesuai waktu, karena mengalami kegagalan dalam pemanfaatan.

Pembentukan kelompok sasaran dan jenis kegiatan usaha ekonomi produktif sangat didominasi oleh kelompok tertentu, yang lebih pada arah pemerataan saja tidak melihat pada urgensinya pemanfaatan dana bantuan. Kelompok banyak didominasi pada kelompok pengajian, arisan dan PKK pada dasarnya pembentukan kelompok ini tidak bermasalah yang bermasalah adalah dalam pelaksanaannya yang kurang tepat sasaran. Selanjutnya bagaimana peran kelembagaan desa dalam memberikan fasilitasnya dalam proses perencanaan maupun pelaksanaan kegiatan. Tingkat pemahaman mereka disinipun masih rendah walaupun sebelumnya mereka telah diberikan pendidikan dan pelatihan permasalahan kembali pada tingkat pendidikan yang rendah, sehingga ditingkat implementasi menjadi terhambat. Kelembagaan desa seperti aparat desa terutama kepala desa yang notabene dianggap mempunyai kemampuan ketrampilan yang kurang peduli karena keterbatasan kewenangan bagi mereka.

Ditingkat implementasi program dukungan masyarakat diluar penduduk miskin yang dianggap lebih mampu dari mereka kurang peduli, bahkan cukup

apatis terhadap keberhasilan program. Dalam beberapa persoalan tersebut faktor pengaruh lain yang cukup dominan adalah tersumbatnya informasi artinya informasi tidak bisa diterima oleh masyarakat secara penuh dalam arti kuantitas dan kualitas informasi. Maksud dan tujuan program sulit sekali mereka terima dan pahami baik oleh kelembagaan yang ada didesa maupun oleh masyarakat, seharusnya kita tidak bisa menyalahkan kondisi rendahnya pendidikan semata tetapi bagaimana mengatasi permasalahan tersebut secara efektif. Permasalahan yang sebenarnya adalah kurangnya komunikasi program dimana pesan dari program kurang optimal sampai kepada masyarakat dan kelembagaan desa begitupula sebaliknya.

Melihat fenomena yang ada dalam pelaksanaan pembangunan PPK di Kabupaten Grobogan timbul pertanyaan apakah dengan kondisi seperti itu program dapat berjalan diterima dan dipahami masyarakat, apakah dana bantuan dapat memberikan kemanfaatan serta dampak langsung bagi pendapatan dan perkembangan kegiatan ekonomi di desa sesuai dengan tujuan dan sasaran dan meningkatkan kemampuan pengelolaan pembangunan.

Pelaksanaan pembangunan PPK di Kabupaten Grobogan yang berjalan sudah tiga tahun lebih ini, tentunya tidak adil apabila kita simpulkan bahwa pelaksanaan program telah berhasil atau tidak berhasil tanpa melakukan kajian dan penelitian terlebih dahulu sebagai bahan evaluasi. Dengan latar belakang tersebut maka sangatlah tepat apabila dilakukan evaluasi keberhasilan pembangunan PPK di Kabupaten Grobogan sehingga bisa didapatkan gambaran permasalahan yang nyata terjadi. Dalam studi keberhasilan PPK tentunya perlu

didasarkan pada kajian teoritis disamping tataran empiris untuk mendapatkan hasil yang akuntabel, sebagai bahan evaluasi program dalam menemukan permasalahan yang mendasar dan spesifik lokal yang bisa bermanfaat bagi daerah di Kabupaten Grobogan.

Selanjutnya untuk maksud tersebut agar lebih fokus penelitian kepada hal yang bersifat spesifik kita akan belajar dari satu kasus pelaksanaan program di satu kecamatan di Kabupaten Grobogan. Pemilihan lokasi kecamatan atas dasar pertimbangan perkembangan kemiskinan di Kabupaten Grobogan tahun 2001 pada kecamatan penerima PPK, dimana perkembangan pengentasan kemiskinan terbaik ada di Kecamatan Gubug yang berpenduduk miskin hanya 28,07 % (Bappeda Kab. Grobogan, 2001:20). Berdasarkan data tabel I.1 yang nampak terjadi perubahan pemanfaatan penggunaan dana bantuan ekonomi produktif tahap I hanya 17 % kemudian untuk tahap kedua berubah tajam menjadi 87 %. Kemudian untuk pembangunan fisik tahap I 83 % karena sarana prasarana sudah cukup lengkap berubah pada tahap II hanya 13 % saja.

Maksud studi keberhasilan program ini juga lebih terarah pada pelaksanaan program di tingkat dasar sesuai tujuan dan sasaran program yaitu bagaimana masyarakat desa mampu mengelola bantuan program secara mandiri, sesuai dengan standar tujuan pembangunan PPK.

Atas dasar realitika pelaksanaan pembangunan PPK di Kabupaten Grobogan dengan latar belakang seperti terurai diatas maka penulis akan mengambil judul penelitian sebagai berikut :

**“ Studi Keberhasilan Program Pengembangan Kecamatan (PPK) di Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan ”.**

**B. Identifikasi dan Perumusan Masalah**

**1. Identifikasi Masalah**

Melihat persoalan pada dinamika pelaksanaan pembangunan PPK di Kabupaten Grobogan, khususnya di Kecamatan Gubug berdasarkan hasil laporan pelaksanaan PPK dan interview dapat kami identifikasikan masalah sebagai berikut :

- a. Rendahnya dukungan masyarakat diluar kelompok sasaran terutama bagi mereka yang tergolong mampu secara materi dan SDM.
- b. Rendahnya tingkat pemahaman program oleh masyarakat dan kelembagaan desa terhadap prinsip-prinsip pembangunan program pengembangan kecamatan (PPK) secara benar sesuai tujuan dan sasaran.
- c. Rendahnya tingkat kemampuan dan ketrampilan anggota kelompok sasaran dalam mengembangkan jenis usaha ekonomi produktif melalui simpan pinjam dan rendahnya kesadaran masyarakat dalam perguliran dana bantuan.
- d. Rendahnya tingkat kemampuan dan ketrampilan pengelolaan PPK pada LKMD, TPKD dan fasilitator desa.
- e. Rendahnya peran dan fungsi kelembagaan dalam memberikan pembinaan dan fasilitasi secara optimal.

- f. Tidak lancarnya penerimaan informasi yang benar terhadap prinsip-prinsip pengelolaan pembangunan PPK disebabkan pada rendahnya tingkat pendidikan.
- g. Kurang efektifnya pemanfaatan forum pertemuan desa secara formal dan informal dalam penyebarluasan informasi.

## 2. Perumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang ada dapat kami rumuskan permasalahan sebagai dasar penelitian sebagai berikut:

- a. Apakah ada hubungan tingkat partisipasi masyarakat terhadap keberhasilan pembangunan PPK di Kecamatan Gubug ?
- b. Apakah ada hubungan kemampuan organisasi pelaksana dengan keberhasilan pembangunan PPK di Kecamatan Gubug ?
- c. Apakah ada hubungan komunikasi program PPK dengan keberhasilan pembangunan PPK di Kecamatan Gubug ?
- d. Apakah ada hubungan antara tingkat partisipasi, kemampuan organisasi pelaksana dan komunikasi program dengan keberhasilan pembangunan PPK di Kecamatan Gubug ?

## C. Tujuan Penelitian

- 1. Tujuan Teoritis.
  - a. Untuk mendapatkan gambaran tingkat hubungan partisipasi masyarakat dengan keberhasilan program PPK di Kecamatan Gubug.
  - b. Untuk mendapatkan gambaran tingkat hubungan kemampuan organisasi pelaksana dengan keberhasilan program PPK di Kecamatan Gubug.

- c. Untuk mendapatkan gambaran tingkat hubungan komunikasi program dengan keberhasilan program PPK di Kecamatan Gubug.
- d. Untuk mendapatkan gambaran tingkat hubungan partisipasi, kemampuan organisasi pelaksana dan komunikasi program dengan keberhasilan program PPK di Kecamatan Gubug.

## 2. Tujuan Praktis.

- a. Untuk melihat faktor-faktor yang berpengaruh dalam kesesuaian hubungan tingkat partisipasi masyarakat terhadap keberhasilan pembangunan PPK.
- b. Untuk melihat faktor-faktor yang berpengaruh dalam kesesuaian hubungan tingkat kemampuan organisasi pelaksana terhadap keberhasilan pembangunan PPK.
- c. Untuk melihat faktor-faktor yang berpengaruh dalam kesesuaian hubungan komunikasi program terhadap keberhasilan pembangunan PPK.
- d. Untuk melihat faktor-faktor yang berpengaruh kesesuaian hubungan antara tingkat partisipasi masyarakat, kemampuan organisasi pelaksana dan komunikasi program terhadap keberhasilan pembangunan PPK.

## D. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat penelitian studi keberhasilan PPK di Kecamatan Gubug, untuk menguji secara teoritis dengan fakta empiris dari program PPK sebagai dasar pengembangan teori.

2. Melalui penelitian ini diharapkan akan memberi manfaat dikalangan pengambil kebijakan, khususnya bagi Pemerintah Kabupaten Grobogan untuk evaluasi dan peningkatan pengembangan kinerja program PPK.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Landasan Teori

Masalah kemiskinan adalah masalah yang sangat menarik dalam teori pembangunan, karena tidak selamanya kebijakan pembangunan selalu mampu memecahkan masalah, seperti dalam teori pembangunan yang memusatkan pada pertumbuhan. Argumentasinya jika tingkat pertumbuhan memadai maka golongan miskin akan dengan sendirinya ikut terangkat oleh gelombang pasang kenaikan pendapatan. Seperti sekarang yang dialami oleh bangsa Indonesia yang telah mengalami krisis tahun 1997 ternyata membuktikan bahwa teori tersebut tidak benar sebab kondisi justru masyarakat miskin semakin terpuruk. Tetesan kebawah yang diharapkan tidak berjalan, tetapi justru kemiskinan menjadi ladang bagi yang kaya sehingga jurang ketidakadilan semakin menganga lebar.

Kegagalan pembangunan kemiskinan sampai dengan dekade 1990-an ternyata mengalami kegagalan, kegagalan ini oleh Korten (2001) mengutip pendapat Kenneth Boulding, mengistilahkan kesalahan pada konsep ekonomi yang dipakai. Yaitu dari ekonomi koboi dimana dapat melakukan apa saja dipadang rumput yang luas tanpa batas, kemudian harus beralih pada ekonomi kapal ruang angkasa yang serba terbatas karena bahaya akan menanti pada pilot dan penumpangnya. Selanjutnya Korten (2001:6) menyebutkan bahwa pada era sekarang menuju abad 21 masalah pembangunan kemiskinan harus berubah arah pada pembangunan sebagai transformasi atau pembangunan berorientasi rakyat yaitu Pembangunan yang harus menyelesaikan tiga masalah *pertama* keadilan,

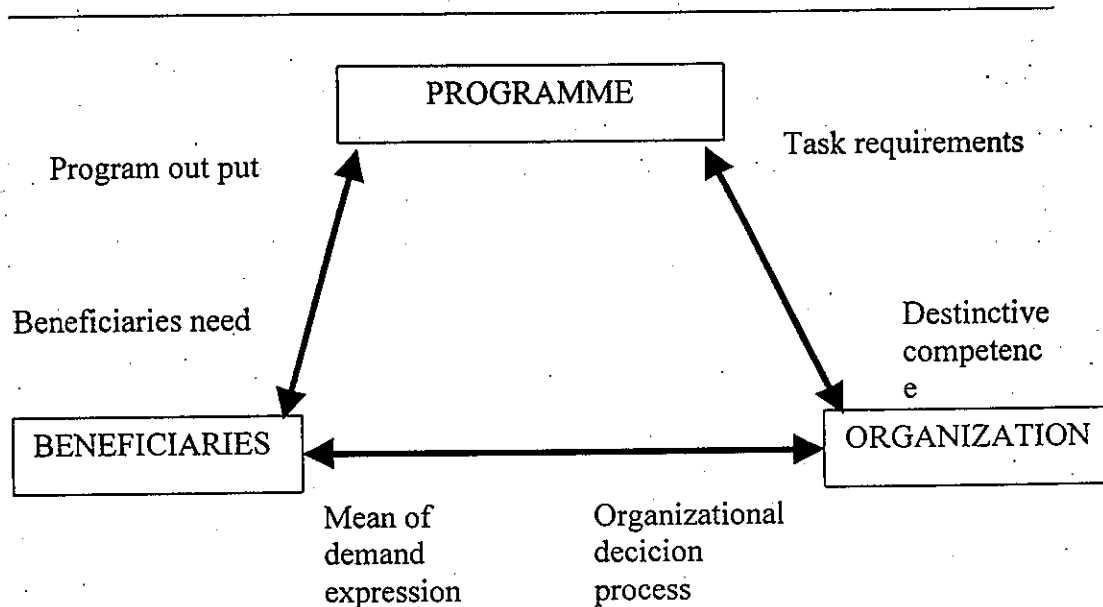
dimana masyarakat mempunyai hak pada hidup yang layak, *kedua* berkelanjutan, yang menjamin keberlanjutan manfaat pembangunan itu sendiri dan *ketiga* adalah ketercakapan bahwa pembangunan harus memberi kesempatan sebagian besar penduduk ikut serta dalam memberikan sumbangan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pertanyaannya bagaimana melaksanakannya menurut Korten untuk melaksanakan pembangunan seperti ini maka rakyat harus berperan aktif dalam menentukan arah dan program pembangunan.

Selanjutnya oleh David Korten (1984:110) secara sederhana mengartikan bahwa pembangunan adalah sebagai proses perubahan yang direncanakan untuk mencapai keadaan yang lebih baik. Lebih lanjut Korten mengemukakan pandangannya bagaimana melihat ukuran keberhasilan pembangunan dalam memecahkan suatu masalah dari tiga sudut pandang yaitu (1) program (2) penerima program (3) organisasi pelaksana. Dalam hal ini Korten, sering menyebut sebagai adanya kesesuaian tiga arah dari suatu proyek, lebih lanjut Korten mengemukakan teorinya :

*"Kunci untuk mencapai kesesuaian tiga arah tersebut, tidak terletak pada (blueprint) organisasional yang didesain bagi penyelenggara program atau proyek, melainkan terutama terletak didalam suatu proses penyelenggaraan program atau proyek itu, dimana proses tersebut langsung dialami oleh ketiga komponen perubahan masyarakat"* ( David Korten, 1984:241)

Model kesesuaian program oleh Korten dapat kami sampaikan secara rinci sesuai aslinya seperti gambar dibawah ini.

Gambar I. 1  
 MODEL KESESUAIAN PROGRAM  
 ( David Korten )



Sumber : David Korten 1984

Menurut model kesesuaian program ini bahwa keberhasilan program harus dilihat sebagai hal yang ditandai dari tiga kesesuaian yaitu penerima program (*beneficiaries*), organisasi pelaksana (*organization*) dan program (*programme*), dimana ketiganya harus ada kesesuaian satu sama lain. Program tersebut dapat dikatakan berhasil dan sukses jika mampu menjawab ketiga kesesuaian, sehingga tercapainya tujuan program yang telah ditetapkan, sehingga antara output program dan impact program mampu menjawab permasalahan yang ada.

Untuk mendukung teori Korten pandangan terhadap pembangunan masalah kemiskinan seperti pandangan dari **Alfian (1998:22)** permasalahan pembangunan (yaitu apakah perubahan yang berarti sedang atau telah terjadi dalam salah satu segi/aspek kehidupan) hanya mungkin bisa ditelaah secara bermakna bilamana kita berhasil menelitinya dari tiga dimensi (1) dimensi kebudayaan (2) dimensi sistem (3) dimensi proses. Dimensi proses ini adalah untuk melihat terhadap dampak pelaksanaan program yang mempunyai makna penting dalam usaha mencapai tujuan, sehingga proses tersebut perlu untuk dilihat apakah proses yang dilaksanakan sesuai dengan tujuan dan sasaran dapat terwujud melalui proses pengelolaan program oleh organisasi pelaksana maupun penerima program itu sendiri.

Kemudian bagaimana keberhasilan program pengentasan kemiskinan seperti PPK berdayaguna, maka perlu kita lihat dari pandangan yang dikemukakan oleh ahli pembangunan **Michael P Todaro (2000)** yang memandang bahwa pembangunan dipandang sebagai suatu cara pemecahan dengan multidimensional yang tidak hanya memandang pada faktor pertumbuhan ekonomi saja tetapi pada masalah kesenjangan dan kemiskinan yang juga mensyaratkan berlangsungnya rangkaian perubahan terhadap sikap perilaku masyarakat dan institusinya. Sehingga apa yang dikemukakan oleh Korten didukung oleh Todaro bahwa keberhasilan program sangat ditentukan pada pelaksanaan proses oleh kemampuan organisasi pelaksana seperti institusi desa (LKMD) dan perubahan sikap perilaku masyarakat sebagai penerima program mampu berdayaguna dan berhasilguna.

Lebih jauh keberhasilan program pengentasan kemiskinan seperti PPK dalam implementasi maka diperlu suatu konsep yang jelas dari program dalam PPK nampak jelas bahwa adanya program yang didesain oleh pemerintah dalam rangka pemberdayaan masyarakat. Bagaimana konsep mampu diaktualisasikan maka sangat ditentukan oleh desain program itu sendiri, ketepatan sasaran dan pemberdayaan institusi desa sebagai pengelola program. Konsep dalam PPK sangat relevan dengan apa yang disampaikan oleh **Ginanjjar Kartasasmita** (CIDES 1996 hal 63) bahwa keberhasilan pengentasan kemiskinan apabila pembangunan dilaksanakan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Lebih jauh dikatakan upaya penanggulangan kemiskinan selanjutnya oleh Ginanjjar Kartasasmita diarahkan pada 3 kebijakan *pertama* kebijakan tidak langsung diarahkan pada penciptaan kondisi yang menjamin kelangsungan *kedua* kebijakan langsung yang ditujukan kepada golongan masyarakat berpenghasilan rendah, *ketiga* kebijakan khusus yang dimaksudkan untuk mempersiapkan masyarakat itu sendiri dan aparat yang bertanggungjawab langsung terhadap kelancaran program. Hal ini sesuai dengan program PPK yang bersifat *block grant*.

Kesesuaian program dengan implementasi akan sangat ditentukan oleh tingkat efektifitas komunikasi program antara program itu sendiri dengan penerima program dan organisasi pelaksana. Dalam implementasi program sangat dibutuhkan sekali adanya komunikasi seperti yang dikemukakan oleh **George Edwards III** (1980) mengidentifikasi empat faktor yang dipercaya sebagai variabel yang mempengaruhi implementasi yaitu (1) komunikasi, (2) sumber daya, (3) disposisi implemantor dan (4) struktur birokrasi. Dari pandangan ini

nampak jelas bahwa komunikasi merupakan variabel yang sangat erat hubungannya dengan pengaruh keberhasilan program, seperti yang dikemukakan oleh Korten bahwa keberhasilan ditentukan oleh tiga kesesuaian hubungan antara program, penerima program dan organisasi pelaksana, dimana kesesuaian program ini dapat berjalan dengan efektif apabila adanya komunikasi program yang efektif pula.

Dari ketiga kesesuaian oleh Korten dapat untuk menjawab sebuah pertanyaan yang kita ajukan bahwa keberhasilan pembangunan ditentukan oleh siapa dan bagaimana, pertanyaan ini dapat dijawab seperti apa yang dikemukakan oleh Soetarso (1991:42) dalam Suradi (ed. KSN 2000:92) menyatakan bahwa masyarakat sendiri harus berjuang dan berupaya untuk menghadapi kondisinya sendiri tentang kebutuhan dan masalah-masalahnya. Sehingga dalam proses ini masyarakat dapat meningkatkan kemampuannya tidak saja untuk memenuhi kebutuhan dan mengatasi masalah yang dialami saat ini, tetapi juga kebutuhan dan masalah yang akan muncul dikemudian hari. Bagaimana gejala ini akan terjadi dapat dilihat dari bagaimana berfungsinya tiga kesesuaian yang dikemukakan oleh Korten.

Bagaimana masyarakat mampu berdayaguna sesuai dengan konsep PPK maka kata kunci utama adalah demokrasi dan pemberdayaan seperti yang dikemukakan oleh Clark dalam Suradi ed (2000:90 *Buletin Informasi KSN*), bahwa keberhasilan pembangunan terdapat dua kata kunci yakni demokrasi dan pemberdayaan. Lebih jauh Clark menyebutkan bahwa konsep pembangunan yang berhasil yakni (1) adanya pertumbuhan ekonomi (2) pembangunan berkelanjutan

yang meliputi aspek tidak adanya kehancuran sosial dan lingkungan. Pembangunan berkelanjutan ini sangat mendukung bagaimana gejala yang akan terjadi dengan adanya pelaksanaan PPK untuk melihat pada perubahan penerima program, kemampuan organisasi pelaksana, kemampuan program itu sendiri, sehingga masyarakat yang sudah dijadikan subyek pembangunan akan mengelola program bantuan pemerintah secara berkelanjutan, yang dampaknya diharapkan tidak terjadi lagi yang dikatakan sebagai kesenjangan sosial sehingga tidak terjadi krisis yang multidimensional.

Dalam pelaksanaan program PPK apabila kita lihat dari petunjuk atau pedoman pelaksanaannya terlihat jelas bahwa pengelolaan program telah diserahkan sepenuhnya kepada masyarakat dimana pemerintah hanya sebagai fasilitator saja. Apabila kita hubungkan dengan teori Korten tersebut diatas siapa yang melakukan transformasi adalah rakyat itu sendiri melalui partisipasi dan organisasi non pemerintah. Implementasi PPK dilaksanakan oleh Masyarakat itu sendiri melalui kelompok masyarakat atau organisasi pelaksana seperti TPKD (Tim Pelaksana Koordinasi Desa) dan tentunya fasilitator desa sebagai pendampingan. Faktor lain yang sangat mendukung adalah program itu sendiri karena ada organisasi pelaksana dan partisipasi tanpa adanya program tentunya tidak akan berjalan seperti apa yang dikemukakan oleh Linder dan Peters. Sehingga disini diperlukan suatu informasi program kepada penerima program masyarakat dari pemberi program yaitu pemerintah, secara utuh dan jelas sehingga dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan dan sarannya. Terkait masalah kebutuhan informasi maka diperlukan adanya komunikasi yang efektif.

Setelah kita mengetahui bagaimana memandang pembangunan kemiskinan, dan pentingnya sebuah persoalan untuk memecahkan masalah kemiskinan yang ada di daerah. Sungguh menarik bagi penulis untuk melakukan penelitian tingkat hubungan keberhasilan pembangunan kemiskinan yaitu dengan Program Pengembangan Kecamatan Di Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan dengan variabel yang mempengaruhinya. Kemudian bagaimana penelitian dilakukan yang terpenting adalah melihat bagaimana ukuran keberhasilan program itu sendiri dan manfaat serta dampak dari program untuk membuktikan terhadap teori yang dikembangkan. Sedang dasar pemikiran terhadap penelitian ini didasarkan pada teori kesesuaian program dari David Korten.

Dalam konteks ini maka sangat relevan sekali teori apa yang dikembangkan oleh David Korten sebagai pisau untuk melihat gejala keberhasilan program PPK untuk menjawab permasalahan kemiskinan. Berdasarkan teori yang dikembangkan oleh David Korten tersebut maka cukup alasan apabila kita jadikan sebagai pijakan teori yang akan dikembangkan dalam penelitian keberhasilan pengembangan kecamatan (PPK) di Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan sebagai variabel terikat, yang selanjutnya akan dijadikan dalam menentukan variabel bebas.

Dengan melihat dari beberapa pandangan teori tersebut diatas dapat diambil kesimpulan bahwa keberhasilan program terdapat pilar utama diantaranya adalah :

1. Adanya pemrakarsa atau pelaksana program.
2. Adanya penerima program (masyarakat).

3. Adanya tujuan dan sasaran program.
4. Adanya dampak dari program.

Selanjutnya dari ketiga dimensi kesesuaian tersebut terhadap hubungan dengan keberhasilan program dapat diintegrasikan kedalam variabel bebas dengan beberapa dasar pandangan beberapa ahlinya. *Pertama* dimensi penerima program adalah kelompok sasaran, hal ini sesuai dengan tema penelitian yang ingin melihat kepada dampak perubahan yang terjadi kebijakan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan. Perubahan itu adalah menempatkan kedudukan masyarakat sebagai subyek pembangunan tidak lagi hanya dijadikan sebagai obyek, sehingga penerima program dapat penulis turunkan kedalam variabel partisipasi masyarakat. Bagaimana memahami dimensi penerima program maka bisa dilihat dari sasaran program, penerima program disini yaitu pembangunan yang bertumpu pada kemampuan masyarakat seperti dalam prinsip pembangunan PPK. Pandangan tersebut didukung seperti yang disampaikan Clark (1995:28-29) bahwa pembangunan mempunyai dua kata kunci demokrasi dan pemberdayaan dimana pembangunan sebagai proses perubahan yang menjadikan masyarakat turut bertanggungjawab atas nasib mereka sendiri dan menyadari bahwa mereka memiliki potensi. Karena itu yang perlu dilakukan adalah membangun rasa kepercayaan dalam diri masyarakat, meningkatkan ketrampilan dan kebebasan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan.

*Kedua* dimensi kesesuaian program, keberhasilan suatu program dapat dikatakan sukses jika program itu responsif sehingga terdapat kesesuaian antara penerimaan dan pemahaman penerima program dengan kemampuan dan

ketrampilan organisasi pelaksana dalam kelancaran pelaksanaan PPK. Keberhasilan ini akan sangat dipengaruhi bagaimana tingkat komunikasi program, dimana program itu dapat dilaksanakan dengan baik sesuai tujuan dan sasaran yang ditetapkan apabila adanya penerimaan dan pemahaman terhadap. Dalam dimensi ini masalah kemiskinan terjadi karena lebih disebabkan adanya ketidakberdayaan masyarakat dimana bantuan selama ini belum mampu mengentaskan kemiskinan dengan asumsi tidak adanya respon positif masyarakat. Kesesuaian program bisa dilihat pada kesesuaian tingkat kebijakan yang meliputi formulasi, implementasi dan evaluasi kebijakan Nakamura & Smallwood, (1980:30) ; Parsons, (1997:543), dalam Faddillah Putra (2001:78) Kebijakan yang telah diformulasikan atau dirumuskan bermaksud untuk mencapai tujuan tertentu.

Dan *ketiga* adalah dimensi organisasi pelaksana, keberhasilan program akan sangat ditentukan adanya efektifitas kinerja organisasi pelaksana, terkait dimensi organisasi pelaksana dapat dilihat pada tingkat kemampuan dari organisasi pelaksana itu sendiri, pandangan ini seperti dikemukakan oleh pelaksana Jones, 1984 dalam Fadillah Putra (2001:90) keberhasilan program juga sangat ditentukan bagaimana tingkat kinerja organisasi pelaksana. Melihat pandangan ini maka keberhasilan program PPK perlu dilihat organisasi pelaksana sebagai variabel dalam studi ini. Dalam hubungan dengan maksud tujuan program maka organisasi pelaksana di tingkat desa akan sangat menentukan sekali karena merekalah sendiri sebagai pengelola, sedangkan pemerintah hanya berfungsi sebagai fasilitator saja.

Dari ketiga dimensi teori kesesuaian program terurai diatas dapat kami sampaikan kedalam definisi konseptualnya penelitian sebagai berikut :

- 1) Kesesuaian penerima program yaitu kesesuaian hubungan keberhasilan program dengan kelompok sasaran sebagai penerima program terhadap kesesuaian standar tujuan program yaitu partisipasi masyarakat.
- 2) Kesesuaian organisasi pelaksana yaitu kesesuaian hubungan keberhasilan program dengan kemampuan organisasi pelaksana dalam melaksanakan program yang dapat diterima oleh kelompok sasaran.
- 3) Kesesuaian program yaitu kesesuaian hubungan keberhasilan program dari dengan komunikasi program yaitu bagaimana program itu dapat dilaksanakan sesuai standar dan tujuan program PPK

Dari beberapa definisi teori dan turunan kedalam variabel penelitian seperti dikemukakan didepan dihubungkan dengan pelaksanaan pembangunan PPK maka pendekatan yang cukup relevan, dengan kiblat teori dari David Korten yang akan dipergunakan sebagai *grand teori*, dimana teorinya menyatakan bahwa keberhasilan program ditentukan tiga kesesuaian arah yaitu kesesuaian program, penerima program dan organisasi pelaksana yang selanjutnya akan kami jadi sebagai variabel terikat dalam penelitian ini. Sehubungan dengan permasalahan pokok penelitian keberhasilan PPK ketiga sudut pandang dapat sampaikan definisi operasionalnya sebagai berikut:

- 1) Program (*programme*), yaitu pembangunan program pengembangan kecamatan sebagai upaya pengentasan kemiskinan dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat yang menitikberatkan pada pengembangan

ekonomi produktif dan bagaimana komunikasi program itu dapat berjalan sesuai maksud dan tujuan PPK.

- 2) Organisasi Pelaksana (*organization*) adalah organisasi pelaksana program Tim Pelaksana Kegiatan Desa (TPKD) dan fasilitator desa sebagai pendamping pelaksanaan kegiatan.
- 3) Penerima Program (*beneficiaries*) yaitu kelompok sasaran pada khususnya dan masyarakat pada umumnya yaitu bagaimana tingkat partisipasinya dalam implementasi dan dampaknya PPK.

Selanjutnya dari variabel yang sudah kita tetapkan tersebut akan diuraikan secara satu persatu kedalam bangun teori sebagai berikut

#### **1. Keberhasilan Program Pengembangan Kecamatan (PPK)**

Masih sulit nampaknya menentukan ukuran keberhasilan pembangunan. Elastisitasnya ukuran tersebut menunjukkan bahwa pada hakekatnya kita dapat menyusun ukuran tersebut berdasarkan tujuan/sasaran pembangunan tersebut. Setidaknya indikator pencapaian tujuan pembangunan telah menunjukkan arti keberhasilan itu sesungguhnya, bagaimana proses berjalan sesuai dengan maksud dan tujuan yang telah ditetapkan. Hal ini relevan apabila kita lihat pendapat dari Jones, 1996:293-294 dalam Fadillah Putra (2001) bahwa salah satu tolok ukur keberhasilan suatu kebijakan terletak pada proses implementasinya, namun demikian implementasi kebijakan sangat tergantung pada tatanan kebijakan itu sendiri (macro policy dan micro policy) artinya formulasi kebijakan makro yang ditetapkan dalam peraturan yang berlaku.

Setelah kita mengetahui suatu keberhasilan sangat ditentukan tingkat implementasinya, sejauhmana output keberhasilan suatu program menurut pandangan **Sondang P Siagian** , (1985:14) menyoroti bahwa semakin kecil atau rendah suatu tingkat keluaran atau hasil yang tidak atau kurang mendekati tujuan atau hasil yang diinginkan dapat dikatakan efektif, begitu pula sebaliknya jika ada perbedaan yang besar atau tinggi sesuai dengan keluaran yang diinginkan dapat dikatakan efektivitasnya rendah.

Unsur keberhasilan pengentasan kemiskinan yang sangat menentukan adalah bagaimana proses pembangunan itu berjalan yang bergantung kepada pelaksanaannya . PPK sebagai program pengentasan kemiskinan yang merupakan paradigma baru pembangunan maka pelaksanaannya akan sangat ditentukan oleh masyarakat itu sendiri sebagai pengelola yaitu sebagai – perencana, pelaksana dan pengembangannya. Model pembangunan tersebut diciptakan berdasarkan proses demokrasi dan pemberdayaan untuk menunjukkan bahwa pembangunan yang benar adalah pembangunan yang dikerjakan oleh rakyat, bukan dikerjakan untuk rakyat dan memungkinkan masyarakat memiliki keberdayaan untuk mencapai tujuan pembangunan.

Membicarakan keberhasilan pembangunan maka tidak akan terlepas dengan capaian tujuan dan sasaran, program pengentasan kemiskinan seperti PPK sangatlah tepat apabila kita merujuk dari pendapat. **Dennis A Rondenelli** (1990:91-92) menyebutkan bahwa keberhasilan pembangunan pada negara berkembang maka bantuan tersebut diarahkan kepada (1) masyarakat penduduk miskin (2) bantuan diperuntukan untuk meningkatkan

pendapatan penduduk miskin dan (3) spesifik kebutuhan masyarakat. Sehingga sangatlah tepat apabila keberhasilan pembangunan terkait erat dengan faktor kelompok sasaran atau penerima program terhadap hubungan dengan tingkat partisipasi masyarakat.

Kegagalan pembangunan kemiskinan dimas yang lalu lebih disebabkan kepada peran masyarakat yang pasif hanya sebagai obyek saja, dimana sering terjadi tidak kesesuaian antara tujuan dan sasaran. Keadaan tersebut berakibat bahwa pembangunan kurang berdaya dan berhasilguna karena tidak didukung penuh oleh kesadaran masyarakat atau mereka merasa tidak memiliki (dimanja). PPK yang dianalogkan sebagai Pembangunan yang dilaksanakan oleh rakyat merupakan paradigma baru pembangunan yang diharapkan akan menimbulkan rasa memiliki dan kesinambungan program dapat terjadi pada masyarakat sehingga muncul kemandirian masyarakat.

Dampak lain penyerahan bantuan langsung pada masyarakat di desa bisa memecahkan masalah pemerataan yang bisa berpengaruh terhadap distribusi pendapatan yang menjadi ketimpangan pada masyarakat miskin, seperti apa yang dikemukakan oleh **Dennis A Rondinelli (1990:80)** ditemukan bahwa bagian terbesar kelompok miskin telah dikucilkan dari kemungkinan memperoleh manfaat dari pembangunan yang tersentralisasi. Sehingga menurutnya keberhasilan pembangunan bagi masyarakat miskin adalah adanya jiminan pemerataan pendapatan dari kebijakan program yang ditetapkan dengan mempertimbangkan pada kondisi sosio ekonomi. Menurut

pandangan ini maka adanya kemandirian dan peningkatan pendapatan dari program adalah suatu ukuran indikator keberhasilan program.

Keberhasilan suatu program pembangunan kemiskinan menurut **David Korten** (2001-110) adalah *“proses dimana anggota-anggota suatu masyarakat meningkatkan kapasitas perorangan dan institusional mereka untuk memobilisasi dan mengelola sumber daya untuk menghasilkan perbaikan-perbaikan yang berkelanjutan dan merata dalam kualitas hidup sesuai dengan aspirasi sendiri”*.

Akhirnya bagaimana menetapkan suatu ukuran keberhasilan dengan memperhatikan teori-teori yang dikemukakan oleh ahlinya dapat ditarik kesimpulan keberhasilan pengentasan kemiskinan adalah capaian ketepatan terhadap tujuan dan sasaran. Arti keberhasilan program tersebut hendaknya berada pada suatu kerangka umum yang memuat landasan berpijak dan paradigma pembangunan yang sedang dibangun dan diwujudkan bersama. Atas dasar inilah maka dapat ditarik garis nyata bahwa keberhasilan pembangunan yang dimaksud adalah mewujudkan nilai-nilai universal seperti adanya peningkatan terhadap kualitas hidup manusia atau ekonomi (kesejahteraan/peningkatan pendapatan), pemberdayaan masyarakat, partisipasi masyarakat sebagai bentuk kemandirian, serta peningkatan sarana dan prasarana ekonomi produktif secara efektif.

## 2. Partisipasi Masyarakat.

Persepsi masyarakat terhadap pembangunan merupakan sebuah respon awal dari masyarakat terhadap proses dan hasil pembangunan. Persepsi akan membangun seluruh reaksi-reaksi positif maupun negatif ikutan lainnya dalam berbagai bentuk dan wujud. Salah satu wujud reaksi ikutan inilah yang selanjutnya disebut sebagai partisipasi, dimana partisipasi mengandung makna adanya dukungan publik terhadap keberhasilan implementasi program. Persepsi terhadap program disampaikan oleh **Sumitro (1995)** menjelaskan bahwa dalam partisipasi masyarakat banyak sekali faktor yang menentukan diantaranya ; 1) kebutuhan masyarakat, 2) interest masyarakat, 3) adat istiadat dan sifat-sifat komunal yang mengikat setiap anggota masyarakat satu sama lain. Tidak jarang terjadi bahwa masyarakat lebih tahu permasalahan yang dihadapi, tetapi tidak mampu mengatasinya karena keterbatasan-keterbatasan oleh karakter dan kemampuan masyarakat itu sendiri atau hambatan lingkungan alamnya.

Bagaimana masyarakat atau kelompok masyarakat miskin mampu mengatasi masalahnya dengan hadirnya program PPK maka keterlibatan masyarakat sangat diperlukan, mereka diharapkan mampu mengelola program secara mandiri. Sebab dalam kenyataannya bahwa merekalah sendiri yang tahu persoalan atau permasalahannya, selanjutnya **Sajogyo (1982)** berpendapat bahwa partisipasi masyarakat, khususnya golongan petani, adalah tidak hanya “ikut melaksanakan dan mengenyam hasil pembangunan” tetapi terdapat tiga hal lain yaitu :

- (1) ikut menentukan kebijakan pembangunan,
- (2) ikut merencanakan pelaksanaan pembangunan, dan
- (3) ikut menilai hasil pembangunan sudah sejauh mana dapat memperbaiki keadaan menurut ukuran dan pengalaman masyarakat.

PPK sebagai program pengentasan kemiskinan adalah berupa daya masyarakat dalam ikut mendukung pelaksanaan program sesuai dengan tujuan dan sasaran, maka partisipasi atau dukungan masyarakat diharapkan tumbuh dan berkembang sehingga akan mampu menumbuhkan pada sikap kemandirian masyarakat khususnya masyarakat miskin. Kaitan ini seperti apa yang dikemukakan **Chambers** (1996) yang menyebutkan bahwa Kelompok masyarakat miskin kurang berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan dikarenakan tidak punya modal, rendahnya pendidikan dan nilai nilai yang dianut masih tradisional. Kondisi seperti apa yang dikemukakan diatas sesuai dengan kondisi masyarakat miskin saat ini.

Selanjutnya partisipasi seperti apa yang dapat diberikan masyarakat miskin dalam ikut mengelola pembangunan, oleh **Sastropetro** (1986) membagi partisipasi masyarakat dalam pembangunan sebagai berikut : 1) Partisipasi dengan pikiran, 2) Partisipasi dengan tenaga 3)Partisipasi pikiran dan tenaga, 4) Partisipasi dengan keahlian, 5) Partisipasi dengan barang, 6) Partisipasi dengan uang dan 7)Partisipasi dengan jasa-jasa.

Dari tiga pandangan teori tersebut masyarakat dalam ikut berpartisipasi pada program pengentasan kemiskinan ada tiga prasyarat agar

masyarakat dapat berpartisipasi dalam pembangunan yaitu adanya kesempatan untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan, adanya kemauan anggota masyarakat untuk berpartisipasi dan adanya kemampuan anggota masyarakat dalam memanfaatkan kesempatan yang ada.

Kemudian bagaimana tingkat partisipasi dalam program PPK dapat diukur dari adanya pengelolaan program oleh masyarakat dengan mendasarkan teori yang dikemukakan di depan dihubungkan dengan teori kesesuaian dari David Korten, maka partisipasi masyarakat merupakan turunan dari kesesuaian penerima program. Sehingga dengan mendasarkan teori seperti apa yang dikemukakan di depan dapat disimpulkan sebagai dasar penentuan definisi konseptual adalah adanya persepsi atau dukungan masyarakat yang berupa pikiran, tenaga/keahlian, barang, dan jasa.

### **3. Kemampuan Organisasi Pelaksana**

Organisasi dalam pembentukannya adalah sebagai salah satu sarana prasarana mencapai tujuan adalah pelaksana program, membicarakan pelaksana program maka akan selalu berhubungan dengan kinerja, selanjutnya membicarakan tingkat kinerja berarti melihat pada tingkat kemampuan. Dapat kami sampaikan pandangan mengenai kemampuan organisasi menurut Vroom istilah-istilah kemampuan biasanya menunjukkan potensi untuk melaksanakan suatu tugas yang mungkin atau tidak mungkin digunakan. Hal ini memperlihatkan bahwa yang dikerjakan dan bukan, apakah ia mengerjakan pekerjaan itu. Disebut sebagai potensi berarti

kemampuan masih merupakan daya kekuatan yang ada pada diri seseorang yaitu untuk menunjukkan apa yang akan dapat dikerjakan dan bukannya apa yang telah dikerjakan (**Vroom, dalam Forum No.67 1990:90**)

Sesuai dengan tujuan dan sasaran PPK selain sebagai upaya peningkatan pendapatan masyarakat, adalah upaya meningkatkan institusi pengelola program sebagai upaya pemberdayaan masyarakat. Dampak langsung ini diharapkan membelajarkan masyarakat sekaligus dengan stimulannya dimana organisasi akan mampu menjalankan tugasnya. Sedangkan dalam menjalankan tugasnya tentu diperlukan suatu tingkat pemahaman dan ketrampilan dari organisasi pelaksana itu sendiri. Apa yang dimaksud dengan kemampuan organisasi pelaksana dapat disampaikan pandangan menurut **Gibson (1985:86)** kemampuan kerja seseorang adalah kemampuan menunjang potensi seseorang dalam menjalankan kerja dan tugas. Jadi ukurannya adalah keberhasilan bagaimana ia menyelesaikan tugasnya.

Setelah organisasi pelaksana itu dibentuk sebagai syarat akan pelaksanaan program akan seperti apakah organisasi tersebut dapat menjalankan tugasnya dimana mereka terdiri dari komunitas masyarakat dengan tingkat pendidikan rendah dan miskin. Faktor pertama adalah adanya kemauan atau respon positif dan mereka bisa menentukan kebutuhannya sendiri. Terkait hal ini Organisasi dalam pelaksanaan pembangunan harus bersifat responsif hal ini ditegaskan oleh **Ickis (1981:11-12)** dalam **Dennis A Rondinelli (1990:204)** tujuan-tujuan utama organisasi pelaksana haruslah

tertuju pada upaya mendorong semangat kerja sendiri. Kurang berfungsinya program terhadap kepuasan kebutuhan kelompok sasaran terletak pada tingkat kemampuan teknis administrasi pembangunan yang telah diberikan kewenangan kepada pelaksana ( UNDP, 1979 dalam Denis A Rondinelli, 1990:123)

Rendahnya kemampuan organisasi sudah dapat ditafsirkan bahwa dalam pelaksanaan tidak akan efektif, tetapi apabila tidak dicoba tentunya sulit sekali bagi masyarakat miskin untuk bangkit dari ketidakberdayaan. Hal yang sangat penting dalam hal ini adalah kemauan dalam memahami dan respon masyarakat untuk melaksanakan berbagai ketentuan yang berlaku. Pernyataan ini didukung dari pandangan **Rondinelli dan Ingle, 1981** ed **Fadillah Putra, 2001**. Ada dua unsur dari respons pelaksana yang dapat mempengaruhi kemampuan dan kemauan mereka untuk melaksanakan kebijakan yaitu : (1) kognisi, yaitu pemahaman tentang kebijaksanaan, dan (2) respon mereka ke arah kognisi itu (menerima , netral atau menolak)

Dari beberapa pandangan teori tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kemampuan organisasi pelaksana efektifitasnya dapat dilihat dari tingkat kemampuan dan ketrampilan serta kecakapan organisasi pelaksana dalam upaya memahami dan respon yang terjadi.

#### **4. Komunikasi Program**

Pengertian komunikasi dapat kita lihat dari Istilah komunikasi yang berpangkal dari perkataan latin *communicare* yang mengandung arti memberitahukan, berpartisipasi dan menjadikan milik bersama . Komunikasi

dimaksudkan sebagai proses pengoperan lambang yang mengandung arti, antara seseorang dengan orang lain atau antara seseorang dengan sejumlah orang maun antara sejumlah orang dengan sejumlah orang yang lain dengan berbagai maksud dan tujuan. Komunikasi dapat dipandang sebagai bagian hakiki dari kehidupan manusia bermasyarakat.

Masyarakat dalam menjalankan kegiatan PPK tentunya kapasitas secara kualitas akan kita maklumi akan terasa sulit, bagaimana transformasi program melalui komunikasi berjalan efektif, persoalannya pada tingkat kualitas masyarakat. Tetapi terpenting sesuai tujuan program itu sendiri yang merupakan upaya membelajarkan rakyat, tentunya merekalah sendiri yang harus berjuang bersama-sama dibantu pemerintah sebagai fasilitator untuk mewujudkan capaian program secara optimal. Oleh karena itu komunikasi disini menjadi sangat penting dalam transformasi, di desa tidak bisa kita generalisasi bodoh semua sebab dari mereka ada kelompok masyarakat berpendidikan, seperti rata-rata guru, alim ulama atau tokoh masyarakat dan sebagian pemudanya. Sehingga hanya dibutuhkan suatu hubungan yang dinamis dalam kesatuan masyarakat untuk membangun desanya, dengan caranya merek sendiri.

Dalam membicarakan komunikasi tidak bisa terlepas dari proses komunikasi, proses komunikasi yang menyatu dengan proses perkembangan masyarakat dijelaskan oleh Wilbur Schram dalam Novel Ali (1986) dijelaskan sebagai *society communicating* atau masyarakat yang berkomunikasi, komunikasi pada hakekatnya merupakan dari gerak

masyarakat. Menurut pendapat **Edwar Sapir** dalam **Novel Ali** (1986) terbagi atas proses primer (*primary process*) proses komunikasi langsung tanpa menggunakan alat (media masa) dan proses skunder (*secondary process*) orang menggunakan mekanisme untuk melipatgandakan jumlah penerima pesan biasanya proses lebih efektif dibanding dengan proses primer, dalam proses skunder dengan menggunakan bantuan alat media.

Persoalan utama dalam komunikasi adalah tingkat pemahaman, kelemahan tingkat pemahaman akan dapat diatasi melalui media yang ada serta khususnya dalam organisasi pelaksana itu sendiri. Bagaimana informasi itu akan sampai pada penerima pesan dan pengirim pesan, dapat menggunakan simbol verbal atau non verbal sangat tergantung pada proses komunikasi menurut pendapat **Gibson** (1997:232) proses komunikasi berisi lima elemen yaitu komunikator, pesan, media, penerima dan umpan balik. Komunikasi akan efektif apabila ada hasil pemahaman antara komunikator dan penerima, yaitu apabila komunikator dapat menyampaikan pengertian yang dimaksud kepada penerima.

Dari kedua pandangan teori tersebut diperkuat seperti yang disampaikan oleh **Stan Kossen** (1993:53) mendefinisikan komunikasi sebagai proses dua arah (*two-way proces*) yang menghasilkan tranmisi informasi dan pengertian (atau salah pengertian) antara masing-masing individu. Sedangkan tipe-tipe komunikasi yang efektif yaitu (1) formal dan informal (2) Keatas,kebawah dan horisontal (3) lisan dan tertulis (4) nonverbal. Selanjutnya oleh **Edwars III** (1980) yang menjelaskan

Komunikasi terdapat unsur-unsur (1) sumber atau *source* (2) *Message* atau informasi, pesan dan isi pesan (3) Media atau saluran *channel* (4) *destination* atau sasaran (5) maksud dan tujuan. Komunikasi memainkan peranan yang penting bagi berlangsungnya koordinasi dan implementasi pada umumnya.

Dari pandangan teori oleh ahlinya dapat disimpulkan bahwa pengertian komunikasi program PPK, bahwa komunikasi adalah interaksi dua arah yaitu antara organisasi pelaksana dengan kelompok sasaran atau keduanya berupa transformasi program. Komunikasi program disini dapat diukur hubungan antara komunikator dan penerima pesan atau keduanya, dalam proses komunikasi melalui media cetak, elektronik dan peran fungsi kelembagaan desa atau pelaksana di desa.

#### **5. Hubungan Partisipasi Masyarakat dengan Keberhasilan Program Pengembangan Kecamatan (PPK).**

Sebelum kita mencoba menguraikan hubungan kesesuaian antara partisipasi masyarakat dengan keberhasilan Program Pengembangan Kecamatan (PPK) terlebih dahulu perlu kita ketahui konsep dasar teori pembangunan yang ada. Pembangunan secara sederhana dapat diartikan sebagai proses perubahan yang direncanakan untuk mencapai keadaan yang lebih baik.

Suradi ed (2000:90 *Buletin Informasi KSN*) mendefinisikan pembangunan sebagai suatu proses dimana anggota suatu masyarakat meningkatkan kapasitas perorangan dan institusional mereka untuk

memobilisasi dan mengelola sumber daya guna, menghasilkan berbagai perbaikan yang berkelanjutan serta merata sesuai dengan aspirasi mereka sendiri. Lebih jauh **Suradi** mengemukakan dalam program pembangunan penting adanya partisipasi masyarakat dalam pembangunan yang akan memberikan dampak 1) memberikan iklim yang kondusif, yang mampu mendorong masyarakat sadar dan bebas memilih serta menyetujui sesuatu hal, menyerap suatu nilai atau menerima tugas, 2) masyarakat berkesempatan untuk belajar dari hal-hal yang kecil untuk kemudian ditingkatkan pada hal-hal yang lebih besar dan 3) masyarakat mempunyai keyakinan dan kemampuan sendiri dan berkesempatan menentukan sendiri apa yang dikehendaknya. Gaya pembangunan yang menekankan partisipasi masyarakat dapat menumbuhkembangkan saling ketergantungan antara rakyat dengan birokrat karena itu sifatnya menjadi *empowering*, mengembangkan kemampuan masyarakat untuk mengaktualisasikan potensinya disini artinya menempatkan masyarakat telah menjadi subyek pembangunan, dimana keterlibatan mereka dalam pembangunan bukan karena dimobilisasi.

Kemudian bagaimana bentuk partisipasi masyarakat terkait dengan keberhasilan pembangunan dapat kita lihat seperti disampaikan dalam Pandangan yang dikemukakan oleh **Djohani** (1996) dan **Suradi** ed (2000), bahwa dengan adanya partisipasi maka pembangunan yang dilaksanakan akan reponsif terhadap kebutuhan masyarakat, rasa kepemilikan masyarakat

terhadap program-program pembangunan yang tinggi dan masyarakat mampu mengambil prakarsa dalam perumusan program.

Berdasarkan konsep pembangunan tersebut diatas nampak jelas sekali bahwa konsep pembangunan yang dibentuk harus memandang dimensi pemberdayaan dan demokrasi. Begitupula bila kita lihat dalam Program Pengembangan Kecamatan (PPK) konsep pembangunan dengan dimensi pemberdayaan dan demokrasi sudah terlihat dalam visi nilai program, dengan menempatkan masyarakat sebagai subyek pembangunan yang berperan aktif dalam semua kegiatan program dari perencanaan, pelaksanaan dan pengembangannya.

Adanya hubungan tingkat partisipasi masyarakat dengan keberhasilan program dimana masyarakat sebagai subyek dalam arti memiliki program itu sendiri, secara faktual empirik apakah memang masyarakat telah mampu menerima program ini secara utuh. Dalam kaitan ini dapat kami sampaikan pandangan sebagai tolok ukur bagaimana tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Dari beberapa pandangan beberapa teori yang dikemukakan depan jika dihubungkan teori kesesuaian oleh David Korten dari turunan kesesuaian penerima program yaitu kelompok sasaran sebagai penerima program akan dapat meningkatkan partisipasi dalam pengelolaan pembangunan.

## 6. Hubungan Kemampuan Organisasi Pelaksana dengan Keberhasilan Program Pengembangan Kecamatan (PPK).

Dalam proses implementasi kebijakan unsur pelaksana operasional memegang peranan yang cukup strategis. Setelah tujuan kebijakan dibuat upaya selanjutnya adalah bagaimana menentukan pelaksanaan program dilaksanakan secara efektif.

Jones (1984) menekankan bahwa kegiatan penting yang berkaitan dengan penerapan program adalah organisasi, persepsi dan implementasi itu sendiri. Dari ketiganya selain implementasi maka organisasi dipandang penting dalam implementasi. Pemahaman mengenai bagaimana organisasi berfungsi, mempunyai implikasi yang lebih luas dari pada cakupan birokrasi formal. Berbagai jenis pekerjaan administrator dilaksanakan melalui organisasi-organisasi yang sudah ada atau unit-unit baru yang dibuat untuk memanfaatkan peluang dalam penanggulangan masalah-masalah diluar organisasi.

Dari pandangan tersebut di atas terlihat bahwa dalam merencanakan suatu program, organisasi dianggap sebagai wadah dalam implementasi program, maka harus memperhatikan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat, atau harus dapat memberikan jalan keluar tentang masalah penting yang terjadi di masyarakat tersebut. Disini nampak jelas bagaimana hubungan keberhasilan program dengan kemampuan organisasi pelaksana yaitu bagaimana pengaruh berfungsinya organisasi dalam implementasi kebijakan

Tujuan organisasi dibentuk dengan dua pertimbangan *pertama*, penetapan tujuan membutuhkan banyak informasi tentang aneka ragam alternatif, *kedua* tujuan mencerminkan nilai-nilai dan komitmen-komitmen individu (Coralie Bryant, 1987). Dengan demikian tujuan suatu organisasi dibuat sebagai langkah penyesuaian-penyesuaian dengan suatu situasi. Membicarakan kinerja organisasi tentunya kita harus melihat lingkungan kinerja seperti dikemukakan Coralie Bryant, lingkungan menjadi penting bagi sebuah organisasi karena dua hal. *Pertama*, lingkungan dapat menyediakan sumber daya, yaitu adanya badan-badan lain yang dapat mengalokasikan dukungan finansial ; kelompok-kelompok yang dilayani mungkin dapat menawarkan dukungan politik; teknologi baru mungkin dapat menekan harga produk. *Kedua*, lingkungan menawarkan batas atau kendala, kelompok-kelompok yang ada boleh jadi menentang tindakan-tindakan organisasi atau berlomba memperebutkan sumber daya ; para pemanfaat setempat barangkali tidak mengacuhkan jasa dan pelayanan yang disediakan ; tekanan-tekanan politik mungkin menyusutkan upaya dan hasil. (Coralie Bryant, 1987: 65).

Organisasi dalam hal ini organisasi pelaksanaan program PPK adalah organisasi pelaksana ditingkat dasar didesa dimana pada merekalah bagaimana ketergantungan pelaksanaan program mencapai target sasaran dan tujuan, yaitu pada kelembagaan desa LKMD dan fasilitator desa. Dalam penentuan dan pembentukan berdasarkan kepada musyawarah dan kesepakatan masyarakat desa itu sendiri. Dalam hubungan kemampuan organisasi pelaksanaan dengan tingkat keberhasilan Program Pengembangan

Kecamatan adalah organisasi pelaksana yang mempunyai kemampuan dan ketrampilan menjalankan standar dan tujuan kebijaksanaan dalam rangka memberikan fasilitasi dan manajemen pengelolaan program.

#### **7. Hubungan Komunikasi Program dengan Keberhasilan Program Pengembangan Kecamatan (PPK).**

Dalam hal komunikasi menurut Stan Kossen (1993:54) yang bertanggungjawab terhadap kelancaran atau efektifitas komunikasi adalah penerima pesan dan pemberi pesan. Penerima pesan maupun pemberi pesan merupakan komunikasi dua arah dalam pemahaman suatu program. Sehingga program itu akan bisa dilaksanakan dengan baik jika ada komunikasi program yang baik pula, untuk itu dimensi program bisa kami turunkan kedalam variabel komunikasi program. Hal ini juga dipertegas oleh Edwars III (1980:20) yang menyebutkan bahwa keberhasilan program ditentukan oleh beberapa variabel salah satunya adalah komunikasi.

Keberhasilan suatu program dapat dikatakan sukses jika program itu responsif terhadap masalah yang dihadapi oleh masyarakat, ini berarti antara output program dan kebutuhan kelompok sasaran harus terdapat kesesuaian. Dalam proses implementasi kebijakan peranan komunikasi cukup signifikan dalam keberhasilan program, karena keberhasilan dari tujuan dan sasaran sangat tergantung dari respon dan aktivitas masyarakat. Komunikasi adalah kunci sukses hubungan masyarakat sebab tidak akan terjalin suatu hubungan tanpa melalui proses komunikasi, adanya hubungan masyarakat, kelompok

sasaran, LKMD/TPKD dan fasilitator desa sangat bergantung kepada intensitas, efisiensi dan efektifitas komunikasi.

Semakin intens (mendalam) dan efisien serta efektif komunikasi akan semakin mampu masyarakat dalam menerima program dan memikul tanggungjawabnya, guna mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan dalam standar dan tujuan program. Salah satu pertimbangan pemilihan komunikasi sebagai variabel dalam penelitian ini didasarkan dari pandangan yang relevan dikemukakan oleh **Habermas** dengan "Teori Tindakan Komunikatif" dalam **Fadillah Putra (2001)**, menjelaskan secara terinci melihat bagaimana tumbuhnya sebuah lingkungan dan suasana komunikatif yang memungkinkan tegaknya demokrasi dalam masyarakat. Habermas berpegang pada pendapat bahwa sebuah masyarakat yang komunikatif menjadi tujuan universal masyarakat, penjelasan teknis masyarakat komunikatif diterangkan bahwa dalam masyarakat harus ada argumentasi yang efektif baik dalam diskursus maupun kritik. Masyarakat komunikatif bukanlah masyarakat yang melakukan kritik lewat revolusi dengan kekerasan, melainkan lewat argumentasi.

Melihat konteks ini jelas bahwa masyarakat mempunyai peran penting dalam tegaknya demokrasi, mereka sebagai dunia publik mempunyai kesempatan yang sama dalam mengemukakan pendapatnya bagaimana tingkat kebutuhan dan kepentingannya sebagai subyek dan obyek pembangunan itu sendiri. Masyarakat tidak lagi merasa terbelunggu mereka mempunyai kebebasan, tetapi kebebasan yang tidak diartikan secara absolut

tetapi lebih terarah kepada hal yang rasional. Kebebasan itu bisa menjadi terkontrol apabila ada transparansi dan kepercayaan, nilai-nilai kepercayaan ini menjadi hal yang sangat penting akan adanya komunikasi yang efektif.

Komunikasi dalam konteks Program Pengembangan Kecamatan (PPK) seperti dikemukakan dimuka terkait erat dengan perubahan sosial yaitu transparansi dan demokratisasi dalam paradigma pembangunan ekonomi berdimensi kerakyatan. Komunikasi program disini lebih menekankan kepada adanya interaksi sosial yaitu situasi sosial, perubahan sosial dan lingkungan sosial. W.A. Gerungan (1991) dalam Novel Ali (1986) berpendapat bahwa situasi sosial adalah tiap situasi dimana terdapat saling hubungan antara manusia yang satu dengan yang lain, disini interaksi sosial didefinisikan sebagai suatu hubungan antara dua atau lebih individu manusia dimana kelakuan individu yang satu mempengaruhi, mengubah, memperbaiki kelakuan individu yang lain atau sebaliknya. Komunikasi dilihat dari aspek sosial adalah komunikasi yang merupakan percakapan antara pribadi, media rakyat, iklan, berbagai perkumpulan tradisional dan sebagainya.

**8. Hubungan Partisipasi Masyarakat, Kemampuan Organisasi Pelaksana dan Komunikasi Program dengan Keberhasilan Program Pengembangan Kecamatan (PPK).**

Secara umum pembangunan diharapkan menaikkan taraf hidup, kecerdasan, dan kesejahteraan seluruh rakyat dengan makin merata dan adil serta untuk meletakkan landasan yang kuat bagi tahap pembangunan berikutnya. Jadi pembangunan merupakan usaha untuk menaikkan kualitas

hidup secara kesinambungan (*sustainable*). Program Pengembangan Kecamatan (PPK) dipandang oleh pemerintah sebagai pemrakarsa kebijakan yang akan mampu mengatasi penanggulangan kemiskinan dengan bertumpu pada program pemberdayaan masyarakat, dengan mengembangkan kegiatan ekonomi produktif di desa serta penguatan kelembagaan bagi organisasi pelaksana sehingga diharapkan keberhasilan program mampu memberdayakan masyarakat dalam pengelolaan pembangunan.

Hubungan partisipasi masyarakat dengan keberhasilan program merupakan hubungan yang signifikan seperti yang dikemukakan oleh **Tjokroamidjojo (1990)** dalam **Onny S Priyono (1996)** adalah : (1) partisipasi aktif masyarakat dalam penentuan proses arah, strategi, dan kebijakan pembangunan, (2) keterlibatan dalam memikul beban dan bertanggungjawab dalam pelaksanaan, dan (3) keterlibatan dalam memetik hasil dan manfaat pembangunan secara adil. Melalui partisipasi masyarakat dalam pengelolaan PPK bisa kita katakan merupakan arah baru pembangunan yang berpihak kepada rakyat yang diharapkan mampu memecahkan masalah ketidakadilan dan kesenjangan. Seperti apa yang dikemukakan oleh

Keberhasilan program terkait juga dengan organisasi pelaksana, selanjutnya bagaiman hubungan tersebut dapat kami jelaskan, bahwa pelaksana menunjuk pada korp pejabat pelaksana tingkat menengah dan bawah yang memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan program di dalam suatu wilayah tertentu (**Grindle, 1980** dalam **Samodra Wibawa 1994**) lebih jauh organisasi pelaksana memiliki kedudukan yang strategis dan dapat

memberikan dampak yang menentukan pada keputusan-keputusan alokatif individual. Karena keberhasilan suatu proyek pembangunan tidak akan lepas dari pengaruh faktor kemampuan dari para pelaksana program dan khususnya dalam program PPK adalah penerima program.

Keberhasilan program selain berhubungan dengan partisipasi dan kemampuan organisasi pelaksana maka hubungan dengan komunikasi sangat penting yang dapat menentukan. Mengutip dari pendapat **Burn** dan **Stocker** (1961) ed **Rondenelli** (1990:201) bahwa keberhasilan pembangunan berhubungan erat dengan komunikasi yang merupakan interaksi sosial pada kelompok sasaran yang berada dalam jangkauan kegiatan. Lebih jauh **Rondenelli** melihat juga bahwa hubungan lain yang terkait erat adalah bagaimana kemudian masyarakat sebagai kelompok sasaran sekaligus juga sebagai organisasi pelaksana memiliki kemampuan kapasitas yang dikembangkan. Secara ringkas bangun teori yang dikembangkan untuk dasar dalam mendefinisikan kedalam konsep dan definisi operasional, lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar dibawah ini :



## B. Hipotesis

Hipotesis merupakan alat yang cukup penting dalam suatu penelitian, yaitu sebagai pengarah bagi suatu penelitian empirik. Karena pentingnya peran hipotesis tersebut maka perumusan suatu hipotesis harus memperhatikan beberapa syarat antara lain dapat menggambarkan hubungan antara variabel, dapat diuji berdasarkan data empirik dan memberikan petunjuk bagaimana pengujian tersebut, yang berarti variabel-variabel dapat diukur, arah hubungannya cukup jelas dan hipotesis pada hakekatnya merupakan kesimpulan sementara tentang hubungan dua variabel atau lebih (Singarimbun, 1995).

Oleh karena itu seyogyanya hipotesis disajikan dalam bentuk pernyataan yang menghubungkan secara eksplisit maupun implisit, satu variabel dengan satu atau lebih variabel lainnya.

Menurut Hadari Nawawi (1983) perumusan hipotesis tidak cukup hanya dinyatakan dalam bentuk hipotesis Nol, tetapi hipotesis yang cerdas harus mampu menentukan dugaan tentang sifat-sifat atau ciri-ciri yang sama/berbeda yang mampu menunjukkan/menetapkan perbedaan atau persamaan antara dua atau beberapa variabel.

### 1. Hipotesis Verbal

#### a) Hipotesis Minor

- 1) Ada hubungan partisipasi masyarakat dengan keberhasilan program pengembangan kecamatan (PPK).

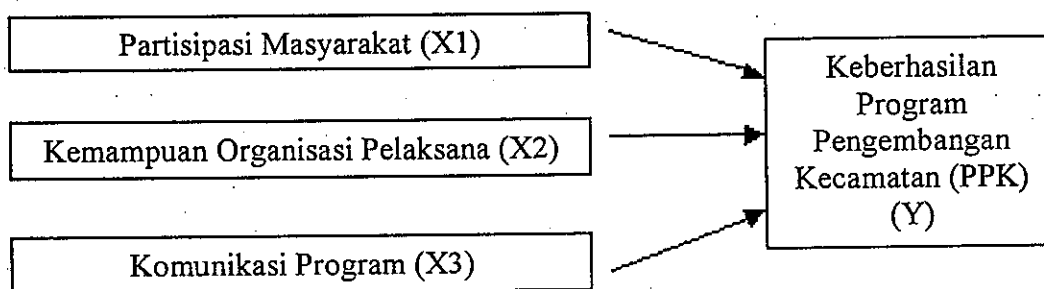
- 2) Ada hubungan kemampuan organisasi pelaksana dengan keberhasilan program pengembangan kecamatan (PPK).
- 3) Ada hubungan komunikasi program dengan keberhasilan program pengembangan kecamatan.

b. Hipotesis Mayor

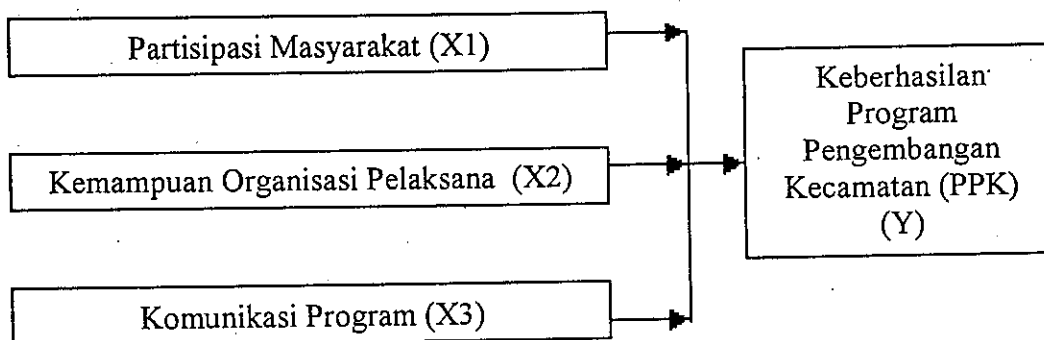
Ada hubungan antara partisipasi masyarakat, kemampuan organisasi pelaksana, serta komunikasi program dengan keberhasilan Program Pengembangan Kecamatan (PPK).

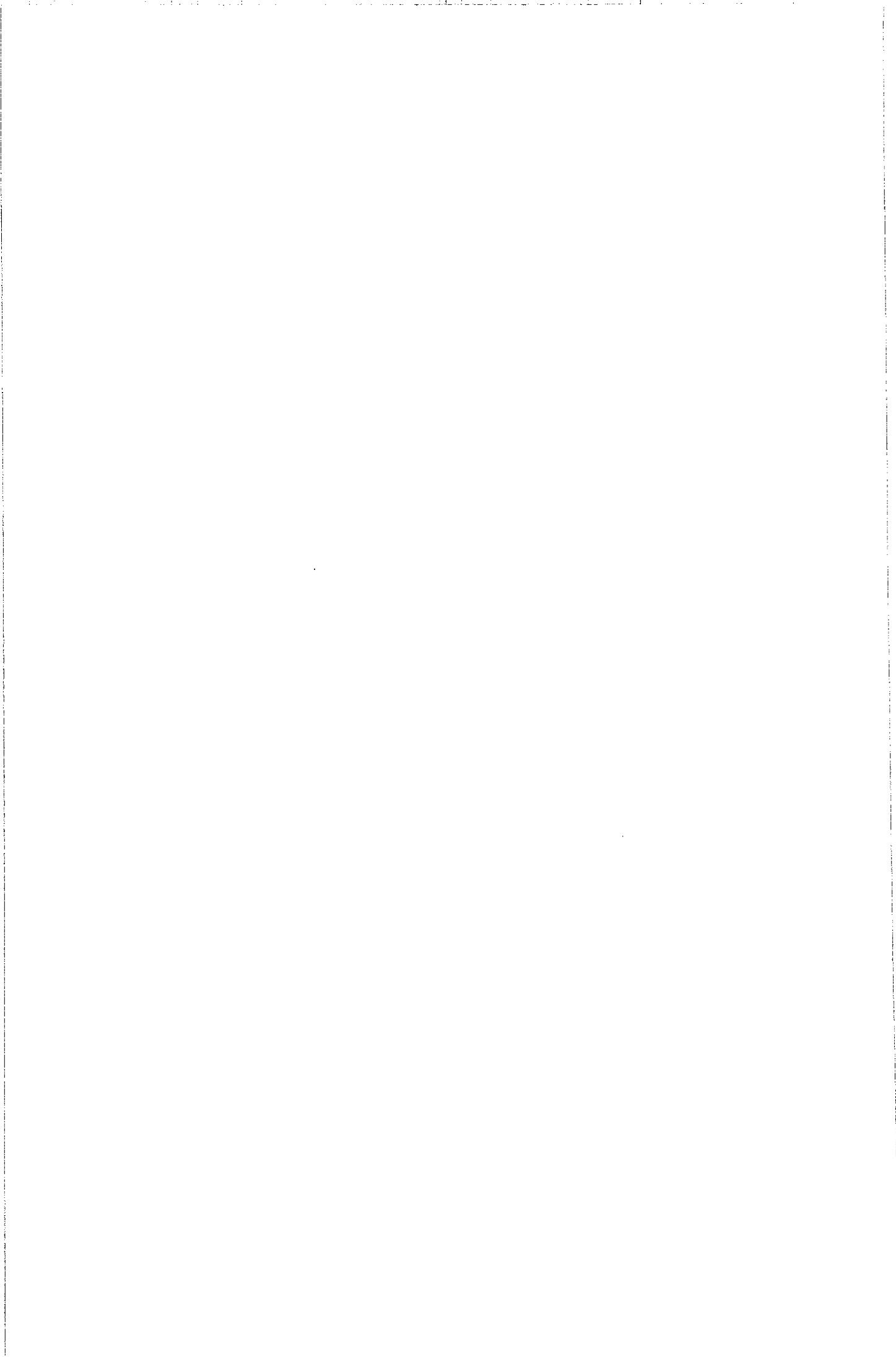
2. Hipotesis Geometri

a) Hipotesis minor



b) Hipotesis mayor





## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Rancangan Penelitian**

Dalam penelitian ini rancangan yang digunakan adalah penelitian ekplanasi. Penelitian ini berangkat dari masalah yang ada guna menjelaskan fenomena berdasarkan data yang akan digeneralisasi melalui metodologis akan digunakan metode penelitian kuantitatif dan kualitatif. Metode kuantitatif digunakan untuk menjelaskan hubungan antara keempat variabel yang diteliti, sedangkan metode kualitatif digunakan untuk menjelaskan makna hubungan yang diuji.

Penelitian ini diharapkan bersifat obyektif dengan data yang akurat dan valid (data yang terkumpul sama dengan data yang ada pada obyek penelitian) sehingga bisa mendapatkan nilai keterandalan dan kepercayaan yang tinggi. Untuk maksud tersebut dalam pendataan akan digunakan dengan instrumen penelitian. Dari data yang ada akan dianalisis dengan perhitungan statistik untuk mendeskripsikan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai hubungan antara varibe yang diteliti.

#### **B. Ruang Lingkup Penelitian**

Program PPK adalah kebijakan pemerintah dalam rangka menanggulangi kemiskinan secara nasional melalui pemberian modal untuk pengembangan kegiatan usaha produktif dan pembangunan prasarana serta sarana yang mendukung kegiatan sosial ekonomi perdesaan, salah satu

penekanannya adalah usaha peningkatan partisipasi masyarakat untuk merencanakan, melaksanakan dan melestarikan kegiatan program PPK dan meningkatnya kemampuan lembaga dan aparat di tingkat desa untuk mengkoordinasikan dan memberdayakan masyarakat dalam melaksanakan keberhasilan program kegiatan PPK.

Ruang lingkup penelitian ini adalah didasari oleh teori kesesuaian yang dikembangkan oleh David Korten dalam hubungan keberhasilan program pengembangan kecamatan (PPK) di Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan. Variabel yang akan digunakan adalah seperti apa telah diuraikan di muka yaitu Partisipasi Masyarakat, Kemampuan Organisasi Pelaksana, dan Komunikasi program sebagai variabel bebas serta Keberhasilan Program Pengembangan Kecamatan (PPK) di Kecamatan Gubug sebagai variabel terikat.

### **C Lokasi Penelitian**

Penentuan lokasi penelitian ini dimaksudkan untuk mempertajam ruang lingkup pembahasan sehingga bisa didapatkan fenomena yang spesifik nyata terjadi yaitu gambaran keberhasilan pembangunan PPK. Disamping itu lokasi penelitian akan memperhatikan beberapa aspek seperti daya jangkauan penelitian, waktu yang tersedia, dukungan data.

Dalam penelitian studi keberhasilan PPK dilaksanakan di Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan. Lokasi ini dipilih karena berdasarkan observasi dan wawancara dengan Tim Koordinator PPK tingkat Kabupaten beserta Konsultan Manajemen PPK dan didasarkan pada data, permasalahan dan

fenomena yang terjadi yang oleh penulis anggap akan tepat sesuai dengan tema penelitian.

#### **D. Variabel Penelitian**

##### **1. Klasifikasi Variabel.**

- a. Keberhasilan Program Pengembangan Kecamatan (PPK) sebagai variabel Dependen (Y)
- b. Partisipasi Masyarakat sebagai variabel independen (X1)
- c. Kemampuan Organisasi pelaksana sebagai variabel independen (X2)
- d. Komunikasi Program sebagai variabel independen (X3)

##### **2. Definisi Konseptual.**

- a. Keberhasilan Program Pengembangan Kecamatan (PPK) adalah tingkat kemampuan masyarakat atau kelompok masyarakat miskin dalam pengelolaan program dan upaya meningkatkan pendapatan serta menumbuhkan ekonomi produktif.
- b. Partisipasi Masyarakat adalah dukungan anggota masyarakat atau kelompok sasaran berupa peran serta aktif dalam pikiran, tenaga, keahlian, waktu, biaya dan jasa dalam pengelolaan program PPK.
- c. Kemampuan Organisasi Pelaksana adalah tingkat kemampuan pemahaman, ketrampilan/kecakapan yang dimiliki oleh organisasi pelaksana.
- d. Komunikasi program adalah capaian transformasi informasi dua arah antara komunikator dan penerima pesan baik langsung maupun tidak

langsung melalui media cetak dan elektronika serta oleh organisasi pelaksana dan kelompok sasaran.

### 3. Definisi Operasional.

#### a. Variabel Dependent

“Keberhasilan Program Pengembangan Kecamatan (PPK)” diukur melalui :

- 1) Meningkatnya peran serta masyarakat masyarakat/kelompok sasaran dalam pengelolaan program PPK.
  - Tingkat pengetahuan dan pemahaman program PPK
  - Tingkat kesesuaian kebutuhan
  - Tingkat penerimaan program
  - Tingkat pengembangan program
  - Tingkat pelestarian program
  - Tingkat kemanfaatan kegiatan
  - Tingkat akuntabilitas.
- 2) Meningkatnya usaha ekonomi produktif pada masyarakat.
  - Bertambahnya jenis kegiatan usaha kelompok sasaran
  - Berkembangnya iklim ekonomi desa
- 3) Meningkatnya sarana dan prasarana pendukung ekonomi produktif.
  - Meningkatnya kualitas sarana prasarana penunjang ekonomi desa
  - Lancarnya kegiatan ekonomi desa

4) Meningkatnya pendapatan kelompok sasaran dan masyarakat diluar kelompok sasaran.

- Meningkatnya pendapatan anggota kelompok sasaran.
- Meningkatnya pendapatan masyarakat diluar kelompok sasaran.

b. Variabel Independent

1) Partisipasi Masyarakat diukur melalui :

a) Meningkatnya peran serta aktif kelompok sasaran dan masyarakat dalam sumbangan pikiran.

- Tingkat kehadiran/keaktifan dalam kegiatan
- Kebebasan berbicara dan mengemukakan pendapat
- Tingkat keterlibatan masyarakat dalam UDKP

b) Meningkatnya dukungan terhadap tenaga dan biaya

- Tingkat gotong royong masyarakat
- Tingkat sumbangan tenaga dan biaya.

c) Meningkatnya kebersamaan dalam pengembangan program

- Tingkat kesadaran pengembangan dana bantuan.
- Tingkat kesadaran pemeliharaan hasil-hasil kegiatan program.

2) Kemampuan Organisasi Pelaksana, diukur melalui

a) Tingkat pemahaman program oleh Organisasi pelaksana

b) Tingkat kemampuan organisasi pelaksana

- Tingkat kesesuaian pendampingan

- Tingkat kemampuan teknis
  - Kemampuan pengembangan kegiatan
  - c) Tingkat kecakapan organisasi pelaksana
    - Tingkat menggali dukungan masyarakat
    - Tingkat kesesuaian pembentukan kelompok sasaran
  - d) Tingkat ketrampilan organisasi pelaksana
    - Tingkat ketrampilan kelompok sasaran
- 3) Komunikasi program, diukur melalui :
- a) Tingkat kelengkapan atau kuantitas informasi program
  - b) Tingkat pemahaman informasi melalui media elektronika
  - c) Tingkat pemahaman informasi melalui media cetak
  - d) Tingkat pemahaman informasi langsung dari organisasi pelaksana
    - Tingkat pemahaman informasi secara lesan oleh fasilitator atau sesama anggota kelompok sasaran.
    - Tingkat pemahaman bimbingan fasilitator.

#### **E. Jenis dan Sumber Data**

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan data primer dan skunder :

- 1 Data primer, data yang langsung diperoleh dari responden pada pengelolaan program PPK di Kecamatan Gubug, melalui kuesioner kepada responden.

- 2 Data skunder, data yang bersumber selain dari sumber primer, yaitu berasal dari laporan program, evaluasi program, unit pengelola, fasilitator, konsultan dan Tim koordinasi.

#### **F. Instrumen Penelitian**

Dalam penelitian ini instrumen yang digunakan peneliti adalah :

1. Kuesioner yaitu instrumen yang digunakan untuk pengambilan data dengan menggunakan daftar pertanyaan yang baik bersifat tertutup maupun terbuka dimana responden tinggal mengisi jawaban sesuai dengan realita yang ada.
2. Dokumentasi yaitu instrumen yang berguna untuk mendapatkan data faktual dari catatan yang ada dalam semua proses kegiatan program.

#### **G. Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel**

Populasi menurut Sugiyono (2000) adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditentukan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Dalam penelitian ini yang disebut populasi adalah mereka kelompok sasaran penerima bantuan yang ada di seluruh Kecamatan Gubug di 9 desa. Kelompok sasaran secara keseluruhan berjumlah 103 kelompok dengan perincian dalam tabel II.3. Sedangkan sampel adalah sebagian dari unit analisa yang diselidiki dapat mewakili populasi (bersifat representatif). Sebab bila tidak representatif ibarat orang buta disuruh menyimpulkan karakteristik gajah.

Tetapi apabila dana tenaga dan waktu terbatas maka tidaklah mungkin untuk mengambil sampel yang besar, dan ini berarti presisinya akan menurun (Singarimbun, 1995:150). Lebih lanjut dalam menentukan besarnya sampel Singarimbun menyatakan :

“ ... besarnya sampel yang harus diambil untuk mendapatkan data yang representatif, beberapa peneliti menyatakan bahwa besarnya sampel- tidak boleh kurang dari 10 %, tetapi ada juga ahli lain yang menyatakan sampel minimal 5 % dari satuan elemen dari populasi (I.B Mantra dalam Masri Singarimbun,1989:106)

Menurut Harry King dalam Sugiyono, (2000:64) dalam menentukan sampel tidak hanya didasarkan atas kesalahan 5% saja tetapi bervariasi sampai dengan 15 % dengan populasi setingginya 200.

Dengan memperhatikan dari beberapa pandangan dan ketentuan yang dikemukakan oleh beberapa ahlinya seperti di muka, maka dalam penentuan sampel dipergunakan *dengan random sampling* karena semua populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata sebab populasi dianggap homogen. Dari tiap kelompok populasi di tiap desa kita pilih sejumlah anggota tertentu secara acak dan tiap anggota kelompok tersebut mempunyai *probability* yang sama untuk menjadi sampel.

Dengan menghubungkan penentuan sampel secara *random sampling* dan dasar dari teori Harry King dengan *Nomogramnya*. Sehingga dalam penelitian ini bisa dihitung dengan kepercayaan sampel dalam mewakili ditetapkan sampai dengan 91%, dengan jumlah populasi yang ada yaitu 103 kelompok sasaran. Maka sesuai ketentuan dari Nomogram Harry King ditulis Sugiyono,(2000:66) penghitungannya adalah  $0,40 \times 103$  (populasi) =

41,2 sampel dibulatkan menjadi 40. Penghitungan secara rinci dapat dilihat dalam tabel 2 dibawah ini :

Tabel . III. 1  
Penetapan Sampel Penelitian PPK di Kecamatan Gubug

No	Desa	Populasi Kelompok sasaran	Proposive sampel (40%)	Sampel (pembulatan)
1	Tlogomulyo	13	5,2	5
2	Ringinharjo	14	5,6	6
3	Baturagung	23	9,2	9
4	Jatipecaron	12	4,8	5
5	Kunjeng	8	3,2	3
6	Rowosari	8	3,2	3
7	Papanrejo	12	4,8	5
8	Mlilir	7	2,8	3
9	Saban	6	2,4	3
	Jumlah	103	41,2	42

Sumber : Diolah dari Laporan Pelaksanaan PPK Kab. Grobogan Th 2001.

#### H. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan tiga cara yaitu :

1. Kuisioner, yaitu pengumpulan data dengan membagikan kuisioner kepada responden.
2. Interview , dilakukan secara langsung untuk memperdalam data secara kualitatif.
3. Survey lapangan dilakukan pada semua wilayah study terpilih dan sesuai dengan pengambilan sampel, hal ini akan dipergunakan sebagai komparasi data skunder dengan kondisi faktual sehingga akan mengurangi bias penelitian.
4. Wawancara dengan Konsultan pendamping dan Tim Fasilitator/Koordinator untuk memperdalam data secara kualitatif.

## I. Teknik Analisa Data

Dalam menguji hipotesis penelitian, penulis akan menggunakan alat bantu komputer dengan Program SPSS Ver.10.01 teknik analisa digunakan teknik statistik Nonparametrik karena penulis berasumsi distribusi data tidak normal dan skala ordinal, dan karena skala pengukuran ordinal yang akan digunakan untuk korelasi tunggal dengan Korelasi Rank Kendall sedangkan korelasi ganda dengan *Koefisien Konkordansi Kendall*. Adapun rumus tersebut diuraikan secara singkat di bawah ini :

### 1. Koefisien Korelasi Rank Kendall Tau

Perhitungan korelasi sederhana menggunakan Koefisien Korelasi Rank Kendall Tau dengan rumus sebagai berikut :

$$\tau = \frac{S}{\frac{1}{2} N (N-1)}$$

Keterangan :

$\frac{1}{2} N (N-1)$  : kemungkinan skor maksimum

S : skor yang sebenarnya

N : jumlah sampel

$\tau$  : koefisien korelasi kendall.

Apabila terdapat nilai yang sama maka memakai rumus :

$$\tau = \frac{S}{\sqrt{\frac{1}{2} N (N-1) - T_x} \sqrt{\frac{1}{2} N (N-1) - T_y}}$$

Keterangan :

$T_x = \frac{1}{2} \sum t(t-1)$  banyaknya angka yang sama dalam kelompok pada X  
 dan  $T_y = \frac{1}{2} \sum t(t-1)$  = banyaknya angka sama dalam kelompok Y.

Uji Signifikansi.

Untuk uji signifikansi koefisien korelasi, karena distribusi yang dipergunakan mendekati normal akan menggunakan rumus "z" sebagaimana tersebut dibawah ini :

$$Z = \frac{\tau}{\sqrt{\frac{2(2N+5)}{9N(N-1)}}}$$

Kaidah hipotesis

$H_0$  : di tolak apabila harga " z " hitung lebih besar dari pada harga tabel " z "

$H_a$  : di terima apabila harga "z" hitung lebih besar atau sama dengan harga tabel. "z"

## 2. Koefisien Korelasi Konkordansi Kendall

Perhitungan korelasi berganda menggunakan koefisien Konkordansi Kendall (W) dengan rumus sebagai berikut :

$$W = \frac{s}{1/12k^2(n^3-n)}$$

Apabila terdapat nilai yang sama maka  $r_s$  (korelasi ganda) memakai rumus :

$$W = \frac{s}{\{1/12 k^2 (n^3 - n)\} - k \sum \frac{T}{T}}$$

Dimana  $\sum T$  membuat kita menjumlahkan harga-harga T untuk kesemua k atau rangking data penelitian.

**Keterangan:**

$$s = \sum Ri^2 - Ri)^2 / n$$

R = jumlah rangking

k = banyak variabel yang di korelasikan

n = banyak kolom

$$T = (\sum t^3 - t) / 12$$

**Uji Signifikansi**

Untuk uji signifikan Koefisien Konkordansi Kendall dilakukan dengan memasukkan harga "W" ke dalam rumus Chi Kuadrat yaitu

$$X^2 = k (n-1) W$$

Keterangan :

$X^2 = \text{Chi Square}$

k = banyaknya himpunan

n = jumlah responden

W = Koefisien Konkordansi Kendall

**Kaidah Hipotesis**

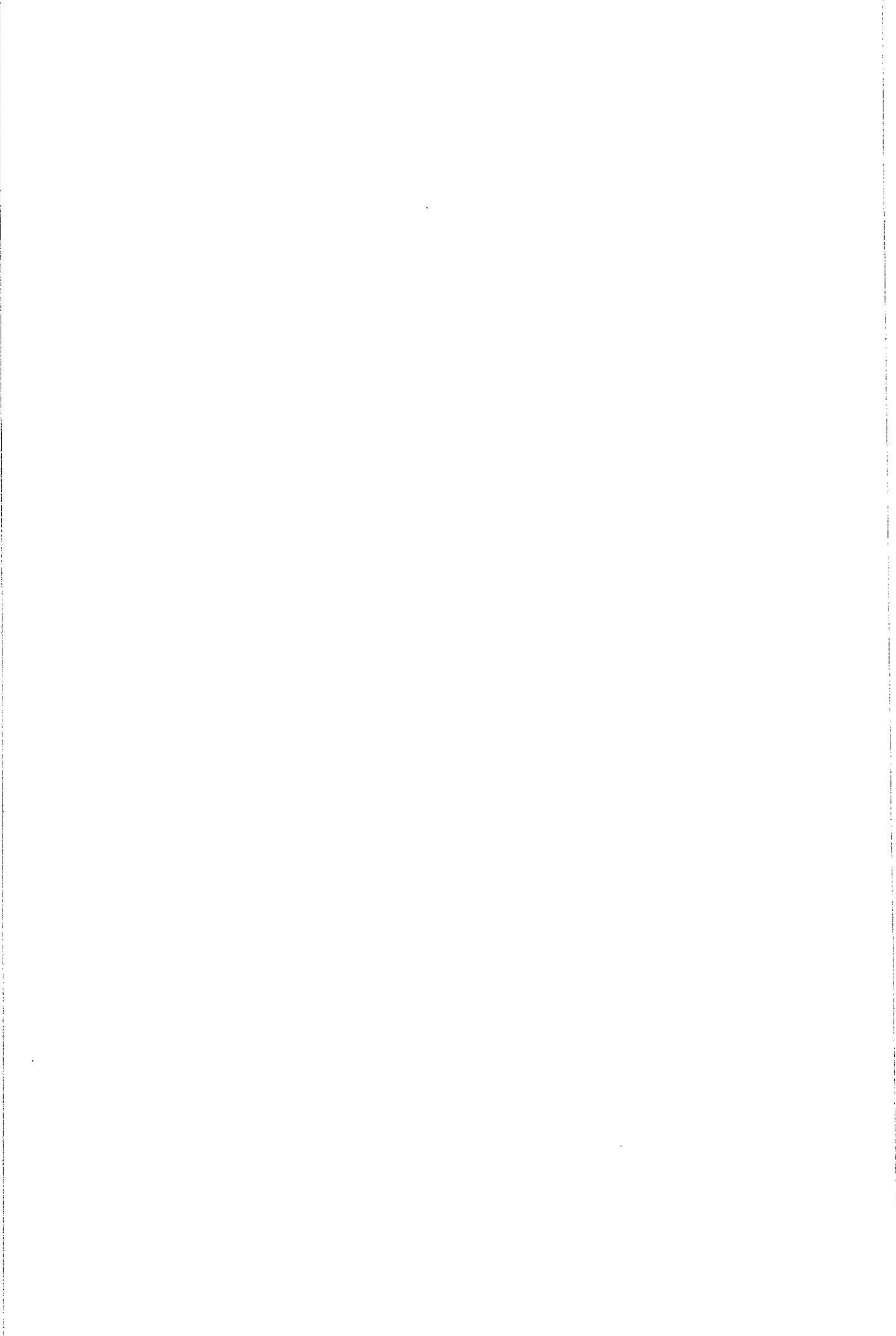
Ho : di tolak apabila harga "  $X^2$  " hitung lebih besar dari pada harga tabel "  $X^2$  " dengan taraf signifikan 1% dan 5 % sedangkan Ha diterima.

Dalam skala pengukuran akan kami pergunakan dasar pengukuran yang berpedoman skala Linkert. Untuk maksud tersebut dipilih 4 item jawaban untuk setiap pertanyaan diberikan skor yang berbeda dari 1 (satu) sampai 4 (empat) dengan penghitungan skor sebagai berikut :

- a. Setuju memiliki skor 4 (empat)
- b. Cukup setuju memiliki skor 3 (tiga)

- c. Kurang setuju skor 2 (dua)
- d. Tidak setuju skor 1 (satu)

Kemudian untuk pengolahan dan perhitungan data penyusun penulis akan menggunakan bantuan komputer program SPSS Ver.10.01, hal ini kami maksudkan untuk efektifitas dan efisiensi dalam penelitian.



## BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

### A. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Pemerintah Kabupaten Grobogan terdiri dari 19 Kecamatan satu Diantaranya adalah Kecamatan Gubug dengan luas wilayah 71,112 Km dengan jumlah penduduk 73.200 yang terdiri dari penduduk laki-laki 36.184 dan penduduk perempuan 37.016 orang. Jumlah penduduk miskin data tahun 2001 sebesar 20.549 orang atau (31,75 %) terhadap penduduk desa di Kecamatan Gubug. Tingkat pendidikan di Kecamatan Gubug rata-rata penduduk bisa dilihat dari tingkat pendidikan terakhir yang ditamatkan oleh penduduk yang terdiri dari tidak tamat SD (13,41 %), tamat SD (38,27 %), (SLTP 15,07 %), (SLTA 7,75 %), (DI/D3 0,73%) dan Sarjana (0,48 %). Dari 44.388 orang miskin di Kecamatan Gubug tingkat pendidikan penduduk yang berpendidikan SD ada (85,23 %) sedang yang pendidikan tertinggi sampai dengan SLTA sebesar (14,77 %) . Status pekedaan penduduk di Kecamatan Gubug yang bekeada sebesar 35.731 orang (48,81%) adalah mereka yang mandiri dan semi mandiri terdiri dari tingkat pekedaaMya yaitu berusaha /bekeada sendiri, berusaha dengan dibantu bw-uh tidak tetap dan berusaha dibantu buruh tetap sebesar (44,94 %) dan mereka yang berstatus buruh yaitu buruh/karyawan/pekeada dibayar dan pekerja tidak dibayar ada (55,06 %).

Untuk mengetahui secara lebih detail tentang kondisi masyarakat berdasarkan tingkat pendidikan Kecamatan Gubug dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel IV. 1  
Kondisi Penduduk Kecamatan Gubug Th 2001

Nama Desa	JMI Penduduk	Penduduk Miskin	Pendidikan		
			SD	SLTP/ SLTA	DI/ Sa~ana
Penadaran	3.849	1.222	2.671	248	4
Gelapan	1.659	1.044	853	325	10
Ngroto	4.473	1.019	2.197	1.360	27
Ginggangtani	3.816	891	1.908	1.033	24
Jekerto	2.854	688	1.092	1.040	76
Saban	2.206	815	1.109	531	20
Arifir	3.811	942	1.452	1.147	34
Kemiri	3.265	866	1.431	1.089	31
Papanrejo	2.120	1.044	1.107	502	13
Kunjeng	2.886	891	1.448	519	19
Trisari	2.459	1.171	1.433	306	15
Kuwaron	7.625	1.069	3.721	2.209	153
Rowosari	2.663	866	1.329	673	28
Gubug	8.466	866	3.816	3.160	358
Pranten	1.839	1.069	1.026	346	9
Jatipecaron	1.968	942	1.031	298	15
Baturagung	5.104	1.044	2.939	590	18
Tambakan	2.848	1.044	1.705	304	15
Ringinkidul	1.568	1.069	903	278	6
Ringinharjo	3.269	891	1.988	476	11
Tlogomulyo	4.452	1.095	2.672	366	16
Jumlah	73.200	20.549	37.831	16.709	882

Sumber data: BAPPEDA Kab. Grob. Th 2001.

Tabel IV.2

Tingkat Pendidikan Organisasi LKMD  
Tim Pelaksana Kegiatan Desa (TPKD) di Kecamatan Gubug

No	Nama Desa	Jumlah Pendidikan Yang ditamatkan			
		SD	SLTP	SLTA	S1
1	Tlogomulyo	-	3	2	1
2	Ringinghado	-	2	5	-
3	Baturagung	-	1	6	-
4	Jatipecaron	-	-	7	-
5	Kunjeng	-	1	6	-
6	Rowosari	-	2	5	-
7	Papanrejo	-	2	4	1
8	Nflifir	-	3	3	1
9	Saban	-	2	5	-
	Jumlah	0	15	43	3

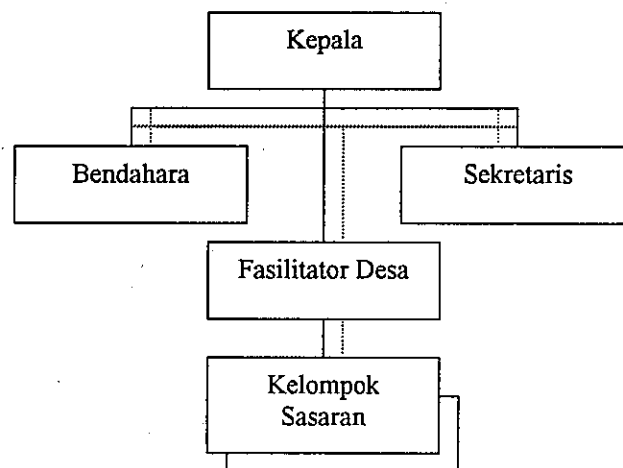
*Sumber Data: Lapaoran kegiatan PPK Kec. Gubug Th. 2001.*

Organisasi pelaksana pembangunan PPK yang ada di tingkat Kecamatan terdiri dari Camat sebagai penanggungjawab pelaksanaan program di tingkat kecamatan, Kasi PMD sebagai penanggungjawab operasional kegiatan (PJOK), Fasilitator Kecamatan dan Asisten fasilitator yang ditunjuk oleh konsultan kabupaten dan unit pengelola kegiatan (UPK) yang anggotanya ditunjuk secara musyawarah dalam forum UDKP tingkat Kecamatan. Kedudukan dan fungsi UPK adalah penanggungjawab terhadap pelaksanaan kegiatan M di desa-desa, sedangkan mekanisme kinerjanya dapat dilihat pada table dibawah. Struktur organisasi desa dinamakan Tim Pelaksana Kegiatan Desa (TPKD) terdiri dari seorang penasehat diangkat dari unsure kepala desa, ketua umum diangkat dari ketua 1 LKMD, seorang ketua pelaksana, seorang sekretaris, seorang bendahara dan dua orang fasilitator yang diangkat melalui musyawarah dalam forum musbangdes. Dari 9 desa secara keseluruhan telah membentuk kepengurusan dapat dilihat dalam

lampiran. Kondisi umum dari kepengurusan secara keseluruhan berjumlah 63 orang dan secara kualitas dapat dilihat dari tingkat pendidikan anggota pengurusan. Dari data yang ada dari organisasi pelaksana di desa tingkat pendidikan dari pengurusnya di 9 desa adalah untuk tingkat pendidikan sarjana hanya ada 2 (3,17%) sedang lainnya dari SD tidak ada SLTP 15 orang SLTA 43 orang

Dalarn menjalankan tugas pelaksanaan pembangunan PPK di desa maka kedudukan dan mekanisme eda telah diatur sesuai dengan pedoman pelaksanaan kegiatan PPK, dengan bagan mekanisme kedalam struktur organisasi sebagai berikut :

Gambar 3  
Struktur Tim Koordinasi Pelaksana Desa  
TPKD



Dari gambar tersebut diatas struktur organisasi nampak jelas kedudukan dan kewenangan, dalam pembentukannya juga telah memenuhi asas-asas organisasi serta pemilihan orang yang duduk didalam organisasi dilaksanakan secara demokratis. Dalam struktur telah diatur tugas pokok dan fungsi masing-masing serta hubungan dan mekanisme secara rinci dan jelas dalam pedoman pelaksanaan. Hal ini sesuai pandangan dari Sutarto (1993:44) suatu organisasi dapat berjalan dengan baik dan struktur organisasi sehat dan efisien haruslah melaksanakan menjalankan asas-asas organisasi.

Walaupun pedoman pelaksanaan PPK telah disusun dengan baik di tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa cukup lengkap, tetapi pada kenyataannya organisasi pelaksana berjalan kurang efektif terutama ditingkat desa. Hambatan ini dialami karena faktor kualitas sumber daya manusia yang ada, rata-rata dari mereka berpendidikan SLTP sampai dengan SLTA saja. Terlebih dalam penempatan orang kedalam struktur banyak jabatan rangkap, dimana bisa terjadi ketua TPKD merangkap menjadi Fasilitator dan lainnya. Hal ini menyebabkan organisasi kurang berjalan efektif seperti diuraikan Sutarto (1993).

Secara normatif organisasi pelaksana tidak terjadi kendala, tetapi kenyataannya masih sulit, merekrut orang-orang yang siap secara kualitas, yang mampu melaksanakan tugas dengan baik, hal ini sangat berpengaruh terhadap hasil pelaksanaan kegiatan. Sedangkan tanggapan atau kesiapan masyarakat diluar penduduk miskin rata-rata kurang perhatian karena sifatnya sukarela.

## B. HASIL PENELITIAN

### 1. Keberhasilan Program Pengembangan Kecamatan

Program Pengembangan Kecamatan (Program Pengembangan Kecamatan) yang merupakan salah satu program pengentasan kemiskinan mengandung prinsip Demokratisasi, *Capacity building*, mendorong inisiatif lokal penguatan kelembagaan formal & informal lokal dan penyediaan insentif ekonomi. Program Pengembangan Kecamatan sampai dengan sekarang telah berlangsung empat tahun sejak tahun 1998/1999 sebagai upaya pemerintah mempercepat penanggulangan kemiskinan dengan pengalokasian stimulan pada penduduk miskin melalui penguatan sistem pemerintahan yang baik, khusus di tingkat lokal (*Tocal governance*) dari partisipasi dengan kata lain penanganan ini diterapkan melalui aspek ekonomi, sosial budaya dan politik.

Pendekatan dari Program Pengembangan Kecamatan adalah desentralistik dan bernuansa *bottom up planning* dan pemberdayaan masyarakat yang hakekatnya adalah memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk dapat menentukan kebutuhan nyata mereka sebagai media pembelajaran masyarakat dan media institusi untuk kemudian memutuskan sendiri pilihan kegiatan secara demokratis.

Program Pengembangan Kecamatan dilaksanakan dengan tujuan untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan dengan peningkatan kemampuan kelembagaan masyarakat dan aparat melalui pemberian modal usaha untuk pengembangan kegiatan usaha ekonomi produktif dan pembangunan sarana dan prasarana yang mendukung pertumbuhan ekonomi di desa. Program

Pengembangan Kecamatan ini nampaknya sangat di tentukan oleh faktor kemampuan, komunikasi dan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Program Pengembangan Kecamatan. Untuk mengetahui seberapa tingkat keberhasilan Program Pengembangan Kecamatan pada Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan dapat dilihat hasil penelitian mengenai tingkat perkembangan jenis usaha yang ada sebagai mana tersebut dalam tabel berikut ini :

Tabel IV.3  
Pengaruh PPK terhadap Perkembangan jenis usaha

Tingkat Pengaruh	Frekwensi	%
Tidak berpengaruh	8	20,00
Kurang berpengaruh	21	52,50
Cukup berpengaruh	8	20,00
Berpengaruh	3	7,50
Total	40	100,00

*Di olah dari jawaban pertanyaan No.1*

Tabel di atas terlihat bahwa dari 40 responden terdapat 21 orang yang mengatakan bahwa Program Pengembangan Kecamatan ternyata kurang berpengaruh terhadap tingkat perkembangan jenis usaha yang ada di Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan, sedangkan proporsi kedua terdiri dari 8 orang responden menyatakan bahwa program Pengembangan Kecamatan cukup berpengaruh pada jenis usaha masyarakat dan 8 responden mengatakan bahwa Program Pengembangan Kecamatan tidak mempunyai pengaruh. Sehingga data tersebut dapat disimpulkan bahwa program Program Pengembangan Kecamatan tidak mempunyai pengaruh pada perkembangan usaha pada Kelompok sasaran maupun masyarakat pada umumnya. Hal ini

memungkinkan karena secara riil bantuan yang diberikan pada Kelompok sasaran belum dimanfaatkan secara efektif untuk kegiatan usaha, karena bantuan yang diterima secara nilai lebih kecil dan lebih cenderung dipergunakan pada pembangunan sarana prasarana yang ada di pedesaan yang kurang mendukung perkembangan ekonomi produktif, selain perkembangan jenis usaha faktor lain untuk mengukur keberhasilan Program Pengembangan Kecamatan adalah pengaruh tingkat perkembangan ekonomi desa sebagaimana dalam tabel berikut ini :

Tabel IV 4  
Pengaruh PPK terhadap perkembangan ekonomi desa

Tingkat Pengaruh	Frekwensi	%
Tidak berpengaruh	4	10,00
Kurang berpengaruh	22	55,00
Cukup berpengaruh	10	25,00
Berpengaruh	4	10,00
Total	40	100,00

*Di olah dari jawaban pertanyaan No.2*

Tabel di atas membuktikan bahwa ternyata, dari data penelitian dari 40 responden telah terungkap 22 orang ( 55%) mengatakan bahwa Program Pengembangan Kecamatan yang bertujuan meningkatkan ekonomi desa kurang dapat mempengaruhi perkembangan ekonomi riil desa, sedangkan pada proporsi yang kedua 10 orang ( 25 % ) menyatakan cukup berpengaruh. Meskipun demikian hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa program pengembangan Kecamatan belum dapat berpengaruh secara positif terhadap perkembangan ekonomi desa baik kelompok sasaran maupun masyarakat pada umumnya. Selanjutnya untuk mengetahui hasil penelitian pada tingkat

pengetahuan Program Pengembangan Kecamatan dapat dilihat tabel berikut ini:

Tabel IV 5  
Pengaruh Pengetahuan Kelompok Sasaran terhadap PPK

Tingkat Pengaruh	Frekwensi	%
Tidak mengetahui	5	12,50
Kurang mengetahui	18	45,00
Cukup mengetahui	9	22,50
Mengetahui	8	20,00
Total	40	100,00

*Di olah dari jawaban pertanyaan No.3*

Data penelitian di atas menunjukkan bahwa dari 40 responden terdapat 18 orang atau (45 %) yang mengungkapkan bahwa para kelompok sasaran kurang mengetahui tentang Program Pengembangan Kecamatan, sedangkan 9 orang atau (22,5 %) mengatakan cukup mengetahui tentang program pengembangan kecamatan. Dari data tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa kelompok masyarakat tidak mengetahui tentang program pengembangan kecamatan. Hal ini sangat dimungkinkan karena komunikasi antar kelompok sasaran dengan pendamping dirasakan kurang intens, selain itu mungkin cara penyampaian pesan atau isi dari materi masih kurang jelas, hal ini karena para peserta kelompok sasaran rata-rata berpendidikan dasar. Setelah mengetahui pengaruh dari objek sasaran program, kita akan melihat perkembangan hasil – hasil pembangunan sarana prasarana ekonomi desa penerima bantuan sebagaimana hasil penelitian pada tabel dibawah ini :

Tabel IV.6  
Pengaruh PPK terhadap Kualitas Pembangunan  
Sarana Prasarana Ekonomi Desa

Tingkat Pengaruh	Frekwensi	%
Tidak baik	4	10,00
Kurang baik	27	67,50
Cukup baik	5	12,50
Baik	4	10,00
Total	40	100,00

*Di olah dari jawaban pertanyaan No.4*

Perkembangan pembangunan sarana prasarana ekonomi desa sebagian besar merupakan bentuk rehabilitasi sarana yang sudah ada, kegiatan rehabilitasi pembangunan prasarana fisik berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pembangunan kurang berhasil dengan baik dari tingkat kualitas. Hal ini bisa dapat dimengerti karena rehabilitasi yang dilaksanakan seperti jalan dan pasar sangat terbatas sekali alokasi biaya, waktu dan SDM Pelaksana. Dengan kendala keterbatasan tersebut cukup berpengaruh pada capaian hasil rehabilitasi secara menyeluruh. Gejala ini diperlihatkan dari jawaban responden (67,5 %) menjawab kurang baik, yang menjawab baik dan cukup baik hanya (12,5 %) dan (10 %) serta (10%) menjawab tidak baik. Setelah mengetahui perkembangan sarana prasarana, perlu juga kita ketahui hasil pembangunan tersebut terhadap perkembangan ekonomi desa, sebagaimana tabel hasil penelitian dibawah ini :

Tabel IV. 7  
Pengaruh PPK dengan Kegiatan Perkembangan Ekonomi Desa

Tingkat Pengaruh	Frekwensi	%
Tidak berpengaruh	6	15,00
Kurang berpengaruh	18	45,00
Cukup berpengaruh	7	17,50
Berpengaruh	9	22,50
Total	40	100,00

*Di olah dari jawaban pertanyaan No.5*

Hasil pembangunan program PPK berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pembangunan sarana dan prasarana seperti jalan, jembatan dan sebagian kecil pasar terhadap perkembangan ekonomi desa secara langsung kurang signifikan, kurang tepat sasaran dalam mendukung secara langsung terhadap perkembangan ekonomi desa, karena sebenarnya kebutuhan mereka adalah daya beli yang rendah. Hal ini ditunjukkan dari 40 responden (45 %) menyatakan bahwa hasil pembangunan prasarana fisik kurang berpengaruh terhadap perkembangan ekonomi desa. (22 %) menyatakan berpengaruh, (17,5 %) menyatakan cukup berpengaruh dan (15 %) menyatakan tidak berpengaruh. Dalam pembangunan ekonomi desa ternyata faktor yang dapat berpengaruh langsung terhadap kelompok sasaran adalah bantuan bagi pengembangan usaha dengan memberikan bantuan modal usaha, peningkatan kualitas produksi dan aspek pemasaran. Keberhasilan PPK sesuai tujuannya maka akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat khususnya bagi kelompok sasaran, pengaruh tersebut dapat dilihat dari hasil penelitian pada tabel dibawah ini :

Tabel IV. 8.

Pengaruh PPK terhadap Peningkatan Pendapatan Kelompok Sasaran.

Tingkat Pengaruh	Frekwensi	%
Tidak meningkat	3	7,50
Kurang meningkat	18	45,00
Cukup meningkat	11	27,50
Meningkat	8	20,00
Total	40	100,00

*Di olah dari jawaban pertanyaan No.6*

Bagaimana usaha program PPK mampu meningkatkan pendapatan kelompok sasaran dapat dilihat dari jawaban responden, mereka sebagian besar menyatakan bahwa kegiatan program PPK tidak berpengaruh langsung terhadap peningkatan pendapatan dari 40 responden (45 %) menyatakan pendapatan pokmas sebagai adanya kegiatan PPK kurang meningkat, (27,5 %) yang menyatakan cukup meningkat (20 %) menyatakan meningkat dan hanya (7,5 %). Peningkatan pendapatan pokmas sangat dipengaruhi akan besarnya bantuan modal dan peran fasilitas dalam membantu pemasaran penguatan modal cukup signifikan terhadap kemajuan pendapatan karena permasalahan yang dihadapi oleh beberapa sasaran adalah lemahnya modal dan kualitas produksi. Salah satu tujuan keberhasilan PPK adalah adanya peningkatan pendapatan bagi masyarakat baik kelompok sasaran khususnya maupun diluar kelompok sasaran. Hal ini bisa dilihat dari hasil penelitian seperti tabel sebagai berikut :

Tabel IV. 9  
Pengaruh PPK terhadap Peningkatan Pendapatan  
Masyarakat Diluar Kelompok Sasaran.

Tingkat Pengaruh	Frekwensi	%
Tidak berpengaruh	4	10,00
Kurang berpengaruh	18	45,00
Cukup berpengaruh	14	35,00
Berpengaruh	4	10,00
Total	40	100,00

*Di olah dari jawaban pertanyaan No.7*

Pengaruh program terhadap masyarakat di luar kelompok sasaran menunjukkan pengaruh yang cukup signifikan hal ini dilihat dari pernyataan responden 45 % menyatakan kurang berpengaruh dan (35 %) cukup

berpengaruh dan yang menyatakan berpengaruh hanya (10 %) sama dengan pernyataan tidak berpengaruh (10 %). Berpengaruhnya peningkatan pendapatan pada sasaran di luar pokmas atau pengaruh masyarakat luas ditunjukkan oleh iklim ekonomi desa. Peningkatan prasarana dan penguatan modal bagi pokmas merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan tetapi pembagian besarnya dana untuk kegiatan harus dilaksanakan secara proporsional sesuai kebutuhan pengaruh tidak langsung yang menjadi tujuan adalah kepedulian dan kegotong royongan masyarakat terutama bagi mereka masyarakat yang tergolong mampu. Keberhasilan PPK selain faktor ekonomi maka diharapkan pula mampu mengatasi masalah sosial yang dalam hal ini adalah partisipasi masyarakat dalam mengatasi masalah kemiskinan kelompoknya sendiri, untuk itu dari dapat dilihat pada tabel hasil penelitian dibawah ini :

Tabel IV. 10

## Tingkat Pengembalian Modal Usaha oleh Kelompok Sasaran

Tingkat Pengembalian	Frekwensi	%
Tidak lancar	5	12,50
Kurang lancar	17	42,50
Cukup lancar	13	32,50
Lancar	5	12,50
Total	40	100,00

*Di olah dari jawaban pertanyaan No.8*

Setelah kita melihat pengaruh dampak hasil kegiatan program PPK keberhasilan program sesuai tujuan pemberdayaan masyarakat adalah pemanfaatan dana perguliran. Berdasarkan hasil penelitian tingkat kelancaran pengembalian modal yang bisa dikembangkan pada masing-masing anggota

pokmas (42,5 %) menyatakan kurang lancar, (32,5 %) cukup lancar (12,5 %) tidak lancar dan hanya (5 %) yang menyatakan bahwa pengembalian modal secara lancar. Pengembalian modal sangat tergantung pada tingkat kesadaran kelompok sasaran dan kemajuan usaha, kurang lancarnya pengembalian modal sebagian besar diakibatkan pada ketidakmampuan pokmas dalam mengembangkan usaha. Sebagian besar (55 %) kurang lancar dimana dalam satu tahun perguliran atau pengembalian modal tidak mencapai 75 %, sehingga sulit sekali program PPK bisa berkembang. Setelah kita ketahui tingkat pengembalian dana bantuan usaha bagi kelompok sasaran yang kurang lancar, kita perlu mengetahui juga ketepatan pengembalian dana bantuan karena hal ini berpengaruh terhadap kelancaran perguliran dana. Untuk hal ini bisa dilihat dalam tabel dibawah ini berdasarkan hasil penelitian :

Tabel IV. 11

## Tingkat Kedisiplinan Pengembalian Modal Usaha

Tingkat Pengembalian	Frekwensi	%
Tidak tepat waktu	6	15,00
Kurang tepat waktu	6	15,00
Cukup tepat waktu	21	52,50
Tepat waktu	7	17,50
Total	40	100,00

*Di olah dari jawaban pertanyaan No.9*

Ketepatan waktu pengembalian dana bergulir sangat dibutuhkan dalam upaya pengembangan kegiatan dimana tujuan yang diharapkan program mampu berkesinambungan. Berdasarkan hasil penelitian ketepatan waktu pengembalian (52,5 %) cukup tepat dan (17,5 %) tepat sedang (15 %) menyatakan cukup tepat dan (15 %) tidak tepat. Walaupun pengembalian

cukup lancar seperti analisis pada tabel 8 di atas, ternyata dalam ketepatan waktu pengembalian cukup tepat artinya bahwa mereka pokmas cukup mematuhi kesepakatan bersama antara pokmas yang terangkum dalam tata tertib, sehingga tanggung jawab Pokmas cukup baik dalam pengembangan program. Salah satu unsur keberhasilan PPK oleh kelompok sasaran adalah adanya pertanggungjawaban oleh kelompok sasaran, sebab bentuk pertanggungjawaban sudah diserahkan sepenuhnya kepada masyarakat, sehingga penting untuk diketahui bagaimana tingkat pertanggungjawaban pelaksanaan PPK oleh kelompok sasaran. Sesuai hasil penelitian dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel IV. 12  
Tingkat Laporan Pertanggungjawaban Kegiatan PPK  
oleh Kelompok Sasaran

Tingkat Pertanggungjawabn	Frekwensi	%
Tidak baik	3	7,50
Kurang baik	20	50,00
Cukup baik	13	32,50
Baik	4	10,00
Total	40	100,00

*Di olah dari jawaban pertanyaan No.10.*

Selain tanggung jawab terhadap hasil kegiatan ekonomi produktif, keberhasilan dapat dilihat dari tingkat tanggung jawab laporan kegiatan pembangunan yaitu tingkat transparansi hasil penelitian menunjukkan bahwa (50 %) menyatakan kurang bertanggung jawab (32,5 %) cukup tanggung jawab (10 %) bertanggung jawab dan (7,5 %) menyatakan tidak bertanggung jawab. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa masih ada ketidakpercayaan masyarakat atau kelompok sasaran terhadap para pengelola program,

walaupun para pengurus maupun pengelola mereka sendiri yang menentukan sebagian besar isi laporan sudah transparan tetapi tidak disusun dengan baik atau tidak lengkap hal ini sangat dipengaruhi oleh tingkat kualitas SDM yang rendah. Ketidakpercayaan masyarakat yang timbul sering diakibatkan pada peran sentral pengurus yang dalam pelaksanaannya masih ada unsur KKN. Selanjutnya salah satu pengaruh keberhasilan PPK adalah adanya peningkatan terhadap kemampuan sasaran dalam mengatasi permasalahannya, dalam hal ini dapat dilihat dari hasil penelitian terhadap kemampuan diskusi atau musyawarah oleh kelompok sasaran atau masyarakat. Hasil penelitian dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel IV. 13  
Tingkat Kesesuaian Hasil Musyawarah Terhadap Kebutuhan

Tingkat Kesesuaian	Frekwensi	%
Tidak sesuai	8	20,00
Kurang sesuai	21	52,50
Cukup sesuai	5	12,50
Sesuai	6	15,00
Total	40	100,00

*Di olah dari jawaban pertanyaan No. 11.*

Keberhasilan program akan sangat dipengaruhi oleh kesesuaian kebutuhan masyarakat, kegiatan yang dilaksanakan memang mendapatkan prioritas yang tepat bagi kelompok sasaran. Berdasarkan hasil penelitian kebutuhan riil terhadap hasil musyawarah (52,5 %) menyatakan kurang sinkron, (20 %) menyatakan tidak sinkron (12,5 %) menyatakan cukup sinkron dan (15 %) menyatakan sinkron. Menentukan kebutuhan riil dalam musyawarah memang sesuatu yang mudah, terlebih banyak sekali kepentingan yang harus diakomodasi tidak sinkronnya hasil musyawarah dengan kebutuhan

banyak dipengaruhi oleh hal-hal seperti tingkat kesulitan dalam menentukan prioritas program, sehingga akhirnya karena keterbatasan SDM sebagian besar peserta mengambil sikap untuk menentukan kegiatan yang habis pakai khususnya pembangunan fisik yang lebih mudah tingkat tanggung jawabnya dibandingkan dengan kegiatan ekonomi produktif. Setelah kita melihat tingkat keberhasilan terhadap kegiatan ekonomi produktif dan sosial, maka perlu juga kita ketahui bagaimana pengaruh hasil pembangunan sarana prasarana terhadap pengaruh langsung bagi pendapatan masyarakat. Hal ini dapat kita ketahui dari hasil penelitian seperti dalam tabel dibawah ini :

Tabel IV. 14  
Pengaruh Manfaat Hasil Pembangunan Sarana Prasarana PPK  
Terhadap Peningkatan Pendapatan Masyarakat

Tingkat Manfaat	Frekwensi	%
Tidak bermanfaat	4	10,00
Kurang bermanfaat	8	20,00
Cukup bermanfaat	24	60,00
Bermanfaat	4	10,00
Total	40	100,00

*Di olah dari jawaban pertanyaan No.12*

Keberhasilan kegiatan program terhadap peningkatan pendapatan adalah bagaimana kegiatan bisa memberikan manfaat langsung terhadap peningkatan pendapatan. Upaya peningkatan pendapatan masyarakat melalui kegiatan program berdasarkan hasil penelitian (60 %) menyatakan cukup bermanfaat (20 %) kurang bermanfaat (10 %) tidak bermanfaat dan (10 %) bermanfaat. Kemanfaatan langsung maupun tidak langsung bagi masyarakat terlihat pada tingkat kelancaran sarana transportasi, penyediaan fasilitas pemasaran dan bantuan modal serta administrasi yang baik, sedangkan

pengaruh tingkat pendapatan seperti terurai dalam analisis di depan lebih terarah pada kemanfaatan langsung dengan hasil-hasil pembangunan sarana prasarana PPK terhadap peningkatan pendapatan keluarga. Kemudian faktor yang sangat penting dalam keberhasilan PPK adalah perwujudan dari maksud dan tujuan program itu sendiri, yaitu bagaimana program tersebut mampu menumbuhkan peran masyarakat dalam memiliki dan melesterikan program untuk kesinambungan kegiatan di desa maupun di tingkat kecamatan. Keberhasilan ini dapat dilihat dari hasil penelitian seperti terurai pada tabel dibawah ini :

Tabel IV. 15

## Tingkat Pelestarian Kegiatan PPK

Tingkat Pelestarian	Frekwensi	%
Tidak baik	5	12,50
Kurang baik	25	62,50
Cukup baik	4	10,00
Baik	6	15,00
Total	40	100,00

*Di olah dari jawaban pertanyaan No.13*

Keberhasilan program dapat dilihat juga terhadap tingkat pelestarian hasil pembangunan, sesuai dalam tujuan dan sasaran pelestarian program merupakan unsur penting dalam program pemberdayaan masyarakat sebagai upaya memecahkan masalah kemiskinan. Berdasarkan hasil penelitian (65,5%) menyatakan tingkat pelestarian kurang baik(10%)menyatakan cukup baik ( 12,5 %) menyatakan tidak baik dan hanya (15%) yang menyatakan baik. Hasil ini memperlihatkan bahwa tingkat pelestarian program kurang berhasil dengan baik, hal ini sangat dipengaruhi oleh rendahnya tingkat kesadaran terhadap

dukungan atau kepemilikan terhadap setiap kegiatan pembangunan di desa, terutama rendahnya dukungan masyarakat luar kelompok sasaran. Kepedulian bagi mereka penduduk yang tergolong mampu untuk membantu dan memperhatikan terhadap kepentingan bersama dalam upaya memecahkan masalah kepentingan desa sangat rendah. Berbagai hal tersebut juga dipengaruhi oleh sikap dan mental masyarakat yang kurang tekun dan ulet. Kemudian bagaimana penerimaan kelompok sasaran terhadap kebijakan program yang diserahkan kewenangan penuhnya kepada masyarakat, hal ini merupakan prinsip utama dari PPK, adapun hasil penelitian dapat kita lihat pada tabel dibawah ini :

Tabel IV. 16  
Tingkat Penerimaan Program PPK

Tingkat Pelenerimaan	Frekwensi	%
Tidak menerima	4	10,00
Kurang menerima	14	35,00
Cukup menerima	13	32,50
Menerima	9	24,50
Total	40	100,00

*Di olah dari jawaban pertanyaan No.14*

Salah satu keberhasilan program sangat ditentukan oleh penerimaan program dari Pokmas penerima sasaran. Berdasarkan hasil penelitian bahwa program dapat diterima oleh masyarakat sesuai tujuan dan sarasannya apabila kita hubungkan dengan penerimaan program maka ada relevansinya. Hal ini ditunjukkan ternyata bahwa hasil penelitian penerimaan Pokmas menunjukkan dari hasil jawaban responden menerima program hanya (22,5 %) sedangkan (32,5 %) cukup menerima dan (35 %) kurang dapat menerima sedang (10 %)

tidak dapat menerima. Kurang dapat menerimanya program banyak disebabkan karena kurang pengetahuan masyarakat dan kurang jelasnya informasi yang dibutuhkan oleh mereka program pemberdayaan dalam PPK merupakan konsep pembangunan yang baru sehingga terlihat masyarakat belum siap baik itu dalam hal kuantitas maupun secara kualitas. kenyataan ini sangat dipengaruhi oleh tingkat kualitas SDM Pokmas maupun fasilitas di tingkat desa.

Kurang berhasilnya program Pengembangan Kecamatan tersebut sangat dipengaruhi hubungan dengan variabel bebas seperti partisipasi, kemampuan organisasi pelaksana dan komunikasi program sebagai berikut:

## 2. Partisipasi (X 1)

Untuk mengukur keberhasilan Program Pengembangan Kecamatan di Kecamatan Gubug dilihat dari tingkat frekwensi peserta dalam setiap kegiatan dan musyawarah UDKP di desa sebagaimana tersebut dalam tabel berikut ini

Tabel IV 17  
Tingkat Frekwensi Peserta Diskusi dalam PPK

Tingkat Kehadiran	Frekwensi	%
Tidak baik	4	10,00
Kurang baik	3	7,50
Cukup baik	23	57,50
Baik	10	25,00
Total	40	100,00

*Di olah dari jawaban pertanyaan No. 15*

Tabel di atas membuktikan, pada tingkat frekwensi kehadiran dalam rapat atau diskusi yang dilakukan oleh UDKP dan kelompok sasaran maupun LKMD dalam membahas program pengembangan ekonomi desa terungkap,

dari 40 responden, telah terungkap 23 orang atau (57,5 %) mengatakan cukup baik dan 10 orang mengatakan baik, sehingga dalam pertemuan kelompok sasaran cukup aktif dan baik. Meskipun demikian masih perlu ditingkatkan karena masih terdapat 7 orang yang mengungkapkan bahwa pertemuan tersebut kurang baik. Selanjutnya indikator keberhasilan program pengembangan kecamatan dapat dilihat dari indikator aktivitas kelompok sasaran dalam menentukan setiap kebijakan kelompoknya sebagaimana tabel dibawah ini :

Tabel IV.18  
Aktivitas Kelompok Sasaran dalam Diskusi/Pertemuan Rutin

Tingkat Aktivitas	Frekwensi	%
Tidak aktif	7	17,50
Kurang aktif	11	27,50
Cukup aktif	17	42,50
Aktif	5	12,00
Total	40	100,00

*Di olah dari jawaban pertanyaan No. 16*

Dalam tabel di atas membuktikan bahwa keterlibatan kelompok sasaran dalam keikutsertaan memberikan pandangan atau masukan dari 40 orang terdapat 17 orang ( 42,5% ) mengatakan cukup aktif sedangkan pada proporsi kedua menyatakan kurang aktif, sehingga dari tabel tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa keterlibatan kelompok sasaran dalam rapat sudah baik namun dari segi keberanian dalam mengemukakan pendapat atau pandangan dirasakan kurang baik. Indikator lain adalah tingkat kemampuan organisasi pelaksana Program Pengembangan Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan berikut ini. Indikator lain untuk mengetahui tingkat keberhasilan Program Pengembangan kecamatan adalah akan dilihat dari tingkat keterlibatan Forum U13KP dalam memfasilitasi kegiatan, hal ini dapat dilihat dari tabel berikut ini :

Tabel IV.19  
Peranan Kelompok Sasaran dalam Diskusi UDKP

Tingkat Peranan	Frekwensi	%
Tidak aktif	5	12,50
Kurang aktif	6	15,00
Cukup aktif	23	57,50
Aktif	6	15,00
Total	40	100,00

*Di olah dari jawaban pertanyaan No. 17*

Tabel di atas membuktikan bahwa hasil penelitian tentang tingkat keterlibatan U13KP dalam kegiatan Program Pengembangan Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan telah terungkap dari 40 responden, terdapat 23 (57,5%) orang yang menyatakan bahwa keterlibatan UDKP dalam kegiatan Pengembangan Program Kecamatan cukup aktif, sedangkan proporsi kedua 11 orang (27,5 %) mengungkapkan kurang aktif, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tingkat keterlibatan UDKP dalam Program Pengembangan Kecamatan sudah cukup baik, meskipun demikian perlu ditingkatkan, mengingat masih ada anggapan bahwa keterlibatan masih kurang baik, disamping itu untuk mencapai tingkat keberhasilan minimal keterlibatan UDKP harus berpredikat baik. Nilai-nilai penting dari prinsip partisipasi masyarakat adalah tingkat gotong royong masyarakat dalam melaksanakan semua kegiatan PPK, selanjutnya hasil penelitian dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel IV.20  
Tingkat Kegotongroyongan dalam Pelaksanaan PPK

Tingkat Frekwensi	Frekwensi	%
Tidak pernah	3	7,50
Kadang-kadang	6	15,00
Sering	15	37,50
Selalu ikut	16	40,00
Total	40	100,00

*Di olah dari jawaban pertanyaan No. 18*

Tingkat gotong royongan merupakan gambaran bentuk partisipasi masyarakat dalam keberhasilan program sebab tidak adanya dukungan masyarakat tentu akan berpengaruh melihat hal tersebut maka kegotong royongan masyarakat dalam setiap kegiatan menjadi hal yang penting. Hasil penelitian menunjukkan bahwa frekuensi gotong royong menunjukkan hal yang baik 40 % sangat sering melaksanakan (37,5 %) sering dan yang menjawab tidak pernah melaksanakan gotong royong hanya (7,5 %) dan kadang-kadang hanya (15 %) gotong royong banyak dilaksanakan melalui kegiatan pembangunan sarana prasarana fisik sedangkan untuk kegiatan pembangunan sarana prasarana fisik sedangkan untuk kegiatan ekonomi produktif gotong royong sulit dikembangkan karena bentuknya dilaksanakan usaha panjang sedang bentuk koperasi sulit untuk dikembangkan, keadaan ini juga berpengaruh terhadap penentuan kebijakan penentuan kegiatan yang lebih menyenangkan penanganan kegiatan fisik lebih mudah, dan menggantungkan khususnya bagi pengelola. Tingkat partisipasi lainnya dapat ditunjukkan melalaui bentuk kerelaan masyarakat dalam memberikan sumbangan baik materiil maupun inmateriil, hasil penelitian dapat kita lihat pada tabel berikut ini :

Tabel IV.21  
Tingkat Kerelaan Sumbangan Masyarakat

Tingkat kerelaan	Frekwensi	%
Tidak baik	4	10,00
Kurang baik	3	7,50
Cukup baik	8	20,00
Baik	25	62,50
Total	40	100,00

*Di olah dari jawaban pertanyaan No. 19*

Bantuan berupa tenaga dan biaya dari masyarakat juga berpengaruh terhadap optimalisasi kegiatan PPK, karena apabila dilihat dari jumlah anggaran tentunya tidak sepenuhnya memadai tetapi cukup terbatas baik secara kuantitas maupun kualitas hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 40 responden menyatakan bahwa sumbangan bantuan tenaga dan biaya sangat baik (62,5 %), (20 %) menyatakan baik dan (7,5 %) menyatakan kurang baik, serta hanya (10 %) yang menyatakan tidak baik. Hal ini memperlihatkan bahwa partisipasi masyarakat dalam menyukseskan kegiatan program sangat baik khususnya untuk pembangunan sarana prasarana fisik. Sedangkan untuk sumbangan bagi kegiatan di luar kegiatan pembangunan fisik kurang baik khususnya dukungan dari mereka yang di luar kelompok sasaran. Tetapi keberhasilan kegiatan ekonomi produktif pada dasarnya sangat ditentukan oleh setiap kelompok sasaran atau anggotanya, sedangkan sumbangan masyarakat bersifat tidak langsung. Setelah kita mengetahui peran masyarakat secara umum dalam kegiatan PPK, maka perlu kita lihat tingkat partisipasi kelompok sasaran itu sendiri dalam mengembangkan kegiatan untuk kesinambungan kegiatan, adapun hasil penelitian dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel IV.22  
Tingkat Perguliran Dana Bantuan oleh Kelompok Sasaran

Tingkat Pengembalian	Frekwensi	%
Tidak tertib	2	5,00
Kurang tertib	30	75,00
Cukup tertib	4	10,00
Tertib	4	10,00
Total	40	100,00

*Di olah dari jawaban pertanyaan No. 20*

Tingkat kemandirian kelompok sasaran bisa dilihat dari tingkat perguliran dana bantuan, disini terlihat gambaran tingkat tanggung jawab kedisiplinan dan kepercayaan hasil penelitian menunjukkan bahwa (75%) berjalan kurang tertib, (5 %) tidak tertib, (10 %) cukup tertib dan hanya (10 %) yang tertib. Ketertiban perguliran dana bantuan oleh kelompok sasaran menunjukkan tingkat partisipasi cukup kurang, kemandirian dan kedisiplinan kurang tertuang dalam setiap anggota kelompok sasaran. Kesulitan utama dalam kegiatan ekonomi produktif memang terjadi pada tingkat perguliran dana sehingga untuk menentukan anggota Pokmas sangat sulit yang merupakan dialihkan problem dimana sasaran yang ditentukan adalah penduduk miskin, tetapi karena kondisinya cukup sulit untuk berkembang dn secara kualitas dari mereka sangat rendah. Kemudian bentuk partisipasi masyarakat yang terpenting bagi kesinambungan kegiatan adalah bagaimana partisipasi masyarakat baik itu kelompok sasaran itu sendiri maupun masyarakat bukan kelompok sasaran, hasil penelitian dapat dilihat pada berikut ini :

Tabel IV.23

## Tingkat Pemeliharaan Hasil Kegiatan PPK

Tingkat Kesiediaan	Frekwensi	%
Tidak baik	5	12,50
Kurang baik	10	25,00
Cukup baik	18	45,00
Baik	7	17,50
Total	40	100,00

*Di olah dari jawaban pertanyaan No. 21*

Hasil pembangunan bagaimanapun baik hasilnya tanpa ada pemeliharaan yang baik maka tidak akan berkesinambungan dengan baik terhadap manfaat dan dampak pembangunan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (45 %) masyarakat cukup baik dalam kesediaan memelihara hasil pembangunan (17,5 %) menyatakan baik dan (25 %) kurang baik sedang yang menyatakan tidak baik hanya (12,5 %) kesediaan pemeliharaan tentunya menggambarkan tingkat kesesuaian kebutuhan masyarakat, mereka dapat memanfaatkan dan berdampak positif, sedangkan bagi mereka yang menjawab tidak baik atau kurang baik karena menganggap kurang sesuai dan kurang menguntungkan bagi mereka.

### 3. Kemampuan Organisasi ( X2)

Selain dimensi partisipasi faktor lain yang berhubungan dengan tingkat keberhasilan Program Kecamatan di Kabupaten Grobogan Kecamatan Gubug antara lain tingkat kemampuan organisasi, untuk mengetahui data penelitian seberapa tingkat hubungan kemampuan organisasi dapat dilihat padatable berikut ini:

Tabel IV.24  
Pemahaman Fasilitator Terhadap Tugas Pendampingan

Tingkat Kemampuan	Frekwensi	%
Tidak baik	3	7,50
Kurang baik	13	32,50
Cukup baik	16	40,00
Baik	8	20,00
Total	40	100,00

*Di olah dari jawaban pertanyaan No. 22*

Salah satu unsur untuk menilai suatu keberhasilan adalah bagaimana tingkat kemampuan organisasi pelaksana dalam pengelolaan program di sini salah satu kemampuan organisasi pelaksana adalah kemampuan dari fasilitatornya. Fasilitator yang baik tentunya mereka mempunyai kecakapan dan kemampuan yang lebih secara berkuantitas dan kualitas semakin tinggi tingkat pemahaman fasilitator terhadap program maka akan semakin baik dalam usaha mencapai tujuan dan sasaran dalam pengelolaannya. Dari hasil penelitian terhadap pemahaman fasilitator sebagai petugas pendamping bagi kelompok sasaran (32,5 %) menyatakan kurang baik dan (40 %) cukup baik, sehingga dapat dikatakan bahwa tingkat pemahaman fasilitator terhadap program cukup baik sebab yang menyatakan baik hanya (20 %) dan tidak baik (7,5. %). Kesempatan sangat dipengaruhi oleh kualitas SDM organisasi pelaksanaan yang rata-rata berpendidikan SLTA ke bawah sehingga tingkat kecakapan dan pemahaman cukup berpengaruh. Fasilitator sebagian besar adalah pengurus kelompok pengelola di desa, sehingga tingkat konsentrasi terhadap peran dan fungsi menjadi terbelah dengan bagaimana mengelola

administrasi kegiatan itu sendiri, sehingga terhadap kesempatan mereka untuk lebih intensif terhadap program menjadi kurang optimal. Walaupun ada pola pendampingan dari konsultan dan fasilitator di tingkat Kecamatan keadaannya relatif sama menjadikan keadaan kurang efektif, kelemahan yang sangat menonjol adalah tingkat kemampuan teknis dan pengalaman sehingga berpengaruh terhadap tingkat pemahaman mereka, di sini walaupun begitu baiknya konsultan dan fasilitator di tingkat kabupaten apabila pelaksanaan sangat terbatas waktunya belum cukup untuk proses pembelajaran. Kemudian bagaimana tingkat kesesuaian fasilitator dalam memberikan bantuan teknis kepada kelompok sasaran sehingga peran fungsi fasilitator bisa berjalan efektif, hasil penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel IV.25  
Kesesuaian Kebutuhan Fasilitator dalam Pendampingan  
terhadap Kelompok Sasaran

Tingkat Kemampuan	Frekwensi	%
Tidak baik	5	12,50
Kurang baik	18	45,00
Cukup baik	13	32,50
Baik	4	10,00
Total	40	100,00

*Di olah dari jawaban pertanyaan No. 23*

Dengan adanya keterbatasan pemahaman dan kemampuan tertulis dari fasilitator maka cukup berpengaruh terhadap tingkat kesesuaian teknis yang dapat diberikan kepada kelompok sasaran hal ini bisa dibuktikan dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa dari responden (45 %) menyatakan kurang baik (32,5 %) cukup baik dan hanya (10 %) yang menyatakan baik sehingga bisa dikatakan bahwa tingkat kesesuaian bantuan teknis sangat

terbatas yang mampu diterima oleh kelompok sasaran. Kondisi dipengaruhi oleh seperti apa di analisis No. 23 di depan sehingga kelompok sasaran mengalami kesulitan dalam melaksanakan kegiatan khususnya bagi kegiatan ekonomi produktif.

Tabel IV.26  
Tingkat Kemampuan Fasilitator

Tingkat Kemampuan	Frekwensi	%
Tidak mampu	9	22,50
Kurang mampu	9	22,50
Cukup mampu	14	35,00
Mampu	8	20,00
Total	40	100,00

*Di olah dari jawaban pertanyaan No. 24*

Pada tabel di atas, membuktikan bahwa data penelitian yang menanyakan tentang tingkat kemampuan organisasi pelaksana, dari 40 responden, terdapat 14 orang atau ( 35%) mengungkapkan bahwa tingkat kemampuan fasilitator dalam melakukan bimbingan kelompok sasaran cukup mampu, sedangkan pada proporsi kedua 18 orang atau ( 45 %) mengungkapkan tidak/kurang mampu. Sehingga dari data tersebut dapat disarikan bahwa fasilitator dalam mengemban tugas sebagai pembimbing kelompok sasaran dirasakan masih kurang memadai. Meskipun terdapat 8 orang ( 20% ) responden mengatakan mampu, kemungkinan data tersebut kurang valid. Indikator lain dapat dilihat dari tingkat peran yang dimainkan oleh fasilitator dalam melakukan bimbingan kepada para kelompok sasaran dapat ditunjukkan pada tabel berikut ini:

Tabel IV 27  
Peran Fasilitator Dalam Mendukung Kelompok Sasaran

Tingkat Dukungan	Frekwensi	%
Tidak baik	9	22,50
Kurang baik	13	32,50
Cukup baik	10	25,00
Baik	8	20,00
Total	40	100,00

*Di olah dari jawaban pertanyaan No. 25*

Dari tabel tersebut di atas terkhata, yaitu pertanyaan yang disampaikan kepada kelompok sasaran, ditemukan 13 orang responden (32,5%) mengungkapkan bahwa pada dasarnya fasilitator belum dapat mendukung/memainkan peran dalam menjembatani usaha para kelompok sasaran. Proporsi kedua 10 responden atau (25%) mengungkapkan telah mendukung kegiatan yang dilakukan oleh para kelompok sasaran. Meskipun demikian dapat disimpulkan bahwa peran fasilitator dalam mewujudkan keberhasilan program pengembangan kecamatan masih dirasakan kurang mendukung. Hal ini sangat dimungkinkan karena secara empiris bantuan yang diberikan oleh para kelompok sasaran cenderung dipergunakan untuk membangun sarana-prasarana desa yang seharusnya lebih di utarakan pada kegiatan usaha guna meningkatkan pendapatan. Setelah kita mengetahui bagaimana peran fasilitator dalam mendukung pada kelompok sasaran, selanjutnya adalah perlu kita ketahui bagaimana peran organisasi pelaksana dalam menggali dukungan masyarakat terhadap semua kegiatan program sebagaimana ditunjukkan dalam hasil penelitian sebagai berikut :

Tabel IV 28  
Peran Organisasi Pelaksana Dalam Menggali Dukungan Masyarakat

Tingkat Kemampuan	Frekwensi	%
Tidak baik	4	10,00
Kurang baik	16	40,00
Cukup baik	14	35,00
Baik	6	15,00
Total	40	100,00

*Di olah dari jawaban pertanyaan No. 26*

Peran organisasi pelaksana lainnya yang penting selain kemampuan teknis adalah kemampuan dalam hubungan dengan masyarakat luas di luar kelompok sasaran maka dalam upaya mendukung keberhasilan kegiatan program peran kemampuan organisasi pelaksana berdasarkan hasil penelitian dalam hal ini cukup baik apabila kita lihat dari hasil penelitian (35 %) menyatakan cukup baik dan (15 %) baik sedangkan yang menyatakan kurang baik hanya (4 %) dan (40 %) kurang baik. Keberhasilan peran organisasi pelaksana disini selain kemampuan fasilitator dalam hubungan dengan masyarakat di luar kelompok sasaran tetapi adanya faktor kepentingan masyarakat itu sendiri terhadap kegiatan program. Faktor kepentingan dan kemanfaatan yang didapatkan langsung oleh masyarakat di luar kelompok sasaram adalah pembangunan fisik, sedang untuk kegiatan ekonomi produktif sebenarnya banyak orang yang berharap tetapi mereka rata-rata cukup pesimis terhadap keberhasilan adanya pelestarian atau perguliran dana bantuan sehingga akan bisa dinikmati oleh masyarakat banyak. Selanjutnya setelah kita mengetahui bagaimana peran fasilitator dan organisasi pelaksana faktor penting lainnya adalah kesesuaian pembentukan kelompok sasaran dalam

mendukung keberhasilan program, sebab apabila pembentukan kelompok sasaran telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku akan berdampak pada pada dukungan masyarakat luas dan kesesuaian capaian tujuan sasaran program. Dalam hal ini hasil penelitian dapat dilihat pada tabel dan analisis dibawah ini :

Tabel IV 29  
Tingkat Kesesuaian Pembentukan Kelompok Sasaran

Tingkat Kesesuaian	Frekwensi	%
Tidak sesuai	4	10,00
Kurang sesuai	27	67,50
Cukup sesuai	3	7,50
Sesuai	6	15,00
Total	40	100,00

*Di olah dari jawaban pertanyaan No. 27*

Penentuan kelompok sasaran seperti dalam tujuan program adalah bagi mereka penduduk miskin, berharap kelompok sasaran yang terdiri masyarakat miskin nantinya akan bisa mandiri dalam memecahkan masalah kemiskinan yang mempunyai hasil penelitian mewujudkan bahwa kesesuaian anggota kelompok sasaran dengan penduduk miskin masih kurang sesuai dimana (67,5 %) menyatakan kurang sesuai, (15 %) menyatakan sesuai (7,5 %) cukup sesuai dan hanya (10 %) yang menyatakan tidak sesuai. Pada dasarnya penentuan kriteria penduduk miskin masih membingungkan dan masih diperdebatkan sehingga kurang obyektif, masih banyak dipandang ada unsur subyektifnya kesulitan ini juga dialami diskusi penentuan kelompok sasaran yang sering menimbulkan keributan sehingga dalam menentukan kelompok sasaran hanya didasarkan pada kelompok-kelompok yang telah terbentuk di

desa seperti kelompok tani atau kelompok arisan desa. Kemudian apakah pembentukan kelompok sasaran itu sendiri mampu dalam menjalankan aktivitas kegiatan program, hal ini sangat mempengaruhi tingkat keberhasilan program karena merekalah yang menentukan segala jenis kegiatannya. Hasil penelitian untuk hal tersebut dapat dilihat dalam tabel dan pembahasan berikut ini :

**Tabel IV 30**  
**Kemampuan Anggota Kelompok Sasaran dalam Aktivitas Kegiatan**

Tingkat Kemampuan	Frekwensi	%
Tidak mampu	4	10,00
Kurang mampu	13	32,50
Cukup mampu	18	45,00
Mampu	5	12,50
Total	40	100,00

*Di olah dari jawaban pertanyaan No. 28*

Membicarakan masalah kemampuan organisasi pelaksana maka tidak bisa terlepas dari organisasi kelompok sasaran itu sendiri, karena dari keduanya sangat mempengaruhi terhadap keberhasilan oleh masing-masing dalam menjalankan peran dan fungsinya yang diperlukan kerjasama diantara keduanya. Seperti dimuka terlihat dari hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kemampuan dikategorikan dalam cukup dan untuk kelompok sasaran mengalami hal yang sama, (45 %) menyatakan cukup mampu (32,5 %) kurang mampu, (10 %) tidak mampu dan (12,5 %) menyatakan mampu, keadaan ini memang sangat dipengaruhi oleh kualitas SDM penduduk yang rendah keadaan tidak bisa ditawar dan diubah dalam waktu yang singkat keadaan sangat kompleks permasalahannya. Setelah kita kita mengetahui bagaimana

kegiatan perlu kita ketahui pula bagaimana tingkat pengembangan kegiatan itu sendiri hal ini sesuai dengan prinsip tujuan program akan adanya pemberdayaan masyarakat. Tingkat pengembangan kelompok sasaran dapat dilihat pada tabel dan uraian sebagai berikut :

Tabel IV 31  
Kemampuan Pengembangan PPK oleh Kelompok Sasaran

Tingkat Kemampuan	Frekwensi	%
Tidak mampu	2	5,00
Kurang mampu	15	37,50
Cukup mampu	16	40,00
Mampu	7	17,50
Total	40	100,00

*Di olah dari jawaban pertanyaan No. 29*

Kemampuan pengembangan ekonomi produktif bagi ekonomi keluarga akan ditentukan oleh kemampuan anggota dan pengurusan kelompok sasaran dalam melaksanakan kegiatan yang dibantu dengan organisasi pelaksana di desa. Pengembangan kegiatan usaha diupayakan melalui kegiatan ekonomi keluarga, sehingga akan terbentuk keluarga yang mandiri tidak selalu bergantung kepada subsidi pemerintah terus menerus dari usaha ekonomi keluarga meningkat ke ekonomi desa kemudian kecamatan sehingga pada akhirnya pada pengembangan ekonomi secara menyeluruh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemampuan pengembangan untuk usaha ekonomi keluarga telah berhasil cukup baik apabila kita lihat dari jawaban responden (40 %) menyatakan cukup mampu, (17,5%) menyatakan mampu, (37,5 %) kurang mampu dan hanya (5 %) yang menyatakan tidak mampu. Kesulitan

pengembangan usaha ekonomi keluarga adalah rendahnya kualitas SDM dalam mengelola dan mengembangkan usaha serta terbatasnya dana bantuan yang dialokasikan untuk ekonomi produktif. Tingkat keberhasilan akan sangat dipengaruhi bagaimana tingkat keuletan dari kelompok sasaran dalam usaha pengembangan program sehingga tujuan pemberdayaan masyarakat dalam PPK dapat dicapai serta untuk melihat juga bagaimana kesiapan masyarakat dalam menerima program. Hasil penelitian untuk hal tersebut dapat dilihat pada tabel dan pembahasan sebagai berikut :

Tabel IV 32

## Keuletan Kelompok Sasaran dalam Melaksanakan PPK

Tingkat Keuletan	Frekwensi	%
Tidak baik	3	7,50
Kurang baik	21	52,50
Cukup baik	12	30,00
Baik	4	10,00
Total	40	100,00

*Di olah dari jawaban pertanyaan No. 30*

Keberhasilan kemampuan kelompok sasaran dalam pengembangan usaha dalam kemandirian anggota kelompok sasaran serta kedisiplinan yang berpengaruh terhadap tingkat keuletan dari kelompok sasaran itu sendiri, dalam memanfaatkan dana bantuan untuk usaha ekonomi keluarga, untuk kegiatan ini hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat keuletan atau pantang menyerah terhadap tantangan yang ada kurang berhasil dengan baik hal ini cukup signifikan apabila kita kaitkan dengan analisis tersebut di atas. Dari 40 responden (52,5 %) menyatakan kurang ulet, (7,5 %) tidak baik, (30 %) cukup baik sedang yang menyatakan baik hanya (10 %). Keadaan ini sangat

dipengaruhi bukan siapnya masyarakat dalam menerima program. Mereka masih selalu terbiasa dengan dana bantuan yang menjadikan mereka obyek atau masih tingginya ketergantungan dari subsidi pemerintah. Kemandirian juga sangat dipengaruhi oleh berdaya lokal yang kurang ulet dan kurang kerja keras, mereka selalu pasrah dan menerima dengan keadaan. Mereka belum bisa menerima cara pandang pembangunan modal pemberdayaan artinya program masih membutuhkan waktu untuk bisa diterima dengan optimal oleh masyarakat seiring dengan peningkatan kualitas SDM.

#### 4. Komunikasi Program (X3 )

Variable lain keberhasilan program pengembangan kecamatan dapat dilihat bagaimana tingkat komunikasi program yang hasil penelitiannya akan duraiakan tiap indiktornya yang akan kami uraikan satu perastu. Pembahasan pertama adalah bagaimana tingkat kelengkapan informasi program karena bagaimanapun juga hal ini akan berpengaruh pada tingkat keberhasilan program, berdasarkan penelitian akan dapat dilihat pada tabel dan pemabahasannya sebagai berikut :

Tabel IV 33  
Kelengkapan Informasi PPK

Tingkat Informasi	Frekwensi	%
Tidak lengkap	5	12,50
Kurang lengkap	20	50,00
Cukup lengkap	9	22,50
Lengkap	6	15,00
Total	40	100,00

*Di olah dari jawaban pertanyaan No.31*

Terlihat bahwa data tabel di atas, yang mengungkapkan tingkat kelengkapan informasi yang diberikan baik melalui UDKP Kecamatan maupun LKMD, menunjukkan bahwa 20 responden atau ( 50 % ) mengatakan kurang lengkap dan 13 orang atau (37 %) orang mengatakan tidak lengkap, sehingga hal ini dapat disimpulkan bahwa kelengkapan informasi yang diterima oleh para kelompok sasaran tidak lengkap. Hal ini sangat memungkinkan karena para fasilitator itu sendiri dirasakan kurang begitu memahami secara keseluruhan tentang program pengembangan kecamatan. Dimensi lain adalah tingkat kejelasan informasi yang diterima oleh para kelompok sasaran, dimana kajian tingkat kejelasan informasi dapat diberikan secara lebih detail pada tabelberikut ini

Tabel IV 34

## Kejelasan Informasi Melalui Media Elektronik

Tingkat Pemahaman	Frekwensi	%
Tidak jelas	7	12,50
Kurang jelas	18	45,00
Cukup jelas	5	12,50
Jelas	10	25,00
Total	40	100,00

*Di olah dari jawaban pertanyaan No.32*

Data penelitian mengenai tingkat kejelasan informasi dari para organisasi implementator kepada kelompok sasaran mengungkapkan bahwa terdapat 7 orang ( 17,5%) tidak jelas dan 18 responden (45 %) menyatakan kurang jelas sehingga informasi yang diterima oleh para kelompok sasaran dirasakan materinya masih cukup sulit, karena bentuk informasi kurang pas, sehingga dirasakan tingkat pemahaman daya tangkap dirasakan kurang dengan

tingkat pendidikan masyarakat yang rendah. Setelah kita mengetahui tingkat pemahaman informasi yang disampaikan melalui media elektronik yang hasilnya cukup sulit untuk dipahami, bagaimana dengan media cetak. Hasil penelitian dapat dilihat pada tabel dan uraian sebagai berikut :

Tabel IV 35

## Kejelasan Informasi Melalui Media Cetak

Tingkat Pemahaman	Frekwensi	%
Tidak paham	5	12,50
Kurang paham	16	40,00
Cukup paham	14	35,00
Jelas sekali	5	12,50
Total	40	100,00

*Di olah dari jawaban pertanyaan No.33*

Komunikasi dapat berjalan efektif apabila pesan dapat diterima dengan efektif pula, sedangkan media yang dipergunakan sangat banyak baik itu langsung, media cetak maupun elektronik, tingkat efektifitas penerimaan dari masyarakat khususnya kelompok sasaran dalam memanfaatkan media cetak dapat dilihat dari hasil penelitian yang menunjukkan bahwa komunikasi melalui media ini (12, 5 %) menyatakan sangat jelas, (35 %) menyatakan paham dan (40 %) menyatakan kurang paham serta (12,5 %) tidak paham. Kurang pahamnya masyarakat disebabkan oleh kualitas SDM mereka dalam memahami yang terkadang penyebab lain adalah bahwa minat baca masyarakat masih rendah sehingga mereka lebih senang informasi didapatkan melalui penjelasan dari fasilitator langsung atau nara sumber langsung atau dari tokoh masyarakat. Kemudian komunikasi program selain yang bisa didapatkan secara tidak langsung dari media cetak maupun elektronik, komunikasi yang

paling efektif dan berpengaruh adalah komunikasi langsung antara para fasilitator dan kelompok sasaran atau masyarakat, hasil penelitian tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel IV 36  
Pemahaman Informasi Langsung Masyarakat  
dengan Organisasi Pelaksana

Tingkat Pemahaman	Frekwensi	%
Tidak jelas	4	10,00
Kurang jelas	9	22,50
Cukup jelas	21	52,50
Jelas	6	15,00
Total	40	100,00

*Di olah dari jawaban pertanyaan No.34*

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerimaan informasi yang lebih mudah diterima oleh masyarakat atau kelompok sasaran adalah melalui informasi langsung face to face, kelompok (UDKP) maupun dalam acara-acara kegiatan rutin desa seperti arisan. Hal ini cukup signifikan dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa dari 40 responden tingkat kejelasan informasi yang disampaikan oleh fasilitator menyatakan jelas (15 %), cukup jelas (52,5 %) sedang yang menjawab kurang jelas (22, 5 %) dan sulit atau jelas (10 %). Tingkat kesulitan pemahaman diakibatkan karena keterbatasan pemahmana oleh kedua belah pihak, disebabkan oleh rendahnya tingkat pendidikan baik itu fasilitator maupun kelompok sasaran itu sendiri. Yang terakhir adalah bagaimana peran fasilitator dalam menjalankan fungsi pendampingan apabila dilihat dari komunikasi yang berlangsung antara kedua belah pihak antara kelompok sasaran dengan fasilitator. Hasil penelitian terhadap hal tersebut dapat dilihat dalam tabel dan pembahsan sebagai berikut:

Tabel IV 37  
Tingkat Pemahaman Informasi Langsung antara  
Fasilitator dan Kelompok Sasaran

Tingkat Pemahaman	Frekwensi	%
Tidak jelas	5	12,50
Kurang jelas	15	35,00
Cukup jelas	15	35,00
Jelas	5	12,50
Total	40	100,00

*Di olah dari jawaban pertanyaan No.35*

Di depan sudah kita ketahui bahwa tingkat kejelasan informasi melalui media cetak, elektornik dan organisasi pelaksana, selanjutnya kejelasan informasi langsung antara fasilitator dengan kelompok sasaran dalam fungsi pendampingan bimbingan teknis baik secara kuantitas maupun kualitas dalam keberhasilan pelaksanaan kegiatan PPK. Untuk hal ini dapat dilihat dari hasil penelitian bahwa dari 5 responden (12,5 %) menyatakan tidak jelas, 15 responden (35 %) kurang jelas dan 5 responden lagi (12,5 %) menyatakan jelas, 15 responden (35 %) cukup jelas. Sehingga disini menunjukkan bahwa tingkat pemahaman oleh kedua belah pihak cukup memprihatinkan, hal ini sangat terpengaruh pada tingkat pendidikan dan kepercayaan, karena adanya jabatan rangkap dimana sebagian besar fasilitator desa adalah pengurus pengelola kegiatan tingkat desa, keadaan ini menjadikan tidak efektif dan efisien.

## C. ANALISA HASIL PENELITIAN

### 1 Uji Normalitas

Salah satu syarat yang penting dalam penelitian adalah dengan menguji normalitas data. Dengan melihat karakteristik masing-masing variabel maka akan dapat memberikan gambaran tentang teknik analisis data yang tepat. Hasil uji normalitas menunjukkan bahwa ada nilai yang tegas antara nilai yang ada pada perhitungan *skew* (kemencengan data kekiri) dan kurtosis (kemencengan data kekanan). Apabila terjadi perbedaan yang tegas maka dapat disimpulkan bahwa bahwa tersebut mempunyai karakteristik data yang tidak normal. Hasil perhitungan uji normalitas data dapat terlihat pada tabel IV. 38 berikut ini :

Tabel. IV.38  
Uji normalitas data penelitian

Keterangan	Skewness		Kurtosis	
	Nilai	Std. Error	Nilai	Std. Error
Keberhasilan program PPK	,034	,337	-1,032	,662
Partisipasi masyarakat	,411	,337	-1,326	,662
Kemampuan orgnisasai	,156	,337	-,616	,662
Komunikasi program	,783	,337	,374	,662

Pada tabel di atas membuktikan uji normalitas data, nilai maupun standar error Skewness dan Kurtosis telah terjadi perbedaan atau tidak ada kesamaan, sehingga berdasarkan data tersebut telah terbukti bahwa distribusi data dalam penelitian ini tidak normal, sebaliknya apabila nilai dan angka Skewness dan Kurtosis sama besar diinterpretasikan bahwa data tersebut normal.

## **2. Uji Validitas dan Reliabilitas**

Sebelum instrumen penelitian ( kuesioner ) dipergunakan sebagai alat untuk menggali data kepada para responden, agar diperoleh data yang baik, instrumen tersebut telah dilakukan uji validitas dan reliabilitas. Hal ini dimaksudkan agar instrumen tersebut benar valid dan reliabel sebagai instrumen penelitian. Setelah dilakukan uji validitas dan reliabilitas, berdasarkan perhitungan uji validitas dan reliabilitas menunjukkan bahwa intrumen yang diuji telah memenuhi syarat uji. Hal ini terlihat dari nilai validitas mempunyai ciri-ciri positif, sedangkan pada uji reliabilitas maka nilai reliabilitas semuanya diatas nilai Alpha. Sehingga dapat diinterpretasikan bahwa instrumen penelitian tersebut valid.

### **D Hubungan Antara Variabel Penelitian.**

#### **1 Hubungan Indikator Partisipasi dengan Indikator Keberhasilan**

##### **Program Pengembangan Kecamatan ( PPK )**

Pada tabel silang tersebut dibawah telah menggambarkan hubungan antara indikator keberhasilan Program Pengembangan (PPK) dengan tingkat partisipasi yang diwujudkan dalam bentuk partisipasi sumbang saran para kelompok sasaran dalam rapat atau diskusi kelompok. Hubungan kedua indikator tersebut dapat ditunjukkan yaitu dengan tingkat kemalasan untuk hadir dalam rapat dan kurang aktifnya dalam berpendapat darai para kelompok sasaran yaitu tingkat frekuensi kehadiran yang relatif tidak baik yaitu ( 50 % ), ( 100 % ) , ( 25% ) hal ini mempunyai implikasi tidak atau

kurang berpengaruh terhadap perkembangan jenis usaha yang dilakukan oleh para kelompok sasaran.

Begitu juga sebaliknya dengan tingkat kehadiran yang cukup baik atau baik dalam musyawarah atau rapat kelompok, ternyata cukup berpengaruh atau berpengaruh terhadap perkembangan jenis usaha yang dilakukan oleh para kelompok sasaran ( 40% ), ( 13,04% ), (13,04%). Dengan demikian telah dapat disimpulkan bahwa hubungan antara variabel keberhasilan program dengan variabel partisipasi terdapat hubungan positif, yaitu tingkat partisipasi masyarakat atau kelompok sasaran yang baik akan diikuti dengan tingkat perkembangan jenis usaha pada kelompok sasaran secara linier dan sebaliknya. Untuk mengetahui secara lebih detail dapat dilihat tabel silang berikut ini :

Tabel IV.39

Hubungan antara Indikator Perkembangan jenis usaha dengan Tingkat frekuensi kehadiran dalam rapat/diskusi

Perkembangan Jenis usaha	Tingkat frekuensi kehadiran dalam rapat/diskusi				Total
	Tidak Baik	Kurang baik	Cukup Baik	Baik	
Tidak baik	2 50,00 %	-	2 8,70 %	4 40,00 %	8 20,00 %
Kurang baik	1 25,00 %	3 100,00 %	15 65,22 %	2 20,00 %	21 52,50 %
Cukup baik	1 25,00 %	-	3 13,04 %	4 40,00 %	8 20,00 %
Baik	-	-	3 13,04 %	-	3 7,50 %
	4 100,00 %	3 100,00 %	23 100,00 %	10 100,00 %	40 100,00 %

Sumber : Dioah dari pertanyaan No 1 dengan No. 15.

## 2 Hubungan Partisipasi dengan Keberhasilan Program Pengembangan Kecamatan ( PPK )

Sebagaimana diuraikan di atas tentang hubungan antara indikator partisipasi dengan indikator Program Pengembangan Kecamatan, selanjutnya disajikan hubungan antara variabel. Berdasarkan tabel silang mengenai hubungan antara variabel partisipasi dengan PPK di bawah ini membuktikan bahwa keduanya mempunyai hubungan positif, hal ini dapat ditunjukkan dengan tingkat partisipasi masyarakat yang cukup mendukung atau mendukung (41,7%), ( 25% ) dan (66,70%) mempunyai korelasi positif terhadap keberhasilan Program Pengembangan Kecamatan, dan sebaliknya dengan tingkat partisipasi masyarakat yang kurang atau tidak mendukung akan diikuti dengan ketidak berhasilan Program Pengembangan Kecamatan ( 50%) (40%). Untuk mengetahui secara lebih detail hubungan kedua variabel partisipasi dengan keberhasilan program dapat dilihat dari hasil pengolahan tabel silang untuk melihat sampai sejauh mana hubungan positif diantara kedua variabel tersebut. Berdasarkan hasil penelitian dihasilkan perhitungan dengan teknik SPSS dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel IV.40

Hubungan Antara Variabel Keberhasilan PPK dengan Partisipasi

KEBERHASILAN PROGRAM PPK	PARTISIPASI				Total
	Tidak Mendukung	Kurang Mendukung	Cukup Mendukung	Mendukung	
Tidak Berhasil	2 50,00	1 6,70 %	1 8,30 %	-	4 10,00 %
Kurang Berhasil	1 25,00	6 40,00 %	3 25,00 %	1 11,11 %	11 27,50 %
Cukup Berhasil	-	3 20,00 %	5 41,70 %	6 66,67 %	14 35,00 %
Berhasil	1 25,00	5 33,30 %	3 25,00 %	2 22,22 %	11 27,50 %
Total	4 100,00	15 100,00 %	12 100,00 %	9 100,00 %	40 100,00 %

Sumber : Diolah dari semua pertanyaan variabel Keberhasilan Program Pengembangan Kecamatan (PPK) dengan variabel Partisipasi.

Selanjutnya Hubungan antara Partisipasi dengan Keberhasilan program menunjukkan bahwa koefisien Rank Kendall antara kedua variabel tersebut adalah sebesar 0,238. Guna menguji kebenaran hubungan antara kedua variabel tersebut maka dilakukan uji Z dengan tingkat kebenaran 95% maka harga tabelnya adalah 1,96. Hal ini telah membuktikan bahwa harga Z hitung dengan koefisien korelasi 0,238 diperoleh angka Z hitung sebesar 2,33 ( $2,33 > 1,96$ ) sehingga dapat diinterpretasikan bahwa hipotesis yang diajukan dapat diterima atau dapat dinyatakan bahwa ada hubungan antara partisipasi

dengan keberhasilan Program Pengembangan Kecamatan. Hasil uji statistik Rank Kendall dapat terlihat pada tabel berikut ini :

Tabel IV 41  
Uji Rank Kendall  
Correlations

	KEB	PAR
Kendall's tau-b KEB Correlation Coefficient Sig. (2-tailed)	1.000	.238*
N	40	40
PAR Correlation Coefficient Sig. (2-tailed)	.238*	1.000
N	40	40

\*.Correlation is significant at the .05 level (2-tailed).

### 3. Hubungan antara Indikator Kemampuan Organisasi dengan Indikator Keberhasilan Program Pengembangan Kecamatan

Sebelum diasajikan hasil uji Rank Kendall antara variabel partisipasi dengan keberhasilan program, terlebih dahulu agar lebih menggambarkan secara jelas antara kedua variabel, terlebih dahulu kita sajikan tabel silang (*Crosstabs*) hubungan antara Tabel Silang Indikator Keberhasilan Program dengan Pemahaman fasilitator/ LKMD

Pada tabel silang tersebut dibawah telah mendiskripsikan hubungan antara variabel keberhasilan Program Pengembangan Kecamatan di Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan dengan tingkat pemahaman fasilitator terhadap Program Pengembangan Kecamatan.. Hal ini telah ditunjukkan pada tabel dibawah, tingkat pemahaman fasilitator terhadap program pengembangan yang relatif berkurang (23,08 %) dan (

61,54 % ), ternyata mempunyai hubungan yang positif yaitu tidak ada atau kurang berpengaruh . perkembangan jenis usaha masing-masing kelompok sasaran, sebaliknya dengan tingkat pemahaman fasilitator yang baik atau cukup baik berpengaruh terhadap perkembangan jenis usaha yang dilakukan oleh para kelompok sasaran (18,75 %), ( 37,25 % ) Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tingkat kemampuan organisasi ( kemampuan fasilitator ) mempunyai hubungan positif. Untuk mengetahui secara lebih detail dapat dilihat tabel silang berikut ini :

Tabel IV. 42

Hubungan antara Indikator Perkembangan Jenis Usaha dengan  
Tingkat Pemahaman Fasilitator

Perkembangan jenis usaha	Tingkat pemahaman fasilitator thd tugas pendamping				Total
	Tidak Baik	Kurang Baik	Cukup baik	Baik	
Tidak baik	-	3 23,08 %	4 25,00 %	1 12,50 %	8 20,00 %
Kurang baik	-	8 61,54 %	9 56,25 %	4 50,00 %	21 52,50 %
Cukup baik	-	2 15,38 %	3 18,75 %	3 37,50 %	8 20,00 %
Baik	3 100,00 %	-	-	-	3 7,50 %
Total	3 100,00 %	13 100,00 %	16 100,00 %	8 100,00 %	40 100,00 %

Sumber : Dioah dari pertanyaan No 1 dengan No. 22

#### **4. Hubungan antara variabel Kemampuan Organisasi dengan Keberhasilan Program Pengembangan Kecamatan (PPK).**

Sebagaimana diuraikan di atas tentang hubungan antara indikator kemampuan dengan indikator Program Pengembangan Kecamatan, selanjutnya disajikan hubungan antara variabel. Berdasarkan tabel silang mengenai hubungan antara variabel kemampuan dengan Program Pengembangan Kecamatan di bawah ini membuktikan bahwa keduanya mempunyai hubungan positif, hal ini dapat ditunjukkan dengan tingkat kemampuan yang cukup memadai atau memadai (50,00%), ( 25 % ) mempunyai korelasi positif terhadap keberhasilan Program Pengembangan Kecamatan, dan sebaliknya dengan tingkat kemampuan yang kurang atau tidak memadai akan diikuti dengan ketidak berhasilan Program Pengembangan Kecamatan ( 8,33 % ) (16,67%). Untuk mengetahui secara lebih detail hubungan positif kedua variabel keberhasilan program dengan variabel kemampuan organisasi dengan melihat kepada tabel silang, yang diolah dari semua jawaban responden dalam questioner. Adapun hasilnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel IV.43

Hubungan Antara Variabel Keberhasilan Program PPK  
dengan Kemampuan Organisasi

KEBERHASILAN PROGRAM PPK	KEMAMPUAN ORGANISASI				Total
	Tidak Memadai	Kurang Memadai	Cukup Memadai	Memadai	
Tidak Berhasil	1 8,33	1 16,67 %	2 14,28 %	-	4 10,00 %
Kurang Berhasil	1 8,33	1 16,67 %	4 28,58 %	5 62,50%	11 27,50 %
Cukup Berhasil	4 33,34	2 33,33 %	7 50,00 %	1 12,50%	14 35,00 %
Berhasil	6 50,00	2 33,33 %	1 7,14 %	2 25,00 %	11 27,50 %
Total	12 100,00	6 100,00 %	14 100,00 %	8 100,00 %	40 100,00 %

Sumber : Diolah dari semua pertanyaan variabel Keberhasilan Program Pengembangan Kecamatan (PPK) dengan variabel Kemampuan Organisasi

Hasil uji statistik hubungan antara Kemampuan organisasi dengan Keberhasilan Program menunjukkan bahwa koefisien Rank Kendall antara kedua variabel tersebut adalah sebesar 0,198. Guna menguji kebenaran hubungan antara kedua variabel tersebut maka dilakukan uji Z dengan tingkat kesalahan 5 % dan kepercayaan 95 % maka harga tabelnya adalah 1,96. Hal ini telah membuktikan bahwa harga Z hitung lebih besar jika dibandingkan harga tabel Z hitung dengan koefisien korelasi 0,198 diperoleh Z hitung 2,65 ( 2,65 >

1,96) atau dapat disimpulkan bahwa hipotesis yang diajukan dapat diterima atau dapat dinyatakan bahwa ada hubungan antara Kemampuan organisasi dengan Keberhasilan Program. Hasil uji statistik Rank Kendall dapat terlihat pada tabel berikut ini :

Tabel IV 44  
Uji Rank Kendall  
Correlations

	KEB	KEMAMP
Kendall's tau-b KEB Correlation Coefficient	1.000	.198
Sig. (2-tailed)	.40	.086
N		40
KEMAMP Correlation Coefficient	.198	1.000
Sig. (2-tailed)	.086	
N	40	40

\*.Correlation is significant at the .05 level (2-tailed).

#### 5. Hubungan antara Indikator Komunikasi dengan Indikator

##### Keberhasilan Program Pengembangan Kecamatan

Hubungan antara indikator keberhasilan program dengan kelengkapan informasi (komunikasi) yang diperlukan oleh para kelompok sasaran, dapat diperlihatkan pada tabel tersebut dibawah, yaitu informasi atau komunikasi yang lengkap terhadap Proyek pengembangan Kecamatan di Kecamatan Gubug, dapat ditunjukkan yaitu dengan informasi yang diterima oleh para kelompok sasaran maupun masyarakat pada umumnya secara tidak lengkap ( kurang jelas dan kurang informatif ( 60 % ), (25%),

( 40% ), ternyata mempunyai implikasi terhadap perkembangan jenis usaha yang kurang menggembarakan atau tidak atau kurang baik. Begitu juga dengan informasi yang diberikan oleh fasilitator baik pada UDKP Kecamatan maupun LKMD ditingkat kelurahan yang jelas cukup berpengaruh secara positif terhadap perkembangan jenis usaha yang dilakukan oleh para kelompok sasaran ( 33,33 % ), ( 16,67 % ) sehingga telah dapat ditarik suatu kesimpulan hubungan antara indikator keberhasilan program dengan kejelasan informasi mempunyai hubungan secara linier. Untuk lebih jelasnya lihat tabel IV. 45 Berikut ini.

Tabel IV. 45

Hubungan Antara Indikator Perkembangan jenis usaha  
dengan Kelengkapan informasi PPK

Perkembangan jenis usaha	Kelengkapan informasi PPK				Total
	Tidak lengkap	Kurang lengkap	Cukup lengkap	Lengkap	
Tidak berpengaruh	3 60,00 %	5 25,00 %	0 0,00 %	0 0,00 %	8 20,00 %
Kurang berpengaruh	2 40,00 %	8 40,00 %	6 66,67 %	5 83,33 %	21 52,50 %
Cukup berpengaruh	0 0,00 %	4 20,00 %	3 33,33 %	1 16,67 %	8 20,00 %
Berpengaruh	0 0,00 %	3 15,00 %	0 0,00 %	0 0,00 %	3 7,50 %
Total	5 100,00 %	20 100,00 %	9 100,00 %	6 100,00 %	40 100,00 %

Sumber : Dioah dari pertanyaan No 1 dengan No. 31.

## 6. Hubungan antara variabel Komunikasi dengan Keberhasilan Program Pengembangan Kecamatan (PPK).

Sebagaimana diuraikan di atas tentang hubungan antara komunikasi dengan Program Pengembangan Kecamatan, selanjutnya disajikan hubungan antara variabel. Berdasarkan tabel silang mengenai hubungan antara variabel komunikasi dengan Program Pengembangan Kecamatan di bawah ini membuktikan bahwa keduanya mempunyai hubungan positif, hal ini dapat ditunjukkan dengan komunikasi yang efektif (71,42%), (12,50%), (14,29%), (43,75%) mempunyai korelasi positif terhadap keberhasilan Program Pengembangan Kecamatan, dan sebaliknya dengan komunikasi yang kurang atau tidak efektif akan diikuti dengan ketidakberhasilan Program Pengembangan Kecamatan ( 33,33 %) ( 33,33 %). Untuk mengetahui secara lebih detail hubungan positif kedua variabel yaitu antara variabel keberhasilan program dengan komunikasi program untuk melihat tingkat hubungan. Sehingga akan dapat kita ketahui bahwa hubungan tersebut signifikan dengan teori yang dikembangkan dalam penelitian ini. Adapun hasilnya berdasarkan hasil jawaban responden dari questioner yang dibagikan dapat diolah dengan tabel silang sebagai berikut dan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel IV.46  
 Hubungan Antara Variabel Keberhasilan Program  
 Dengan Komunikasi Program

KEBERHASILAN PROGRAM	KOMUNIKASI				Total
	TIDAK EFEKTIF	KURANG EFEKTIF	CUKUP EFEKTIF	EFEKTIF	
TIDAK BERHASIL	-	3 33,33 %	-	1 6,25 %	4 10,00 %
KURANG BERHASIL	-	3 33,33 %	2 14,29 %	6 37,50 %	11 27,50 %
CUKUP BERHASIL	1 100,00 %	1 11,12 %	10 71,42 %	2 12,50 %	14 35,00 %
BERHASIL	-	2 22,22 %	2 14,29 %	7 43,75 %	11 27,50 %
Total	1 100,00 %	9 100,00 %	14 100,00 %	16 100,00 %	40 100,00 %

Sumber : Diolah dari semua pertanyaan variabel Keberhasilan Program Pengembangan Kecamatan (PPK) dengan variabel Komunikasi Program.

Hasil uji statistik hubungan antara komunikasi dengan Keberhasilan program pengembangan Kecamatan menunjukkan bahwa koefisien Rank Kendall antara kedua variabel tersebut adalah sebesar 0,234. Guna menguji kebenaran hubungan antara kedua variabel tersebut maka dilakukan uji Z dengan tingkat kebenaran 95 persen maka harga tabelnya adalah 1,96. Hal ini telah membuktikan bahwa harga Z hitung berdasarkan angka koefisien korelasi 0,234 diperoleh angka sebesar 2,61 ( $2,61 > 1,96$ ) atau dapat disimpulkan bahwa

hipotesis yang diajukan dapat diterima atau dapat dinyatakan ada hubungan antara Komunikasi dengan Keberhasilan Program. Hasil uji statistik Rank Kendall dapat terlihat pada tabel berikut ini :

Tabel IV 47  
Uji Rank Kendall  
Correlations

	KEB	KOM
Kendall's tau-b KEB Correlation Coefficient Sig. (2-tailed)	1.000	.234
N	40	40
KOM Correlation Coefficient Sig. (2-tailed)	.234	1.000
N	40	40

\*.Correlation is significant at the .05 level (2-tailed).

#### 7. Hubungan Antara Variabel Partisipasi, Kemampuan dan Komunikasi dengan Keberhasilan Program Pengembangan Kecamatan (PPK).

Selanjutnya dalam hubungan antara variabel bebas secara bersama-sama dengan variabel terikat seperti dalam tujuan penelitian, khususnya dengan teori yang seperti dikembangkan oleh David Korten. Adapun berdasarkan dari hasil penelitian dapat dilihat hubungan bersama-sama antara variabel Partisipasi, Kemampuan organisasi pelaksana dan Komunikasi program dengan Keberhasilan Program Pengembangan Kecamatan dengan uji teknik Konkordansi Kendall (W). Hasil Perhitungan dapat terlihat pada tabel berikut ini :

Tabel IV. 48  
Uji Konkordansi / Kendall's W Test

N	40
Koeffisien Kendall's W	0,666
Chi-Square hitung	106,470
(df=3)	3
Asymp. Sig	,000

Hasil perhitungan diatas memperlihatkan bahwa nilai koefisien Konkordansi Kendall adalah 0,059. Apabila dilihat antara nilai Chi-Square adalah sebesar 0,666 dan harga tabel untuk perhitungan ini adalah sebesar 106,470 ( tabel Chi Square dengan variabel yang mempengaruhi adalah 3 ) maka dapat disimpulkan bahwa ketiga variabel yaitu Partisipasi masyarakat, Kemampuan oraganisasi dan Komunikasi program secara bersama-sama mempunyai hubungan dengan Keberhasilan Program Pengembanagn Kecamatan. Sedangkan pengaruhnya dapat dilihat pada koefisien determinasi yaitu sebesar 0,666 Apabila dilakukan perhitungan prosentase maka pengaruh bersama-sama adalah sebesar 44,3 % , sedangkan sisanya sebesar 65,7% adalah faktor-faktor selain Partisipasi, Kemampuan dan Komunikasi.

## 8. DISKUSI

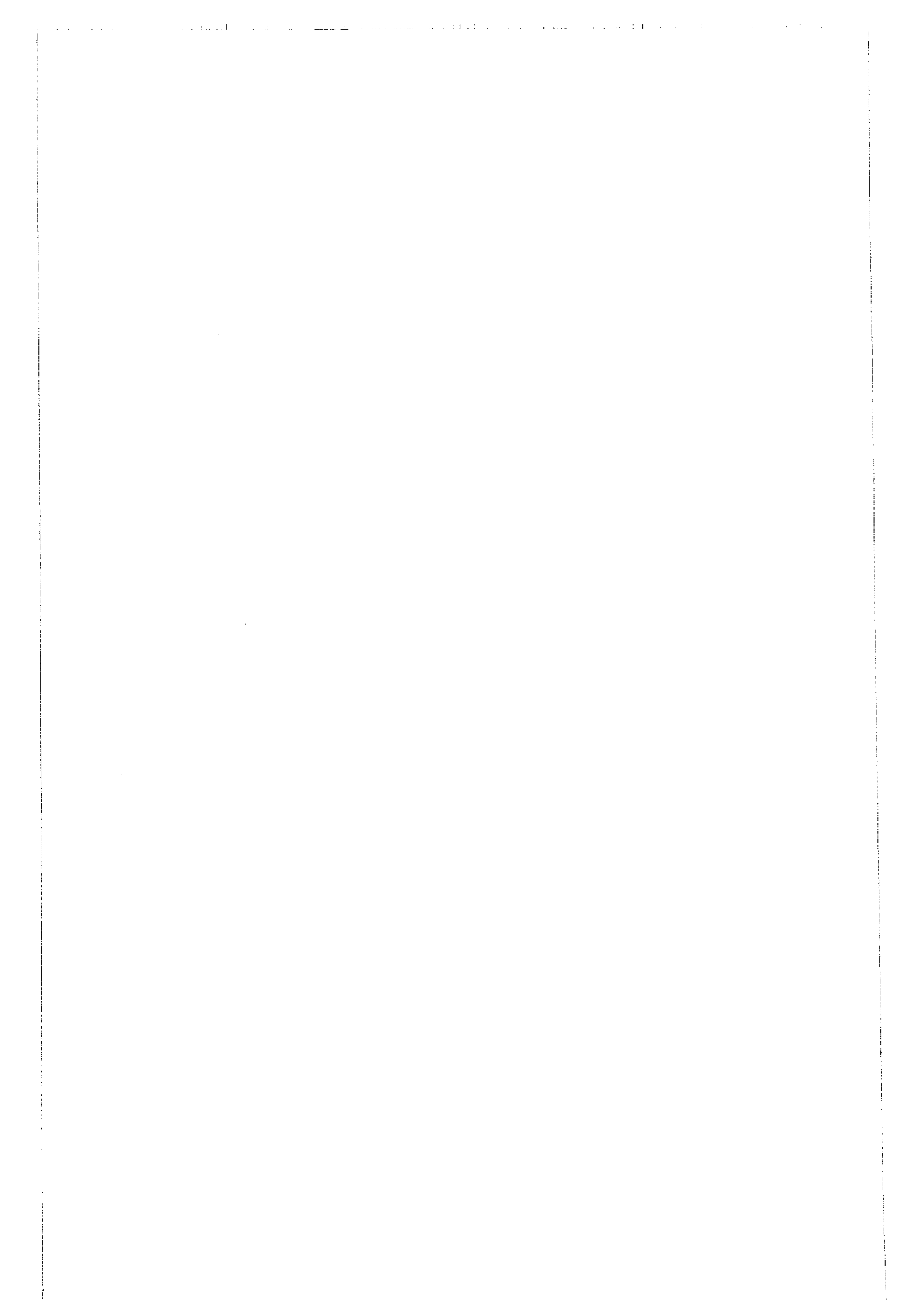
Berdasarkan konsep evaluasi program sebagaimana yang telah dikemukakan oleh David Korten tentang evaluasi program,

mengemukakan bahwa faktor yang mempengaruhi tingkat keberhasilan suatu program adalah; Kemampuan organisasi, partisipasi dan komunikasi

Meskipun demikian hasil penelitian dari ketiga variabel tersebut merupakan bagian terkecil dari semua variabel yang berpengaruh yaitu (36 %) dalam mempengaruhi keberhasilan program pengembangan kecamatan di Grobogan. Walaupun demikian hasil penelitian dari ketiga variabel tersebut merupakan bagian terkecil (36 %) dalam mempengaruhi keberhasilan program, sedangkan faktor-faktor lain yang menentukan keberhasilan program di luar variabel penelitian adalah sebesar (64%) hal ini di mungkinkan faktor rendahnya tingkat ketrampilan masyarakat, faktor pemasaran hasil produksi dan sebagainya. Sehingga untuk mewujudkan keberhasilan program nampaknya masih perlu di kaji secara mendalam terhadap faktor-faktor lain yang berada diluar variabel penelitian.

Sedangkan untuk strategi yang kedua adalah Paradigma kebijakan publik dimana semua kebijakan/keputusan yang diambil oleh pemerintah harus mencerminkan kepentingan masyarakat luas. Hal ini karena kepentingan masyarakat/publik merupakan aspek yang terpenting dalam Administrasi Negara. Dengan demikian kedua strategis tersebut sesuai arah reformasi yaitu *effisiensi*, *efective* dalam penyelenggaraan Mengingat pentingnya program pengembangan kecamatan, khususnya dalam bidang penanggulangan kemiskinan di Kabuapeten Gubug, perlu mengambil langkah-langkah strategis melalui paradigma Kebijakan publik.

Oleh karena itu untuk mewujudkan keberhasilan program perlu melibatkan tiga komponen terpenting yaitu peran pemerintah, sektor swasta/dunia usaha dan masyarakat itu sendiri (*society*) Sedangkan untuk strategi yang kedua adalah Paradigma kebijakan publik dimana semua kebijakan/keputusan yang diambil oleh pemerintah harus mencerminkan kepentingan masyarakat luas. Hal ini karena kepentingan masyarakat/publik merupakan aspek yang terpenting dalam Administrasi Negara.



## BAB. V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

### A. Kesimpulan

Pokok permasalahan dalam penelitian ini sebagaimana yang telah dikemukakan oleh penulis dalam latar belakang apakah ada hubungan antara keberhasilan Program Pengembangan Kecamatan (PPK) di Kecamatan Gugug Kabupaten Grobogan, dengan tingkat partisipasi masyarakat, tingkat komunikasi program dan tingkat kemampuan organisasi pelaksana dalam hal ini TPKD di masing-masing desa yang menjadi obyek.

Berangkat dari kerangka teori yang dibangun dalam penelitian ini, kemudian dilakukan analisis dan penelitian lapangan dengan instrumen kuesioner yang didistribusikan kepada kelompok sasaran (responden) serta dipertajam dengan menggunakan *indepth interview* terhadap Kelompok sasaran, Konsultan, Fasilitator baik tingkat kecamatan maupun tingkat kabupaten. Selanjutnya dari data (ordinal) yang terkumpul diolah dengan menggunakan Statistik Nonparametrik Rank Kendall untuk mengetahui hubungan tunggal dan Konkordansi Kendall untuk hubungan ganda dari variabel penelitian. Dalam penyimpulan dipergunakan dari skala pengukuran yang dikategoriksn cukup dan baik sebagai prosentase rata – rata penilaian.

Hasil pengujian hipotesis dari ketiga variabel independen (X) dengan variabel dependen (Y) dengan rumus Rank Kendall maupun Konkordansi

Kendall terbukti mempunyai koefisien korelasi yang kuat dan signifikan. Hasil uji hipotesis dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa :

1. Sesuai dengan kegunaan penelitian ini dalam pengembangan teori kesesuaian ternyata sangat relevan dengan fakta empiris dari pelaksanaan program PPK di Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan. Hubungan kesesuaian keberhasilan program antara penerima program, organisasi pelaksana, dan program itu sendiri. Dalam hubungan tingkat keberhasilan program PPK di Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan, gejala yang terjadi kurang berhasilnya program dalam upaya peningkatan pendapatan, pengembangan ekonomi produktif dan pemberdayaan masyarakat sangat ditentukan oleh tingkat komunikasi program, tingkat partisipasi dan kemampuan organisasi pelaksana, walaupun masih ada pengaruh yang lainnya.
2. Kurang berhasilnya pembangunan PPK di Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan berdasarkan penelitian dapat disimpulkan dari empat indikator berdasarkan dari jawaban responden yang rata-rata kurang dari 50 % yang menyatakan signifikan terhadap keberhasilan program sesuai dengan tujuan dan sasaran. Dan hasil penelitian *pertama* peningkatan pengelolaan program PPK lihat tabel ( IV.5,10,11,12,13,15 dan16), *kedua* Peningkatan usaha ekonomi produktif lihat tabel (IV.3.4,6 dan 7 ), *ketiga* Peningkatan pendapatan masyarakat khususnya kelompok sasaran tabel (IV.8) dan masyarakat diluar kelompok sasaran pada umumnya tabel (IV.9). Sehingga berdasarkan gejala ini maka dapat disimpulkan bahwa sesuai dengan desain penelitian kami

pelaksanaan PPK di Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan kurang berhasil atau belum optimal.

3. Hubungan partisipasi dengan keberhasilan program mempunyai korelasi koefisien sebesar 0,238, dan setelah dikonsultasikan dengan tabel Z 1,96, dengan demikian dapat diinterpretasikan bahwa hubungan partisipasi dengan keberhasilan Program Pengembangan Kecamatan terdapat hubungan yang signifikan. Berdasarkan hasil penelitian kurang berhasilnya program terkait dengan hubungan tingkat partisipasi masyarakat, hal ini dibuktikan dari hasil jawaban responden dan indep interview bahwa partisipasi masyarakat prosentasenya rata-rata antara 54,5 – 82,5 % (lihat tabel IV 17 s/d 21 dan 23). Sedang permasalahan terbesar (20% lihat tabel IV.22) disini adalah rendahnya upaya pengembangan perguliran dana, dimana diharapkan adanya dukungan dari kelompok sasaran untuk berasama-sama bahu membahu dalam permodalan ekonomi produktif. Prosentase tingkat partisipasi cukup baik tetapi secara kualitas apa yang diberikan dalam bentuk sumbangan pikiran, tenaga atau jasa masih cukup terbatas, sehingga mempengaruhi pada kurang optimalnya keberhasilan program PPK di Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan.
4. Hubungan Kemampuan organisasi dengan keberhasilan program terbukti mempunyai koefisien korelasi sebesar 0,234, dan setelah dikonsultasikan dengan tabel Z 1,96, dengan demikian dapat diinterpretasikan kemampuan organisasi dengan keberhasilan program terdapat hubungan signifikan.

Hasil penelitian menunjukkan angka rata bahwa kemampuan organisasi pelaksana rata-rata dibawah 57,5 % (lihat tabel IV.25 s/d 28, dan 30 s/d 32) sedangkan uuntuk tingkat kesesuaian pendampingan yang dibutuhkan oleh kelompok sasaran, kondisinya kurang baik karena berdasarkan penelitian menunjukkan hanya 22,5 % (tabel IV.29) permasalahan ini diakibatkan karena adanya perangkapan jabatan di TPKD atau fasilitator desa rata-rata menjabat dalam kepengurusan TPKD sehingga kurang efektif, apalagi bila dilihat pada tingkat pendidikan fasilitator desa rata-rata kemampuan teknis cukup rendah.

5. Hubungan Komunikasi program dengan keberhasilan program terbukti mempunyai koefisien korelasi sebesar 0,198 dan setelah dikonsultasikan dengan tabel Z 1,96, dengan demikian dapat diinterpretasikan bahwa variabel komunikasi program terdapat hubungan signifikan. Berdasarkan hasil penelitian komunikasi program kurang berjalan dengan efektif, karena keterbatasan tingkat pemahaman dari masyarakat atau kelompok sasaran dalam menerima informasi baik itu melalui media cetak maupun elektronuk serta oleh fasilitator itu sendiri. Rata-rata prosentase tingkat komunikasi program 37,5 s/d 47,5 % (lihat tabel IV.33 s/d 35 dan 37 ) sedangkan yang cukup efektif adalah komunikasi langsung antara anggota kelompok sasaran dan TPKD selain dengan fasilitator.
6. Untuk uji hipotesis yang menyatakan terdapat hubungan positif antara ketiga variabel independen dengan dependen telah digunakan teknik Konkordansi Kendall, terdapat korelasi koefisien 0866 dengan tingkat

signifikan 0,000. sehingga dapat diinterpretasikan bahwa tingkat hubungan antara variabel *independent* dengan variabel *dependent* adalah signifikan.

7. Adapun koefisien determinasi 64 % dan 36 %. Angka ini dapat diinterpretasikan bahwa ketiga variabel independen hanya berpengaruh terhadap kinerja pegawai sebesar 64 % sedangkan sisanya 36 % dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar model.

Dengan demikian teori yang dibangun dalam penelitian ini, setelah dilakukan penelitian dan uji analisis baik secara empiris maupun teoritis ternyata benar dan terbukti.

## **B. Rekomendasi**

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka berikut ini akan disampaikan beberapa rekomendasi yang sekiranya dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan, khususnya dalam rangka usaha meningkatkan capaian tingkat keberhasilan dalam Program Pengembangan Kecamatan di Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan sebagai berikut :

### **1. Partisipasi Masyarakat**

Sesuai dengan tujuan dan sasaran bahwa PPK diusahakan sebagai upaya pemberdayaan masyarakat, dimana masyarakat sebagai subyek pembangunan maka keberhasilan PPK akan sangat ditentukan oleh bagaimana tingkat partisipasi masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan diantara

hubungan antar variabel, tingkat partisipasi masyarakat memperlihatkan gejala yang baik, saat ini permasalahan yang sangat menonjol dan perlu dikembangkan adalah bagaimana mengembangkan program. Sebab peran pemerintah yang sebagai fasilitator akan sangat tergantung waktu pelaksanaan program yang cukup singkat.

- a. Pelestarian dan pemanfaatan dana bergulir dengan sistem mengembangkan institusi lembaga desa baik formal maupun non formal seperti arisan dan pengajian.
- b. Aktifitas masyarakat diluar kelompok sasaran diarahkan kepada kemitraan kepada kelompok sasaran
- c. Dihidupkan kembali acara rembug desa, yang bisa mengembangkan kehidupan demokrasi dan pemberdayaan masyarakat.
- d. Mengaktifkan kelompok sasaran dalam peranannya pada setiap kegiatan.
- e. Menggerakkan kembali kegotongroyongan masyarakat sebagai upaya pembangunan desa.

## **2. Kemampuan Organisasi Pelaksana.**

Kemampuan organisasi pelaksana dalam penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat pemahaman terhadap program, kemampuan , kecakapan dan ketrampilan setiap anggota masih memperlihatkan tingkat kualitas yang kurang baik. Sehingga dalam menjalankan tugas maupun kegiatannya mengalami hambatan berjalan kurang optimal dalam mendukung kinerja

kegiatan berakibat kurang mendukung dalam keberhasilan program PPK. Untuk memecahkan hambatan dan permasalahan ini diperlukan upaya perbaikan atau peningkatan terhadap kualitas organisasi pelaksana sebagai berikut :

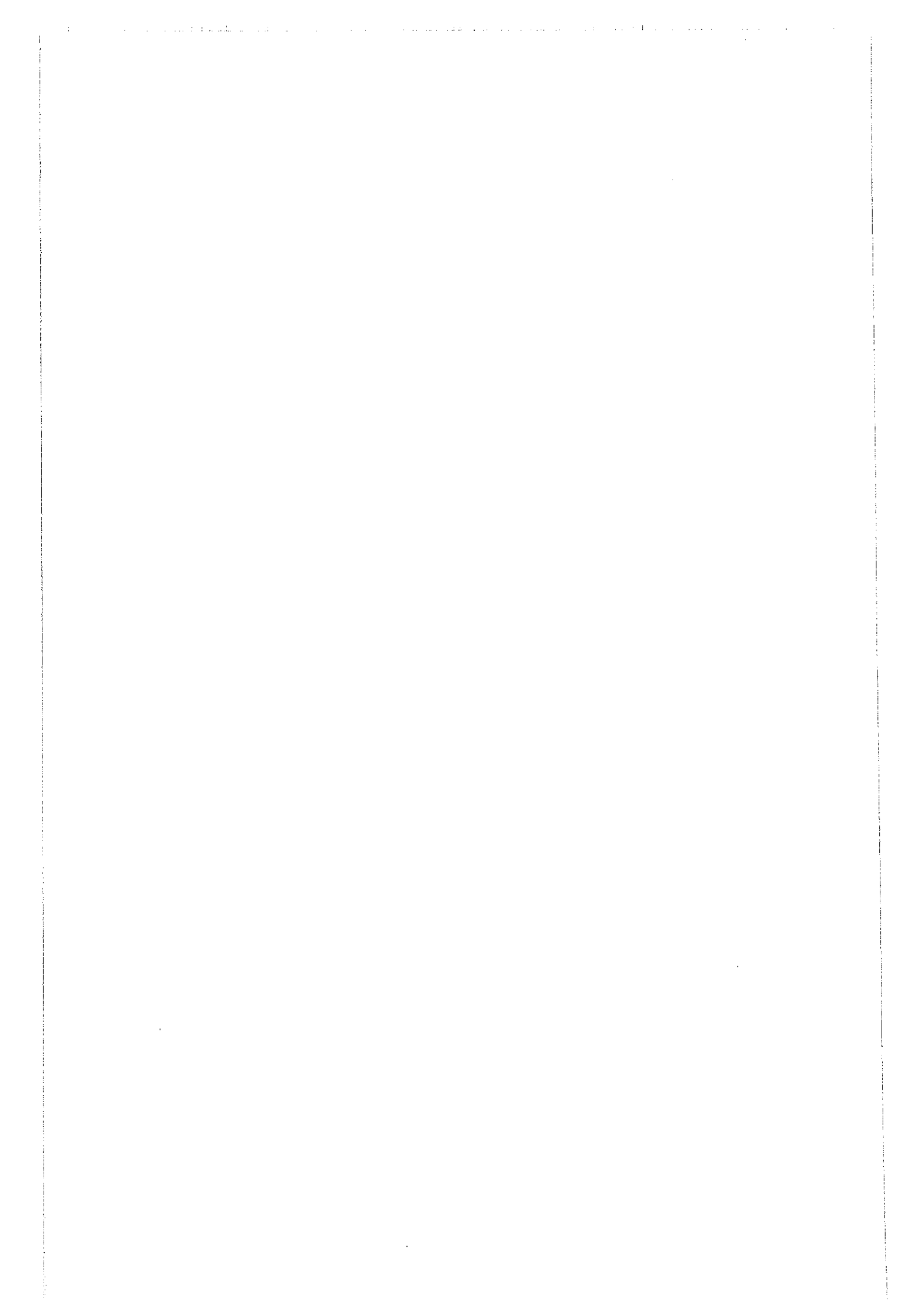
- a. Dalam pembentukan organisasi pelaksana program tidak perlu mengatur dengan ketentuan, unsur- unsur yang harus menjadi anggota tetapi didasarkan murni pada kemampuan teknis perorangan.
- b. Dalam kepengurusan TPKD tidak boleh ada jabatan rangkap, didasarkan pada spesialisasi kebutuhan.
- c. Diberikan insentif yang memadai bagi anggota, diambilkan dari dana operasional program.
- d. Diberikan pelatihan yang intensif sesuai dengan kondisi nyata kebutuhan organisasi pelaksana yang ada.
- e. Koordinasi organisasi pelaksana tiap jenjang di Tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa perlu ditingkatkan baik secara kuantitas maupun kualitas.
- f. Agar dikembangkan TOT perencanaan, administrasi pembangunan, dan yang bersifat teknis tepat guna sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
- g. Diperlukan suplemen dalam pengembangan pemasaran oleh pemerintah maupun konsultan pendamping.

### 3. Komunikasi Program

Hambatan terbesar dalam usaha menunjang keberhasilan program adalah pemahaman terhadap program dan tidak berfungsinya komunikasi yang efektif. Komunikasi program yang terjadi kurang memadai baik secara kuantitas maupun kualitas, sehingga diperlukan ketepatan jenis komunikasi atau model komunikasi seperti apa sehingga informasi terserap secara utuh berfungsi bagi peningkatan kemampuan pengelolaan program PPK. Upaya tersebut berdasarkan pada situasi problematika berdasarkan hasil penelitian dapat disampaikan sebagai berikut :

- a. Agar kinerja Program Pengembangan Kecamatan dapat berhasil secara efektif, perlu dibutuhkan seorang komunikator yang mempunyai kemampuan dan pengetahuan untuk mengkomunikasikan/menjelaskan kepada masyarakat khususnya kelompok sasaran, agar dapat diterima dan dipahami apa yang dimaksudkan dalam program.
- b. Isi atau pesan yang akan disampaikan hendaknya di ramu sedemikian rupa, agar mudah di ketahui dan dipahami oleh masyarakat.
- c. Fasilitator desa harus mempunyai kemampuan teknis dan kemampuan berkomunikasi dengan kelompok sasaran maupun terhadap masyarakat secara umum.

- d. Perlu diadakan forum sarasehan desa yang bisa dihadiri oleh semua komponen masyarakat yang bisa berfungsi sebagai sumber informasi.
- e. Perlunya dikembangkan mediasi institusi seperti arisan dan pegajian sebagai corong informasi pembangunan desa.
- f. Perlunya dilibatkan secara optimal peran tokoh masyarakat seperti kyai, guru atau orang yang dianggap mampu dalam bidangnya untuk mengemban sebagai media komunikator yang efektif.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abraham Francis M 1991, *Modernisasi Dunia Ketiga, Suatu Teori Umum Pembangunan*, Tiara wacana, Yogyakarta.
- Alirahman, 1998. *Ekonomi Pedesaan Dalam Proses Transformasi dan Globalisasi*, Makalah disampaikan dalam Pelatihan Teknik Manajemen Kebijakan Publik, UGM, Yogyakarta.
- Ali Novel, 1986 *Materi Pokok Hubungan Masyarakat*, Karunika Jakarta Universitas Terbuka.
- Alfian, 1986, *Transformasi Sosial Budaya dalam Pembangunan Nasional*, UI Press.
- Coralie Bryant dan Louise G White, 1987 *Manajemen Pembangunan Untuk Negara Berkembang*, LP3ES Jakarta.
- Clark John, 1995 *NGO dan Pembangunan Demokrasi* Tiara Wacana Yogyakarta
- Chamber Robert, 1996 *Participatory Rural Appraisal : Memahami Desa secara Partisipatif*, Kanisius Yogyakarta.
- Edward III, George C, 1980, *Implementing Public Policy, Congressional Quarterly Inc*, Washington.
- Effendi Sofian, Sairin Sjafrin dan Dahlan Alwi M, 1992, *Membangun Martabat Manusia : Peranan Ilmu-ilmu Sosial Dalam Pembangunan* , Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- Forum, 1990, Majalah No. 67 Jakarta.
- Gibson, Ivancevich, Donnelly, 1997, *Organisasi Perilaku, Struktur, Proses*, Binarupa Aksara.
- Heru Nugraha, 2001, *Negara Pasar dan Keadilan Sosial* Pustaka Pelajar.
- Jones Charles O, 1984, *An Introduction to The Study of Publi Policy*, Wadsworth inc.
- Kartasmita Ginanjar, 1996. *Pembangunan Untuk Rakyat*. CIDES. Jakarta
- Kalaudin M, Laode. 1999. *Format Indonesia Baru : Reorientasi Strategi Dan Kebijakan Pembangunan Nasional Serta Arah Pembangunan Daerah* Kaukus Iramasuka Nusantara, Jakarta.

Koentjaraningrat, 1974, *Kebudayaan Mentalitet Dan Pembangunan*. Gramedia. Jakarta.

Korten C. David 1984, *Contributions Toward Theory and Planning Framework, Pembangunan Yang Memihak Rakyat* Kupasan Tentang Teori dan Metode Pembangunan, Lembaga Studi Pembangunan Jakarta.  
2001, *Voluntary Action and The Global Agenda* ed Arief Budiman Menuju Abad Ke 21 Yayasan Obor Indonesia cetakan II, Jakarta.

Kossen Stan, 1993, *Aspek Manusiawi dalam Organisasi*, Erlangga Jakarta.

KSN(Badan Kesejahteraan Sosial Nasional),2000, Buletin '*Informasi Kajian Permasalahan Sosial dan Usaha Kesejahteraan Sosial*, Jakarta.

Mas'oe'd Mohtar, 1999. *Politik Birokrasi Dan Pembangunan*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.

Maskun, Sumitro 1995, *Pembangunan Masyarakat Desa Asas Kebijaksanaan Dan Manajemen*. Media Widya Mandala, Yogyakarta.

Nazir Moh, 1988 *Metode Penelitian Ghalia* Indonesia Jakarta.

Namawi Hadari, 1983, *Motode Penelitian Bidang Sosial*, Gajah Mada University Press.

Philip H. Combs dan Manzoor Ahmed 1974 *Memerangi Kemiskinan di Pedesaan Melalui Pendidikan Non Formal*, CV Rajawali Jakarta.

Priyono S Onny dan Pranarka, 1996. *Pemberdayaan, Konsep Kebijakan Dan Implementasi*, Centre For Strategic and International Studies (CSIS), Jakarta

Putra Fadillah, 2001, *Paradigma Kritis Dalam Studi Kebijakan Publik*, Pustaka Pelajar, Universitas Sunan Giri Surabaya.

Rondinelli Denis A,1990, *Proyek Pembangunan Sebagai Manajemen Terpadu (Pendekatan Adaptif terhadap Administrasi Pembangunan)*, Bumi Aksara.

Sajogyo (ed) 1982, *Bunga Rampai Perekonomian Desa*, Obor/YAE Jakarta

Santoso Singgih, 2000, *SPSS Mengolah Data Statistik Secara Profesional*, Elex Media Komputindo, Jakarta

Sastropetro Santoso 1986, *Partisipasi, Komunikasi, Persuasi dan Disiplin Dalam Pengembangan Nasional*. Penerbit Alumni, Bandung.

Singarimbun, Masri dan Effendi Sofian, 1988. *Metode Penelitian Survei*, LP3ES, Jakarta.

Soetrisno, Loekman, 1997. *Kemiskinan, Perempuan, Pemberdayaan*. Yogyakarta, PT Kanisius.

Sugiyono, 2000 Cetak ke 7 *Metode Penelitian Administrasi*, Alfabeta Bandung.

Sutarto, 1993, *Dasar-dasar Organisasi*, UGM Yogyakarta.

Todaro, Michael P., 2000. *Pembangunan Ekonomi 1* Edisi kelima. Jakarta PT. Bumi Aksara.

Yuwono Slamet, Prapto, 2000. *Perencanaan Dan Analisa Kebijakan Pembangunan*, UKSW, Salatiga.

Wibawa Samodra, Purbokusumo Yuyun dan Pramusinto Agus, *Evaluasi Kebijakan Publik*, Rajawali pers Jakarta 1994.

